

Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN



Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN



Pengarah:

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Penanggung Jawab:

Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Tim Penyusun:

Dwi Ratih Suryantining Esti

Yulia Agnis Sutarno

Amelia Ari Putri

Fahmi Rohman Bimantoro

Muhammad Yusuf Zaky Amanullah

Wahyu Sabtika

Aulia Rachma Pramudya

Gian Fany

Muhammad Zulfikar Ihsan

Bur Ilham Gunawan

Ni Ketut Sri Yani Putri

Informasi selanjutnya, hubungi:

Direktorat Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD),

Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Kementerian PPN/Bappenas

e-mail: dit.peppd@bappenas.go.id

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, salah satu tahapan penting dalam perencanaan adalah evaluasi pelaksanaan rencana. Peran evaluasi diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Hasil evaluasi akan menjadi masukan bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan.

Untuk memberikan informasi pembangunan daerah, Kedeputan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan melalui Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah melaksanakan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD). Kegiatan EPD 2024 berfokus pada evaluasi ketercapaian sasaran pembangunan nasional serta pelaksanaan intervensi baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kegiatan EPD 2024 tidak hanya dilaksanakan pada intervensi yang bersumber dari APBN, namun juga APBD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Hasil EPD diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif kondisi di daerah sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan dan tindak lanjut dalam perencanaan di periode berikutnya. Ke depannya, EPD akan terus diperkuat sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan *evidence-based policymaking* baik dalam perencanaan pembangunan maupun penganggaran.

Sebagai penutup, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan evaluasi ini. Kami menyadari bahwa laporan masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan. Oleh sebab itu, masukan dan saran yang membangun dari pengguna hasil evaluasi, sangat kami harapkan agar tujuan evaluasi dapat tercapai.

Jakarta, Februari 2025
Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan Daerah,



Rohmad Supriyadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
GLOSARIUM.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Hasil yang Diharapkan	3
1.4. Ruang Lingkup	4
1.5. Batasan Evaluasi.....	4
BAB II METODE EVALUASI DAN MEKANISME PELAKSANAAN	7
2.1. Metode Pengumpulan Data	7
2.2. Metode Analisis	10
2.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.....	18
BAB III HASIL EVALUASI RJMN	21
3. 1. Kinerja Makro RPJMN 2020 – 2024	21
3. 2. Kinerja Prioritas Nasional di Daerah Tahun 2020-2024.....	33
3. 3. Evaluasi Kontribusi.....	91
BAB IV HASIL EVALUASI RKP	103
4. 1 Kinerja Makro RKP 2023.....	103
4. 2 Kinerja Makro RKP 2024.....	109
4. 3 Kinerja Prioritas Nasional di Daerah Tahun 2024.....	117
4. 4 Evaluasi Kontribusi Tahun 2023.....	138
4. 5 Potret Capaian Indikator Utama Pembangunan.....	143
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	161
5. 1 Kesimpulan	161
5. 2 Rekomendasi.....	165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Prioritas RKP Tahun 2024.....	2
Gambar 1. 2	Kerangka Logis EKPD 2024	2
Gambar 1. 3	Ruang Lingkup Evaluasi.....	4
Gambar 2. 1	Tahapan Skoring Kinerja Makro.....	11
Gambar 2. 2	Tahapan dan Metode Evaluasi berdasarkan AP, PN, dan IUP	15
Gambar 2. 3	Tahapan Kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2024	18
Gambar 3. 1	Capaian Agenda Pembangunan 1 di 34 Provinsi.....	34
Gambar 3. 2	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Nilai).....	36
Gambar 3. 3	Produksi Daging Tahun 2023 (Ton).....	39
Gambar 3. 4	Capaian Nilai Tukar Petani (NTP).....	40
Gambar 3. 5	Capaian Produksi Ikan Tahun 2023 (Ton)	41
Gambar 3. 6	Capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN).....	43
Gambar 3. 7	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2023 (Triliun)	45
Gambar 3. 8	Capaian Agenda Pembangunan 2 di 34 Provinsi.....	46
Gambar 3. 9	Jumlah Desa Mandiri	48
Gambar 3. 10	Capaian Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal Tahun 2023 (%)....	50
Gambar 3. 11	Capaian Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal Tahun 2023 (Nilai).....	52
Gambar 3. 12	Capaian Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah Tahun 2023 (%)	53
Gambar 3. 13	Capaian Agenda Pembangunan 2 di 34 Provinsi.....	54
Gambar 3. 14	Capaian Indikator Cakupan Kepesertaan JKN Tahun 2019 dan 2023 di 34 Provinsi (%)	57
Gambar 3. 15	Capaian Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek).....	59
Gambar 3. 16	Capaian Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	61
Gambar 3. 17	Capaian Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar Tahun 2019 dan 2023 di 34 Provinsi (%)	63
Gambar 3. 18	Capaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Tahun 2019 dan 2023 di 34 Provinsi (Tahun)	65
Gambar 3. 19	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2019 dan 2023 di 34 Provinsi (Nilai)	67
Gambar 3. 20	Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2019 dan 2023 di 34 Provinsi (Nilai)	69
Gambar 3. 21	Capaian Agenda Pembangunan 4 di 34 Provinsi.....	71
Gambar 3. 22	Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2019 dan 2023 di 34 Provinsi (Nilai).....	73
Gambar 3. 23	Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019 dan 2023 di 34 Provinsi (Nilai)	75
Gambar 3. 24	Capaian Nilai Literasi Budaya Tahun 2019 dan -2023 di 34 Provinsi	76
Gambar 3. 25	Capaian Agenda Pembangunan 5 di 34 Provinsi.....	77
Gambar 3. 26	Capaian Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2019 dan 2023 di 34 Provinsi (%).....	80
Gambar 3. 27	Distribusi Capaian Rasio Elektrifikasi Tahun 2023 di 34 Provinsi	81
Gambar 3. 28	Capaian Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman.....	82
Gambar 3. 29	Capaian Agenda Pembangunan 6 di 34 Provinsi.....	84

Gambar 3. 30	Tren Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2023 di 34 Provinsi (Nilai).....	86
Gambar 3. 31	Capaian Agenda Pembangunan 7 di 34 Provinsi.....	88
Gambar 3. 32	Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2019 dan 2023 di 34 Provinsi (Nilai)	90
Gambar 3. 33	Evaluasi Kontribusi Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Periode 2020-2023	91
Gambar 3. 34	Evaluasi Kontribusi Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Nasional Periode 2020-2023	93
Gambar 3. 35	Evaluasi Kontribusi Provinsi Terhadap Rasio Gini Nasional Periode 2020-2023	95
Gambar 3. 36	Evaluasi Kontribusi Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional Periode 2020-2023	96
Gambar 3. 37	Evaluasi Kontribusi Provinsi Terhadap Indeks Pembangunan Nasional Periode 2020-2023	98
Gambar 4. 1	Capaian LPE Tahun 2019 - 2023	105
Gambar 4. 2	Capaian Tingkat Kemiskinan Tahun 2019 - 2023.....	106
Gambar 4. 3	Capaian TPT Tahun 2019 - 2023.....	107
Gambar 4. 4	Capaian Rasio Gini Tahun 2019 - 2023.....	108
Gambar 4. 5	Capaian IPM Tahun 2019 - 2023.....	109
Gambar 4. 6	Capaian LPE Tahun 2020 - 2024	111
Gambar 4. 7	Capaian Tingkat Kemiskinan.....	113
Gambar 4. 8	Capaian Rasio Gini Tahun 2020 - 2024	114
Gambar 4. 9	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 - 2024.....	115
Gambar 4. 10	Capaian IPM Tahun 2020 - 2024.....	116
Gambar 4. 11	Kontribusi Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional.....	116
Gambar 4. 11	Kontribusi Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional.....	138
Gambar 4. 12	Kontribusi Capaian Tingkat Kemiskinan Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022-2023	139
Gambar 4. 13	Kontribusi Capaian Rasio Gini Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022-2023	140
Gambar 4. 14	Kontribusi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional.....	141
Gambar 4. 15	Kontribusi Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional.....	142

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Data yang digunakan dalam analisis.....	7
Tabel 2. 2	Kriteria Skoring Capaian Kinerja Makro EPD Tahun 2024	14
Tabel 3. 1	Capaian dan Tren Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di 34 Provinsi Tahun 2019 - 2023 (%)	21
Tabel 3. 2	Capaian dan Tren Kinerja Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi Tahun 2019 - 2023 (%) 24	
Tabel 3. 3	Capaian dan Tren Kinerja Rasio Gini di 34 Provinsi Tahun 2019 - 2023 (Nilai)	27
Tabel 3. 4	Capaian dan Tren Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka di 34 Provinsi Tahun 2019 - 2023 (%)	29
Tabel 3. 5	Capaian dan Tren Kinerja Indeks Pembangunan Manusia di 34 Provinsi Tahun 2019 - 2023 (Nilai)	32
Tabel 3. 6	Capaian Indikator pada Agenda Pembangunan 1 di 34 Provinsi.....	34
Tabel 3. 7	Capaian Indikator pada Agenda Pembangunan 2 di 34 Provinsi.....	47
Tabel 3. 8	Capaian Indikator pada Agenda Pembangunan 3 di 34 Provinsi.....	55
Tabel 3. 9	Capaian Indikator pada Agenda Pembangunan 4 di 34 Provinsi.....	72
Tabel 3. 10	Capaian Indikator pada Agenda Pembangunan 5 di 34 Provinsi	78
Tabel 3. 11	Capaian Indikator pada Agenda Pembangunan 6 di 34 Provinsi	85
Tabel 3. 12	Capaian Indikator pada Agenda Pembangunan 7 di 34 Provinsi	89
Tabel 4. 1	Skoring Kinerja Capaian Tahun 2023	103
Tabel 4. 2	Skoring Kinerja Capaian Tahun 2024	110
Tabel 4. 3	Potret Capaian PN RKP Tahun 2024 di 34 Provinsi	118
Tabel 4. 4	Capaian Indikator pada Prioritas Nasional 1 di 34 Provinsi.....	119
Tabel 4. 5	Capaian Indikator pada Prioritas Nasional 2 di 34 Provinsi.....	124
Tabel 4. 6	Capaian Indikator pada pada Prioritas Nasional 3 di 34 Provinsi	126
Tabel 4. 7	Capaian Indikator pada Prioritas Nasional 4 di 34 Provinsi.....	129
Tabel 4. 8	Capaian Indikator pada Prioritas Nasional 5 di 34 Provinsi.....	131
Tabel 4. 9	Capaian Indikator pada Prioritas Nasional 6 di 34 Provinsi.....	133
Tabel 4. 10	Capaian Indikator pada Prioritas Nasional 7 di 34 Provinsi	135
Tabel 4. 11	Potret Capaian Sasaran Utama Visi di 34 Provinsi	143
Tabel 4. 12	Potret Capaian Transformasi Sosial di 34 Provinsi	147
Tabel 4. 13	Potret Capaian Transformasi Ekonomi di 34 Provinsi.....	150
Tabel 4. 14	Potret Capaian Transformasi Tata Kelola di 34 Provinsi	152
Tabel 4. 15	Potret Capaian Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi di 34 Provinsi.....	154

GLOSARIUM

AP	: Agenda Pembangunan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APK	: Angka Partisipasi Kasar
Bapanas	: Badan Pangan Nasional
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMDesa	: Badan Usaha Milik Desa
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
BRIN	: Badan Riset Inovasi Nasional
COVID-19	: Jenis virus dari Coronavirus disebabkan oleh SARS-CoV-2 dan teridentifikasi pada tahun 2019
EPD	: Evaluasi Pembangunan Daerah
FGD	: <i>Focused Group Discussion</i>
HLS	: Harapan Lama Sekolah
IDG	: Indeks Pemberdayaan Gender
IDL	: Imunisasi Dasar Lengkap
IKG	: Indeks Ketimpangan Gender
IKUB	: Indeks Kerukunan Umat Beragama
IPK	: Indeks Pembangunan Kebudayaan
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPP	: Indeks Pembangunan Pemuda
IUP	: Indikator Utama Pembangunan
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemenbud	: Kementerian Kebudayaan
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendes PDT	: Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kemendikisaintek	: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
KemenESDM	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kemenham	: Kementerian Hak Asasi Manusia
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kemenkop	: Kementerian Koperasi
KemenKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kemenkum	: Kementerian Hukum
KemenLH	: Kementerian Lingkungan Hidup

Kemenpan RB	:	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenpora	:	Kementerian Pemuda dan Olahraga
KemenPU	:	Kementerian Pekerjaan Umum
Kemen PPPA	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KemenPKP	:	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementan	:	Kementerian Pertanian
Kemen UMKM	:	Kementerian Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah
KJP	:	Kartu Jakarta Pintar
K/L/D	:	Kementerian/Lembaga/Daerah
KPBU	:	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
LPE	:	Laju Pertumbuhan Ekonomi
LU	:	Lapangan usaha
NTN	:	Nilai Tukar Nelayan
NTP	:	Nilai Tukar Petani
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PLTU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMTB	:	Pembentukan Modal Tetap Bruto
PSN	:	Proyek Strategis Nasional
Regsosek	:	Registrasi Sosial Ekonomi
RG	:	Rasio Gini
RLS	:	Rata-rata Lama Sekolah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDGs	:	Tujuan pembangunan berkelanjutan
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPM	:	Standar Pelayanan Minimum
SPPH	:	Skor Pola Pangan Harapan
SPPN	:	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
STEAM	:	<i>Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics</i>
TBS	:	Tandan Buah Segar
THIS	:	Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial

TK	:	Tingkat Kemiskinan
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
UHC	:	Universal Coverage Health
UHH	:	Usia Harapan Hidup
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNICEF	:	United Nations Children's Fund, atau Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa

“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”



BAB I

Pendahuluan

“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi menjadi salah satu dari empat tahapan utama dalam proses pembangunan nasional. Adapun keempat tahapan tersebut meliputi (1) penyusunan; (2) penetapan; (3) pengendalian dan perencanaan; serta (4) evaluasi pelaksanaan perencanaan. Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional. Evaluasi dilakukan dalam rangka menilai kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, sebagai pembelajaran (*lesson learned*) bagi perbaikan kebijakan pembangunan pada tahap berikutnya. Peran strategis evaluasi dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan Kementerian PPN/Bappenas untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan melakukan evaluasi kebijakan pada tahun berjalan dalam rangka untuk menentukan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan semestinya tidak hanya mencakup atas kebijakan dalam perencanaan pusat, namun juga kebijakan dalam perencanaan daerah yang mendukung pembangunan nasional. Adanya pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) juga menguatkan prinsip bahwa kontribusi pembangunan daerah sangat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional.

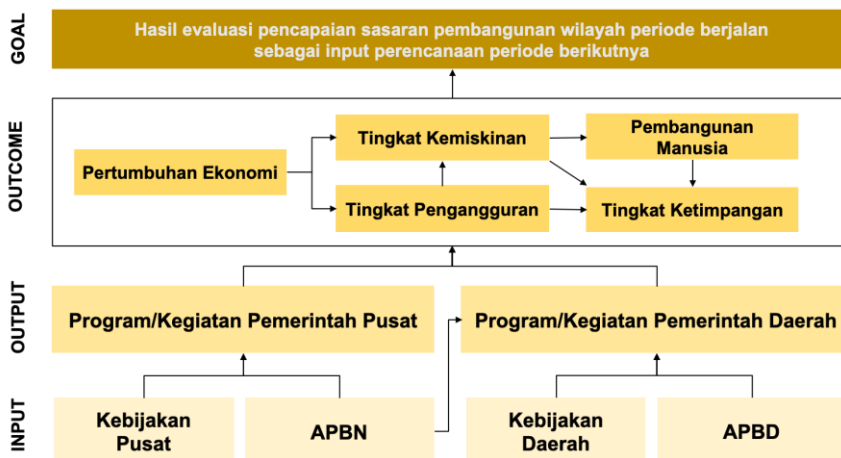
Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dengan tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 serta Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023, terdapat strategi pengembangan wilayah dan Prioritas Nasional 2 yaitu "Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan". Substansi tersebut erat kaitannya dengan pembangunan daerah,

dimana dalam implementasinya membutuhkan sinkronisasi intervensi pembangunan baik pusat maupun daerah untuk mencapai sasaran pembangunan kewilayahan dan sasaran Prioritas Nasional dalam RKP tersebut.

Gambar 1. 1 Prioritas RKP Tahun 2024



Gambar 1. 2 Kerangka Logis EKPD 2024



Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) ruang lingkup, yaitu dokumen RPJMN Tahun 2020-2025 dan RKP Tahun 2024. Evaluasi

Pembangunan Daerah pada lingkup RPJMN meliputi (1) Evaluasi Kinerja Makro Tahun 2019-2023, (2) Evaluasi Kontribusi Tahun 2020-2023, dan (3) Evaluasi Kinerja Agenda Pembangunan di Daerah. Evaluasi Pembangunan Daerah pada lingkup RKP meliputi (1) Evaluasi Kinerja Makro Tahun 2024, (2) Evaluasi Kontribusi Tahun 2022-2023, (3) Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional di Daerah, dan (4) *Baseline* Indikator Utama Pembangunan. Hasil evaluasi diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif kondisi di daerah sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan dan tindak lanjut dalam perencanaan di periode berikutnya.

1.2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan EPD tahun 2024 yaitu untuk:

1. Memantau dan mengevaluasi capaian pembangunan di 38 provinsi berdasarkan sasaran RPJPN, RPJMN, dan RKP;
2. Mengidentifikasi faktor pendukung/penghambat (termasuk isu strategis) dalam pencapaian sasaran pembangunan;
3. Mengevaluasi kontribusi daerah dalam pencapaian indikator makro nasional; dan
4. Menyusun hasil evaluasi sebagai dasar rekomendasi untuk perencanaan pembangunan pusat dan daerah.

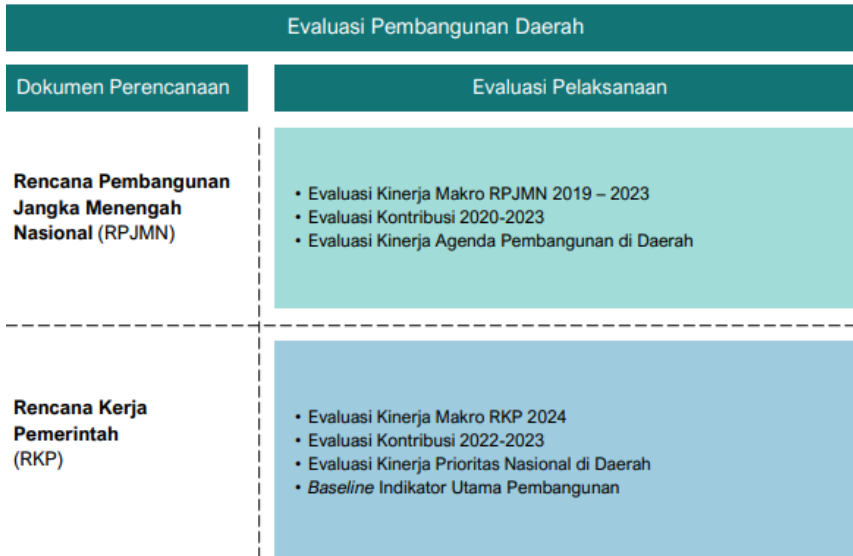
1.3. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan (*output*) dari pelaksanaan EPD di 38 Provinsi adalah tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah yang diperkuat dengan analisis mendalam dan rekomendasi spesifik untuk masing-masing provinsi.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup EPD Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3 Ruang Lingkup Evaluasi



Ruang lingkup substansi Evaluasi Pembangunan Daerah 38 provinsi menekankan pada evaluasi kinerja makro, evaluasi kontribusi, dan evaluasi kinerja PN di daerah. Evaluasi pencapaian ini diharapkan dapat memberikan informasi mendalam terhadap penyebab *gap* yang terjadi serta identifikasi faktor yang memengaruhi hasil pencapaian tersebut secara kualitatif.

1.5. Batasan Evaluasi

Pelaksanaan EPD tahun 2024 memiliki batasan dalam evaluasi yaitu:

- 1) **Pendekatan evaluasi.** Evaluasi dilakukan melalui dua pendekatan yaitu *ex-post* dan evaluasi *on-going*.
- 2) **Pengumpulan data.** Pengumpulan data dan informasi lebih banyak dilakukan secara studi pustaka, dan pendalaman hanya dilakukan pada tiga daerah terpilih yang mewakili wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Namun demikian, dilakukan FGD kewilayahan dengan Bappeda 38 Provinsi.
- 3) **Cakupan evaluasi.** Cakupan evaluasi berfokus evaluasi kinerja makro, evaluasi kontribusi, dan evaluasi kinerja PN di daerah.
- 4) **Ketersediaan data.** Tantangan dalam pelaksanaan evaluasi yaitu ketersediaan data pada triwulan III dan rilis data di akhir tahun. Selain itu, pengumpulan data dilakukan secara mandiri melalui *website* Badan Pusat Statistik dan portal K/L/D.



BAB II

Metode Evaluasi dan Mekanisme Pelaksanaan

“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”

BAB II

METODE EVALUASI DAN MEKANISME PELAKSANAAN

2.1. Metode Pengumpulan Data

Analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian/Lembaga, maupun data dari masing-masing pemerintah daerah terpilih. Analisis kualitatif dilakukan berdasarkan kombinasi analisis data sekunder, *literature review* terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta data primer dari hasil *Focused Group Discussion* (FGD) yang akan dilakukan dengan beberapa *stakeholder* terkait.

Tabel 2. 1 Data yang digunakan dalam analisis

Evaluasi	Data	Sumber	
RPJMN	Agenda Pembangunan 1	Skor Pola Pangan Harapan	Bapanas
		Nilai Tukar Petani	Kementan/BPS
		Nilai Tukar Nelayan	KemenKP/BPS
		Realisasi PMA & PMDN	BKPM
		Produksi Daging	Kementan
		Produksi Ikan	KemenKP
	Agenda Pembangunan 2	Perkembangan status pembangunan desa (desa mandiri)	KemendesPDT
		Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	KemendesPDT
		Rata-rata IPM di daerah tertinggal	KemendesPDT
		Persentase capaian penerapan SPM di daerah	Kemendagri
	Agenda Pembangunan 3	Cakupan Kepesertaan JKN	Kemenkes
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12 - 23 bulan	Kemenkes
		Prevalensi <i>stunting</i> pada balita	Kemenkes
		Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	Kemenkes
		Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	BPS
		Indeks Pemberdayaan Gender	KemenPPPA
		Indeks Pembangunan Pemuda	Kemenpora
	Agenda Pembangunan 4	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Kemenbud
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Kemenag
		Nilai Budaya Literasi	Kemenbud

Evaluasi	Data	Sumber	
Agenda Pembangunan 5	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau	KemenPKP/BPS	
	Rasio elektrifikasi	KemenESDM	
	Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	KemenPKP/BPS	
Agenda Pembangunan 6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	KemenLH	
Agenda Pembangunan 7	Indeks Demokrasi Provinsi	Kemenkum/ Kemenham/BPS	
RKP	Prioritas Nasional 1	Skor Pola Pangan Harapan	Bapanas
		Produksi Perikanan	KemenKP/BPS
		Pertumbuhan PDB Perikanan	KemenKP/BPS
		Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun	BPS
		Rasio Kewirausahaan Provinsi	Kemenkop/ KemenUMKM
		Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	BPS
		Kontribusi PDB Industri Pengolahan	BPS
		Pembentukan Modal Tetap Bruto	BPS
	Prioritas Nasional 2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	BPS
		Persentase penduduk miskin	BPS
		Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS
		Rasio Gini	BPS
		Indeks Pembangunan Manusia	BPS
	Prioritas Nasional 3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	Kemendiktisaintek
		Prevalensi <i>Stunting</i>	Kemenkes
		Prevalensi <i>Wasting</i>	Kemenkes
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	BPS
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	BPS
	Prioritas Nasional 4	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Kemenbud
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Kemenag
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	KemenPKP
	Prioritas Nasional 5	Persentase Kondisi Mantap Jalan	KemenPU

Evaluasi		Data	Sumber	
		Rasio Elektrifikasi	KemenESDM	
		Jumlah Produksi Listrik (GWh)	KemenESDM	
Prioritas Nasional 6		Indeks Kualitas Air (IKA)	KemenLH	
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	KemenLH	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	KemenLH	
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	KemenLH	
		Penurunan Indeks Risiko Bencana	BNPB	
Prioritas Nasional 7		Indeks Demokrasi Provinsi	Kemenkum/ Kemenham/BPS	
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Pusat	
		Indeks Kemerdekaan Pers	Dewan Pers	
		<i>Crime Rate</i>	BPS	
		Indeks Pelayanan Publik	KemenPANRB	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE	KemenPANRB	
		Indeks Integritas Nasional	KPK	
Indikator Utama Pembangunan	Sasaran Utama Visi	PDRB perkapita (ADHB)	BPS	
		Kontribusi PDB Industri Pengolahan	BPS	
		Tingkat kemiskinan	BPS	
		Rasio Gini	BPS	
		Kontribusi PDRB Provinsi	BPS	
		Pertumbuhan ekonomi	BPS	
		Indeks Inovasi Daerah	Kemendagri	
		Indeks Daya Saing Daerah	BRIN	
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	BPS	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	KemenLH	
	Transformasi Sosial		Umur Harapan Hidup (UHH)	BPS
			Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	Kemenkes
			Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	Kemenkes
			Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	Kemenkes
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Kemenkes
			Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	BPS
	Transformasi Ekonomi		Harapan Lama Sekolah	BPS
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	BPS
			Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS

Evaluasi	Data	Sumber
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	BPS
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	BPS
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	KemenPKP/BPS
Transformasi Tata Kelola	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE	KemenPANRB
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	KemenPANRB
	Indeks Integritas Nasional	KPK
	Indeks Demokrasi Provinsi	Kemenkum/ Kemenham/BPS
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Kemenbud
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Kemenag
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	BPS
	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	BPS
	Indeks Risiko Bencana	BNPB
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	KemenPKP/BPS

Sumber: EPD, diolah

2.2. Metode Analisis

Secara umum, kegiatan EPD tahun 2024 menggunakan *mixed method* dengan sejumlah metode evaluasi dan analisis antara lain: analisis *gap*, skoring komposit, dan analisis deskriptif. Berikut adalah uraian mengenai metode analisis EPD tahun 2024.

2.2.1. Skoring Capaian Kinerja Makro

Evaluasi capaian kinerja dilaksanakan dengan menggunakan kombinasi metode *gap analysis* dan skoring. Evaluasi dilakukan berdasarkan lima indikator makro yang merupakan indikator kewilayahan dalam RKP dan RKPD. Lima indikator tersebut adalah:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
2. Tingkat Kemiskinan (TK)
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4. Rasio Gini (RG)
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Metode *gap analysis* dan skoring terhadap lima indikator makro tersebut akan menghasilkan skor akhir yang menggambarkan capaian kinerja *ongoing* suatu provinsi. Gambar di bawah ini menunjukkan alur penghitungan skoring capaian kinerja dalam EPD tahun 2024.

Gambar 2. 1 Tahapan Skoring Kinerja Makro



Sumber: Penulis

Skoring capaian kinerja pembangunan dalam EPD tahun 2024 terdiri atas lima langkah:

1. Mengidentifikasi angka sasaran yang dijadikan sebagai perbandingan dengan angka capaian. Setiap indikator memiliki empat angka sasaran, yaitu target RKP 2024, RKPD 2024, realisasi di tahun 2023, capaian rata-rata wilayah, dan capaian nasional di tahun 2024.
2. Menentukan kriteria skor untuk tiap perbandingan antara realisasi capaian dengan target. Dalam laporan EPD ini, skoring atas perbandingan dengan angka target RKP 2024 dan RKPD 2024 mengacu pada kriteria yang digunakan dalam Evaluasi RKP. Sementara itu, skoring atas perbandingan dengan realisasi capaian tahun 2023, rata-rata wilayah dan nasional tahun 2024 menggunakan distribusi data masing-masing indikator.

3. Menentukan angka realisasi capaian *on-going* tiap-tiap indikator makro di 34 provinsi untuk tahun 2024.
4. Membandingkan angka realisasi capaian tiap-tiap indikator dengan lima angka sasaran (analisis *gap*) sehingga diperoleh angka tingkat ketercapaian dalam persentase.
5. Menentukan skor indikator untuk tiap-tiap perbandingan antara capaian dan sasaran atas kelima indikator makro tersebut. Tiap-tiap nilai perbandingan akan mendapatkan skor 1-3 sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Dalam EPD tahun 2024, terdapat 5 (lima) angka pembandingan, yaitu:

1. **Sasaran indikator makro pembangunan kewilayahan pada RKP 2024.** Angka sasaran ini hanya berlaku untuk indikator LPE, TK, dan TPT karena Pemerintah Pusat tidak menetapkan sasaran untuk Rasio Gini dan IPM hingga level provinsi. Target indikator RKP mencerminkan seberapa baik suatu daerah dalam memenuhi capaian pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. **Sasaran indikator makro pembangunan kewilayahan pada RKP 2024.** Angka sasaran ini berlaku untuk kelima indikator makro. Target indikator RKP mencerminkan seberapa baik suatu daerah dalam memenuhi capaian pembangunan yang mereka tetapkan sendiri.
3. **Realisasi capaian indikator makro tahun 2023.** Angka sasaran ini berlaku untuk seluruh indikator makro Perbandingan antara capaian kinerja *on-going* dengan realisasi periode lalu digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu daerah dalam meraih kinerja pembangunan yang sama dengan tahun sebelumnya.
4. **Rata-rata realisasi indikator makro wilayah setara tahun 2024.** Angka sasaran ini berlaku untuk seluruh indikator makro. Perbandingan antara realisasi capaian suatu daerah dengan rata-rata capaian wilayah setara mencerminkan posisi relatif capaian pembangunan suatu daerah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain dengan karakteristik yang serupa. Dalam kajian ini, 34 provinsi dibagi ke dalam 5 wilayah berdasarkan kelompok pulau: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua-Nusa Tenggara.
5. **Realisasi capaian nasional tahun 2024.** Angka sasaran ini berlaku untuk seluruh indikator makro. Perbandingan antara realisasi capaian suatu daerah dengan rata-rata capaian nasional mencerminkan posisi relatif capaian pembangunan suatu daerah jika dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional.

Dari kelima indikator makro yang digunakan, indikator LPE dan IPM merupakan indikator dengan arah positif—semakin tinggi nilai berarti semakin baik—sedangkan indikator TK, TPT, dan RG merupakan indikator dengan arah negatif—semakin kecil angka berarti semakin baik—sehingga diperlukan penyesuaian formula untuk menghitung capaian antara realisasi dengan target. Untuk tiap-tiap provinsi i dan kombinasi indikator-sasaran j , nilai capaian perbandingan antara realisasi dengan target RKP dan RKPD dihitung dengan formula sebagai berikut: ¹

Indikator dengan arah positif (LPE dan IPM)	:	$Capaian_{ij} = \frac{[Target_{ij} - (Target_{ij} - Realisasi_{ij})]}{Target_{ij}}$
Indikator dengan arah negatif (TK, TPT, dan RG)	:	$Capaian_{ij} = \frac{[Target_{ij} - (Realisasi_{ij} - Target_{ij})]}{Target_{ij}}$

Sementara itu, untuk menghitung nilai capaian perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan 2023, digunakan formula sebagai berikut:

Indikator dengan arah positif (LPE dan IPM)	:	$Capaian_{ij} = \frac{Realisasi_{2024_{ij}}}{Realisasi_{2023_{ij}}}$
Indikator dengan arah negatif (TK, TPT, dan RG)	:	$Capaian_{ij} = \frac{[Real2023_{ij} - (Real2024_{ij} - Real2023_{ij})]}{Real2023_{ij}}$

Selanjutnya dilakukan skoring indikator untuk tiap-tiap perbandingan antara realisasi dengan sasaran atas kelima indikator makro tersebut. Tiap-tiap nilai perbandingan akan mendapatkan skor 1-3 sesuai dengan kriteria yang berlaku. Untuk nilai perbandingan antara realisasi dengan target RKP dan RKPD, kriteria skoring yang digunakan mengacu pada Laporan Evaluasi RKP yang dilakukan oleh Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor (Dit. PEPPS), Bappenas. Sementara itu, untuk perbandingan dengan realisasi tahun 2023, rata-rata wilayah tahun 2023, dan capaian nasional tahun 2024, penentuan skor dilakukan

¹ Secara total terdapat 18 kombinasi antara indikator dan sasaran.

berdasarkan distribusi data dari masing-masing perbandingan. Secara detail kriteria skoring yang dipakai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2 Kriteria Skoring Capaian Kinerja Makro EPD Tahun 2024

Angka Pemanding	Kriteria Skor Indikator		
	1 (Merah)	2 (Kuning)	3 (Hijau)
Target RKP 2024	Capaian <60% dari Target	Capaian antara ≥ 60% dan < 90% dari Target	Capaian ≥ 90% dari Target
Target RKPD 2024	Capaian < 60% dari Target	Capaian antara ≥ 60% dan < 90% dari Target	Capaian ≥ 90% dari Target
Realisasi Tahun 2023	Capaian < 0	0 ≤ Capaian < 0.5 x Positif Range	Capaian ≥ 0.5 x Positif Range
Rata-rata Wilayah Tahun 2024	Capaian < (min+(range/3))	(min+(range/3)) ≤ Capaian < (max-(range/3))	Capaian ≥ (max-(range/3))
Capaian Nasional Tahun 2024	Capaian < 0	0 ≤ Capaian < 0.5 x Positif Range	Capaian ≥ 0.5 x Positif Range

Sumber: Penulis

Langkah terakhir dalam proses skoring capaian kinerja adalah menghitung skor akhir yang merepresentasikan kinerja suatu provinsi dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Skor akhir capaian kinerja suatu provinsi dapat dihitung dengan formula berikut:

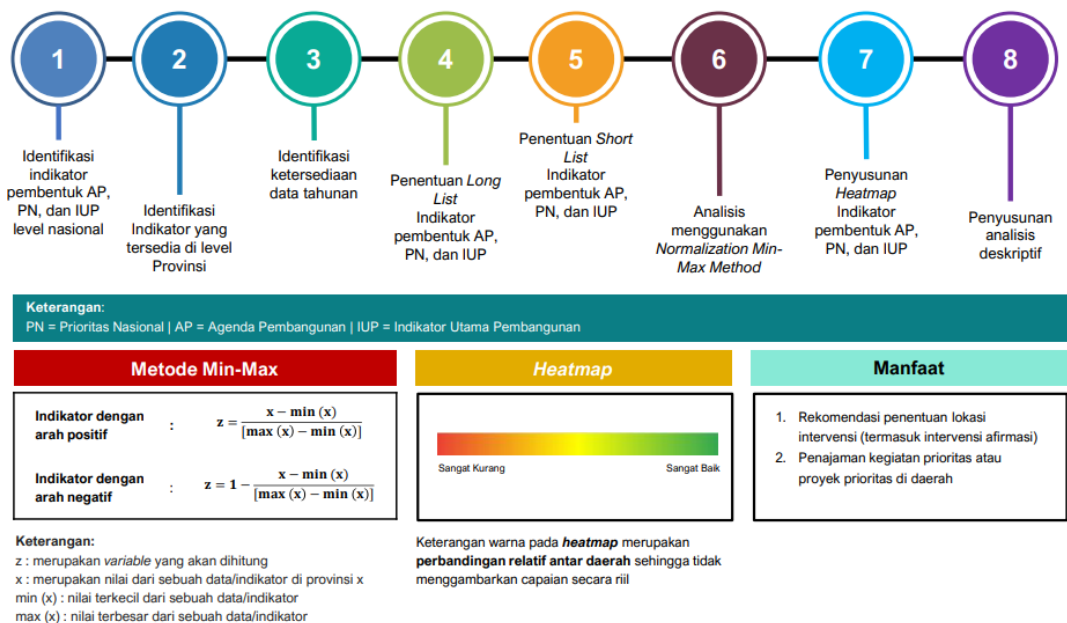
$$Skor_Capaian_i = \frac{\sum_{j=1}^{13} Skor_Indikator_{ij}}{Skor_Maksimum}$$

Jika suatu provinsi memperoleh skor tertinggi (3) untuk seluruh kombinasi indikator-sasaran, maka skor maksimum yang dapat diperoleh suatu provinsi adalah $18 * 3 = 54$. Skor akhir capaian kinerja merupakan rasio dari total skor indikator dengan skor maksimum tersebut. Dengan demikian, rentang skor akhir akan berada di kisaran 0 sampai dengan 1.

2.2.2. Evaluasi Kinerja Capaian Agenda Pembangunan, Prioritas Nasional, dan Indikator Utama Pembangunan

Secara umum, evaluasi kinerja capaian Agenda Pembangunan (AP) RPJMN, Prioritas Nasional (PN) RKP, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) melalui empat tahap utama yaitu (1) penentuan indikator dan pengumpulan data, (2) normalisasi data, dan (3) menyusun *heatmap* indikator, serta (5) menyusun analisis deskriptif.

Gambar 2. 2 Tahapan dan Metode Evaluasi berdasarkan AP, PN, dan IUP



Pertama, mengidentifikasi indikator pembentuk AP, PN, dan Indikator Utama Pembangunan yang tersedia datanya di level provinsi. Selanjutnya, dilakukan juga identifikasi ketersediaan data tahunan. Setelah itu, dilakukan penentuan daftar indikator pembentuk AP, PN, dan IUP dimaksud. Kemudian, dilanjutkan dengan pengumpulan data yang dilakukan secara mandiri baik melalui publikasi BPS, Kementerian/Lembaga dan Daerah.

Langkah kedua yaitu melakukan normalisasi data. Normalisasi dilakukan dengan metode *min-max* untuk mendapatkan angka yang selalu positif. Setelah normalisasi, tiap indikator memiliki nilai antara 0 s.d. 1. Normalisasi yang dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Indikator dengan arah positif} : z = \frac{x - \text{Nilai Minimum}(x)}{\text{Nilai Maximum}(x) - \text{Nilai minimum}(x)}$$

$$\text{Indikator dengan arah negatif} : z = 1 - \frac{x - \text{Nilai Minimum}(x)}{\text{Nilai Maximum}(x) - \text{Nilai minimum}(x)}$$

Keterangan:

z: merupakan variabel yang akan dihitung

x: merupakan nilai dari sebuah data/indikator di provinsi x

Min (x): nilai terkecil dari sebuah data/indikator

Max (x): nilai terbesar dari sebuah data/indikator

Langka ketiga yaitu menyusun *heatmap* untuk setiap indikator. Analisis *heatmap* adalah metode visualisasi data yang menggunakan warna untuk mewakili informasi dan mengidentifikasi pola, tren, dan anomali dalam data. *Heatmap* menggunakan notifikasi warna merah hingga hijau. Keterangan warna pada *heatmap* merupakan perbandingan relatif antardaerah sehingga tidak menggambarkan capaian riil. Berikut adalah notifikasi *heatmap* indikator. Langkah terakhir adalah melakukan analisis deskriptif terhadap hasil *heatmap* indikator. Analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan capaian indikator dari suatu daerah.

2.2.3. Evaluasi Kontribusi Capaian Makro Daerah terhadap Capaian Nasional

Secara umum, analisis evaluasi kontribusi adalah suatu cara atau pendekatan analitis yang digunakan dalam proses evaluasi capaian suatu program pembangunan – sebagai bagian dari upaya penilaian (*assessment*) yang lebih luas yang bertujuan mengungkap kausalitas atau hubungan sebab-akibat antara program yang dilakukan dan dampak yang dihasilkan. Menurut Mayne (2011), pada kondisi yang ideal analisis kontribusi yang kompleks secara teori dapat melibatkan 5 (lima) prinsip utama, yakni: (i) kausalitas generatif, (ii) teori perubahan, (iii) kontribusi program, (iv) keberadaan

bukti empiris, dan (v) dokumentasi hasil program yang dapat diklaim sebagai bukti pendukung adanya sebab-akibat.

Namun demikian, dalam laporan ini konteks analisis evaluasi kontribusi direduksi pada mekanisme evaluasi yang lebih sederhana dan lebih ditekankan pada pendekatan berbasis kuantitatif. Juga, analisis kontribusi dikaitkan dengan aspek kewilayahan (spasial). Sehingga, pada akhirnya analisis kontribusi dapat digunakan untuk mengevaluasi secara lebih mendalam mengenai seberapa besar peran dari suatu wilayah (provinsi) dalam memberikan sumbangsih pencapaian atas suatu realisasi angka indikator ekonomi pembangunan yang telah terukur di tingkat nasional.

Secara teknis, terdapat beberapa persamaan matematis yang diformulasikan sebagai metode analisis kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Hal tersebut disesuaikan kembali dengan karakteristik dari masing-masing indikator makro pembangunan yang akan dievaluasi. Lebih jauh, tergantung pada karakteristik pengukuran indikator makro pembangunan yang akan dievaluasi, formulasi dalam metode analisis kontribusi dapat dibedakan untuk dua tujuan penggunaan.

Pertama, menggunakan formulasi untuk mengukur seberapa besar kontribusi suatu daerah (provinsi) – berdasarkan capaian realisasi angka suatu indikator makro pembangunan di daerah tersebut – terhadap kondisi eksisting atau kondisi statis angka indikator ekonomi pembangunan yang serupa di tingkat nasional pada 1 (satu) titik tahun tertentu yang diobservasi. Dalam pembahasan selanjutnya, disebut sebagai analisis kontribusi.

Kedua, menggunakan formulasi untuk mengukur seberapa besar kontribusi suatu daerah (provinsi) – berdasarkan capaian realisasi angka suatu indikator makro pembangunan di daerah tersebut – terhadap perubahan dinamis angka indikator makro pembangunan yang serupa di tingkat nasional pada 2 (dua) titik tahun berbeda yang diobservasi. Dalam pembahasan selanjutnya, disebut sebagai analisis kontribusi relatif.

Dalam ruang lingkup laporan ini, terdapat 5 (lima) indikator makro pembangunan yang telah dipilih dan ditetapkan untuk dievaluasi menggunakan metode analisis kontribusi. Kelima indikator ekonomi pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
2. Tingkat Kemiskinan (TK)
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

4. Rasio Gini (RG)
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

Berbeda dengan tiga indikator pertama yang dinyatakan dalam angka persentase, dua indikator lainnya masing-masing dinyatakan dalam angka rasio dan indeks. Khusus untuk indikator kelima, terdapat pertimbangan bahwa dalam penyusunan laporan hasil analisis evaluasi kontribusi di tahun-tahun mendatang akan beralih dari penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dan disubstitusikan dengan angka Indeks Modal Manusia (IMM) atau *Human Capital Index* (HCI) mengacu pada metodologi yang dikembangkan oleh Bank Dunia (Kraay, 2018). Meskipun demikian, tidak terdapat implikasi perbedaan metode analisis kontribusi ketika mengevaluasi kedua indeks tersebut.

2.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan EPD tahun 2024 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat dan daerah seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan akademisi. Secara umum, tahapan kegiatan EPD tahun 2024 terdiri dari (1) Persiapan pelaksanaan dan penyusunan metode, (2) Pengumpulan dan analisis data; dan (3) Pelaporan dan diseminasi kegiatan. Gambar di bawah memperlihatkan tahapan pelaksanaan EPD tahun 2024.

Gambar 2.3 Tahapan Kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2024





BAB III

Hasil Evaluasi RPJMN

“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”

BAB III HASIL EVALUASI RPJMN

3. 1. Kinerja Makro RPJMN 2020 – 2024

a. Laju pertumbuhan ekonomi

Capaian pertumbuhan ekonomi selama tahun 2019 hingga 2023 di 34 provinsi terus menunjukkan perbaikan. Capaian pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi cukup bervariasi dimana daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Perekonomian kedua daerah tersebut ditopang oleh hilirisasi industri pengolahan dan pertambangan yang masih berlangsung. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara masih didorong oleh sektor pertambangan dan pengolahan komoditas nikel yang berpusat di Kabupaten Halmahera Tengah. Kemudian, selain sektor industri pengolahan, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah juga didorong oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta konstruksi yang mengalami akselerasi.

Tabel 3. 1 Capaian dan Tren Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di 34 Provinsi Tahun 2019 - 2023 (%)

No	Provinsi	Capaian Pertumbuhan Ekonomi					No	Provinsi	Tren Kinerja Pertumbuhan Ekonomi			
		2019	2020	2021	2022	2023			2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1	ACEH	4,14	-0,37	2,79	4,21	4,23	1	ACEH	Melambat	Membaik	Stagnan	Stagnan
2	SUMATERA UTARA	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01	2	SUMATERA UTARA	Melambat	Membaik	Membaik	Stagnan
3	SUMATERA BARAT	5,01	-1,61	3,29	4,96	4,62	3	SUMATERA BARAT	Melambat	Membaik	Stagnan	Stagnan
4	RIAU	2,81	-1,13	3,36	4,55	4,21	4	RIAU	Melambat	Membaik	Stagnan	Melambat
5	JAMBI	4,35	-0,51	3,69	5,13	4,66	5	JAMBI	Melambat	Membaik	Stagnan	Melambat
6	SUMATERA SELATAN	5,69	-0,11	3,58	5,23	5,08	6	SUMATERA SELATAN	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
7	BENGKULU	4,94	-0,02	3,27	4,31	4,26	7	BENGKULU	Melambat	Membaik	Stagnan	Melambat
8	LAMPUNG	5,26	-1,66	2,77	4,28	4,55	8	LAMPUNG	Melambat	Membaik	Membaik	Stagnan
9	KEP. BANGKA BELITUNG	3,32	-2,29	5,05	4,40	4,38	9	KEP. BANGKA BELITUNG	Melambat	Membaik	Melambat	Melambat
10	KEP. RIAU	4,83	-3,80	3,43	5,09	5,20	10	KEP. RIAU	Melambat	Membaik	Membaik	Stagnan
11	DKI JAKARTA	5,82	-2,39	3,56	5,25	4,96	11	DKI JAKARTA	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
12	JAWA BARAT	5,02	-2,52	3,74	5,45	5,00	12	JAWA BARAT	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
13	JAWA TENGAH	5,36	-2,65	3,33	5,31	4,98	13	JAWA TENGAH	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
14	DI YOGYAKARTA	6,59	-2,67	5,58	5,15	5,07	14	DI YOGYAKARTA	Melambat	Membaik	Melambat	Melambat
15	JAWA TIMUR	5,53	-2,33	3,56	5,34	4,95	15	JAWA TIMUR	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
16	BANTEN	5,26	-3,39	4,49	5,03	4,81	16	BANTEN	Melambat	Membaik	Stagnan	Melambat
17	BALI	5,6	-3,34	-2,46	4,84	5,71	17	BALI	Melambat	Membaik	Membaik	Stagnan
18	NUSA TENGGARA BARAT	3,9	-0,62	2,30	6,95	1,80	18	NUSA TENGGARA BARAT	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
19	NUSA TENGGARA TIMUR	5,25	-0,84	2,52	3,05	3,52	19	NUSA TENGGARA TIMUR	Melambat	Membaik	Stagnan	Stagnan
20	KALIMANTAN BARAT	5,09	-1,82	4,80	5,07	4,46	20	KALIMANTAN BARAT	Melambat	Membaik	Stagnan	Melambat
21	KALIMANTAN TENGAH	6,12	-1,41	3,59	6,45	4,14	21	KALIMANTAN TENGAH	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
22	KALIMANTAN SELATAN	4,09	-1,82	3,48	5,11	4,84	22	KALIMANTAN SELATAN	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
23	KALIMANTAN TIMUR	4,7	-2,90	2,55	4,48	6,22	23	KALIMANTAN TIMUR	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
24	KALIMANTAN UTARA	6,89	-1,09	3,98	5,34	4,94	24	KALIMANTAN UTARA	Melambat	Membaik	Stagnan	Melambat
25	SULAWESI UTARA	5,65	-0,99	4,16	5,42	5,48	25	SULAWESI UTARA	Melambat	Membaik	Stagnan	Stagnan
26	SULAWESI TENGAH	8,83	4,86	11,70	15,17	11,91	26	SULAWESI TENGAH	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
27	SULAWESI SELATAN	6,91	-0,71	4,64	5,09	4,51	27	SULAWESI SELATAN	Melambat	Membaik	Stagnan	Melambat
28	SULAWESI TENGGARA	6,5	-0,65	4,10	5,53	5,35	28	SULAWESI TENGGARA	Melambat	Membaik	Stagnan	Melambat
29	GORONTALO	6,4	-0,02	2,41	4,04	4,50	29	GORONTALO	Melambat	Membaik	Membaik	Stagnan
30	SULAWESI BARAT	5,56	-2,34	2,57	2,30	5,25	30	SULAWESI BARAT	Melambat	Membaik	Melambat	Membaik
31	MALUKU	5,41	-0,91	3,05	5,11	5,21	31	MALUKU	Melambat	Membaik	Membaik	Stagnan
32	MALUKU UTARA	6,25	5,39	16,79	22,94	20,49	32	MALUKU UTARA	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
33	PAPUA BARAT	2,66	-0,76	-0,51	2,01	3,91	33	PAPUA BARAT	Melambat	Stagnan	Membaik	Membaik
34	PAPUA	-18,74	2,39	15,16	8,97	5,22	34	PAPUA	Membaik	Membaik	Melambat	Melambat

Keterangan warna pada **heatmap** merupakan perbandingan relatif antar daerah

Keterangan Capaian Indikator Makro 2019-2023:

Sangat Kurang Sangat Baik

Keterangan Tren Kinerja Indikator Makro 2019-2023:

■ : Tren Kinerja Membaik (tren >= 15%)
■ : Tren Kinerja Stagnan (0 < tren < 15%)
■ : Tren Kinerja Melambat (< 0%)

Sumber Data: BPS, (diolah)

Capaian Provinsi Papua Selatan masih tergabung dalam Provinsi Papua Induk

Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2023. Beberapa hal yang menghambat capaian pertumbuhan ekonomi NTB antara lain (1) sektor pertanian yang merupakan sektor basis dan sektor dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian NTB mengalami perlambatan; (2) adanya pembatasan perizinan ekspor pertambangan bijih logam; (3) belum optimalnya transformasi ekonomi terutama pada sektor terkait kepariwisataan dan industri pengolahan; dan (4) produktivitas sektor industri olahan belum memberikan dampak yang signifikan pada serapan tenaga kerja.

Secara umum, tren kinerja pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi cenderung membaik selama lima tahun terakhir walaupun sempat melambat dan stagnan pada periode 2022-2023. Untuk itu, direkomendasikan adanya kebijakan untuk meningkatkan capaian pertumbuhan ekonomi di daerah antara lain: (1) optimalisasi hilirisasi produk unggulan daerah; (2) mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan; (3) peningkatan diversifikasi ekonomi daerah; (4) mitigasi ancaman perubahan iklim; (5) pemerataan ketersediaan layanan infrastruktur serta aksesibilitas-konektivitas wilayah; dan (6) pengendalian inflasi.

Provinsi Papua (termasuk capaian Papua Selatan) menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang cukup fluktuatif selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, ekonomi Provinsi Papua mengalami kontraksi yang cukup dalam dengan tingkat pertumbuhan negatif sebesar -15,74 persen. Kontraksi ini terutama disebabkan oleh penurunan produksi sektor pertambangan, yang merupakan kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua. Salah satu penyebab utama penurunan ini adalah berkurangnya aktivitas produksi tembaga dan emas di tambang *Grasberg*, yang menjadi bagian dari wilayah operasional PT Freeport Indonesia. Pada periode tersebut, tambang *Grasberg* berada pada masa transisi dari penambangan terbuka (*open-pit mining*) menuju metode penambangan bawah tanah (*underground mining*). Proses transisi ini membutuhkan waktu dan investasi yang besar sehingga menurunkan kapasitas produksi tambang secara signifikan. Penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor fluktuasi harga komoditas global, khususnya untuk komoditas emas dan tembaga.

Pada tahun 2020, ekonomi Provinsi Papua mulai menunjukkan adanya peningkatan dan pertumbuhan positif sebesar 2,39 persen. Kendati tumbuh positif, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada tahun 2020 belum optimal akibat adanya tekanan pandemi Covid-19. Pertumbuhan positif tersebut juga menjadikan Provinsi Papua menjadi salah satu dari tiga provinsi yang tumbuh positif di tengah pandemi

Covid-19. Keberlanjutan operasi sektor pertambangan, meski dengan kapasitas terbatas masih menjadi salah satu penopang utama dari pertumbuhan positif pada tahun 2020. Selain itu, sektor pertanian dan kehutanan turut memberikan kontribusi yang signifikan, terutama dalam menjaga ketahanan ekonomi lokal.

Sementara pada tahun 2021 menjadi momen perbaikan yang cukup signifikan bagi Provinsi Papua. Dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tumbuh sebesar 15,16 persen dan menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Provinsi Maluku Utara. Capaian tersebut juga cukup fenomenal mengingat di tengah kondisi pemulihan pasca pandemi yang terjadi. Pertumbuhan ini salah satunya didorong oleh pemulihan produksi sektor pertambangan yang ditopang oleh kenaikan harga komoditas global, terutama emas dan tembaga. Selain itu, mulai adanya kebijakan terkait pelonggaran pembatasan aktivitas ekonomi turut memberikan pertumbuhan bagi sektor lain, seperti perdagangan dan konstruksi. Pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan, khususnya proyek jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, juga berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Papua cenderung melambat menjadi 8,97 persen. Meskipun masih dalam tren positif, perlambatan ini mencerminkan adanya stabilisasi dari produksi sektor pertambangan setelah pertumbuhan signifikan pada tahun sebelumnya. Program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat dan pemberdayaan ekonomi lokal, turut membantu dalam mempertahankan momentum pertumbuhan.

Sementara pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Papua kembali tumbuh positif, meski melambat menjadi 5,22 persen. Perlambatan ini sebagian besar dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global dan tekanan inflasi, yang berdampak pada sektor pertambangan. Sementara itu, sektor non-tambang, seperti pertanian dan kehutanan, terus menjadi penopang utama dalam stabilisasi ekonomi daerah. Adapun Provinsi Papua masih dihadapi oleh berbagai tantangan khususnya yang bersifat struktural, seperti keterbatasan infrastruktur dan konektivitas antardaerah. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah pusat dan daerah terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur, memperkuat program Dana Otonomi Khusus Papua, serta mengembangkan strategi pembangunan berbasis wilayah adat. Secara keseluruhan, dinamika pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua selama lima tahun terakhir mencerminkan masih tingginya ketergantungan pada sektor pertambangan sebagai penggerak utama.

penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, perlu adanya intervensi yang lebih untuk penanganan kemiskinan di ketiga daerah tersebut.

Untuk itu, direkomendasikan adanya kebijakan untuk pemanfaatan satu data terpadu kemiskinan yaitu Regsosek, penyaluran bantuan sosial dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dan lebih tepat sasaran, pemanfaatan dana desa untuk penurunan kemiskinan, dan pemenuhan sarana dan prasarana dasar seperti rumah layak huni, sanitasi layak, air bersih, dan air minum bagi masyarakat kurang mampu.

Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan), yang secara geografis terletak di wilayah paling timur Indonesia, memiliki tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia selama periode 2019 hingga 2023. Pada Maret 2019, tingkat kemiskinan di Papua tercatat sebesar 27,53 persen. Persentase yang tinggi ini sebagian besar dipengaruhi oleh tantangan geografis dan infrastruktur yang terbatas, yang menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan. Ketergantungan masyarakat Papua pada sektor pertanian subsisten juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.

Pada Maret 2020, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua mengalami penurunan tipis menjadi 26,64 persen. Meskipun terdapat dampak pandemi Covid-19, Provinsi Papua relatif terlindungi pada tahap awal pandemi karena minimnya konektivitas yang menjadi penghambat dari penyebaran virus secara masif. Penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program sembako, turut membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Namun, sektor ekonomi informal yang cukup besar di Papua, seperti perdagangan kecil dan hasil bumi, mulai merasakan dari adanya dampak negatif dari pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi selama pandemi Covid-19.

Pada Maret 2021, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua meningkat sedikit menjadi 26,86 persen. Kenaikan ini mencerminkan dampak berkepanjangan pandemi Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat. Gangguan pada rantai pasok, terbatasnya akses pasar bagi produk lokal, serta terbatasnya aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, bantuan sosial yang disalurkan sering kali tidak tepat sasaran karena tantangan geografis dan kurangnya data yang valid mengenai penerima manfaat di wilayah terpencil Papua.

Pada Maret 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua menurun kembali menjadi 26,56 persen. Penurunan ini sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat. Peningkatan alokasi Dana Otonomi Khusus Papua serta pelaksanaan berbagai program infrastruktur, seperti

pembangunan jalan Trans Papua, memberikan dampak positif terhadap konektivitas dan aktivitas ekonomi di beberapa wilayah. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat adat dan pelatihan keterampilan mulai diperkenalkan untuk membantu masyarakat meningkatkan pendapatan melalui sektor produktif.

Pada Maret 2023, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua kembali menurun menjadi 26,03 persen. Meskipun menunjukkan adanya perbaikan, namun masih tergolong lambat. Faktor pendorong utama penurunan ini tidak terlepas dari intervensi seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan melalui program Dana Otonomi Khusus, serta perbaikan infrastruktur dasar di wilayah terpencil. Namun, tantangan struktural, seperti rendahnya tingkat pendidikan, tingginya ketergantungan pada bantuan pemerintah, serta keterbatasan akses ke pasar bagi hasil bumi dan komoditas lokal, ekonomi yang bersifat subsisten masih menjadi hambatan utama untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan di Provinsi Papua.

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Papua selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang lambat namun konsisten. Upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur, memperkuat konektivitas, dan memberdayakan masyarakat adat menjadi langkah penting dalam mengatasi kemiskinan. Ke depan, penguatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan, serta optimalisasi potensi sumber daya alam di Provinsi Papua dengan pendekatan yang inklusif diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan.

c. Rasio Gini

Capaian rasio gini di 34 Provinsi cukup bervariasi antardaerah namun memiliki kecenderungan membaik. Provinsi Kep. Bangka Belitung memiliki rasio gini terendah sementara Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Barat merupakan daerah dengan rasio gini tertinggi. Rasio gini Provinsi DI Yogyakarta menunjukkan tren meningkat. Berdasarkan lokasinya, rasio gini perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Faktor penghambat penurunan capaian rasio gini di Provinsi DI Yogyakarta dimana sebagian besar penduduk bekerja pada sektor informal dengan pendapatan yang relatif lebih rendah dibanding pekerja sektor formal, dan masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat perkotaan dibandingkan masyarakat pedesaan. Selain itu, adanya penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta tidak diiringi dengan turunnya kesenjangan antarkelompok pendapatan. Untuk itu, direkomendasikan adanya kebijakan untuk peningkatan pendapatan dan

pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan kualitas, akses, dan kuantitas infrastruktur dasar, pembangunan dan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis endowment melalui peningkatan konektivitas antarwilayah.

Tabel 3. 3 Capaian dan Tren Kinerja Rasio Gini di 34 Provinsi Tahun 2019 - 2023 (Nilai)

NO	PROVINSI	CAPAIAN RASIO GINI					NO	PROVINSI	TREN KINERJA RASIO GINI			
		2019	2020	2021	2022	2023			2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1	ACEH	0,319	0,323	0,324	0,311	0,296	1	ACEH	Melambat	Melambat	Membaik	Membaik
2	SUMATERA UTARA	0,317	0,316	0,314	0,312	0,309	2	SUMATERA UTARA	Stagnan	Stagnan	Stagnan	Stagnan
3	SUMATERA BARAT	0,306	0,305	0,306	0,300	0,280	3	SUMATERA BARAT	Stagnan	Melambat	Membaik	Membaik
4	RIAU	0,334	0,329	0,326	0,326	0,324	4	RIAU	Stagnan	Stagnan	Melambat	Stagnan
5	JAMBI	0,321	0,320	0,321	0,320	0,343	5	JAMBI	Stagnan	Melambat	Stagnan	Melambat
6	SUMATERA SELATAN	0,331	0,339	0,341	0,339	0,338	6	SUMATERA SELATAN	Melambat	Melambat	Stagnan	Stagnan
7	BENGKULU	0,340	0,334	0,326	0,315	0,333	7	BENGKULU	Membaik	Membaik	Membaik	Melambat
8	LAMPUNG	0,329	0,327	0,323	0,314	0,324	8	LAMPUNG	Stagnan	Stagnan	Membaik	Melambat
9	KEP. BANGKA BELITUNG	0,269	0,262	0,256	0,236	0,245	9	KEP. BANGKA BELITUNG	Membaik	Membaik	Membaik	Melambat
10	KEP. RIAU	0,341	0,339	0,343	0,342	0,340	10	KEP. RIAU	Melambat	Melambat	Stagnan	Stagnan
11	DKI JAKARTA	0,394	0,399	0,409	0,423	0,431	11	DKI JAKARTA	Melambat	Melambat	Melambat	Melambat
12	JAWA BARAT	0,402	0,403	0,412	0,417	0,425	12	JAWA BARAT	Melambat	Melambat	Melambat	Melambat
13	JAWA TENGAH	0,361	0,362	0,372	0,374	0,369	13	JAWA TENGAH	Melambat	Melambat	Melambat	Stagnan
14	DI YOGYAKARTA	0,423	0,434	0,441	0,439	0,449	14	DI YOGYAKARTA	Melambat	Melambat	Stagnan	Melambat
15	JAWA TIMUR	0,370	0,366	0,374	0,371	0,387	15	JAWA TIMUR	Stagnan	Melambat	Stagnan	Melambat
16	BANTEN	0,365	0,363	0,365	0,363	0,368	16	BANTEN	Stagnan	Melambat	Stagnan	Melambat
17	BALI	0,366	0,369	0,378	0,363	0,362	17	BALI	Melambat	Melambat	Membaik	Stagnan
18	NUSA TENGGARA BARAT	0,379	0,376	0,381	0,373	0,375	18	NUSA TENGGARA BARAT	Stagnan	Melambat	Membaik	Melambat
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0,356	0,354	0,346	0,334	0,325	19	NUSA TENGGARA TIMUR	Stagnan	Membaik	Membaik	Membaik
20	KALIMANTAN BARAT	0,327	0,317	0,313	0,314	0,321	20	KALIMANTAN BARAT	Membaik	Stagnan	Melambat	Melambat
21	KALIMANTAN TENGAH	0,336	0,329	0,323	0,319	0,317	21	KALIMANTAN TENGAH	Membaik	Membaik	Stagnan	Stagnan
22	KALIMANTAN SELATAN	0,334	0,332	0,330	0,317	0,313	22	KALIMANTAN SELATAN	Stagnan	Stagnan	Membaik	Stagnan
23	KALIMANTAN TIMUR	0,330	0,328	0,334	0,327	0,322	23	KALIMANTAN TIMUR	Stagnan	Melambat	Membaik	Membaik
24	KALIMANTAN UTARA	0,295	0,292	0,292	0,272	0,277	24	KALIMANTAN UTARA	Stagnan	Melambat	Membaik	Melambat
25	SULAWESI UTARA	0,367	0,370	0,365	0,365	0,370	25	SULAWESI UTARA	Melambat	Stagnan	Melambat	Melambat
26	SULAWESI TENGAH	0,327	0,326	0,316	0,308	0,304	26	SULAWESI TENGAH	Stagnan	Membaik	Membaik	Stagnan
27	SULAWESI SELATAN	0,389	0,389	0,382	0,377	0,377	27	SULAWESI SELATAN	Melambat	Membaik	Stagnan	Melambat
28	SULAWESI TENGGARA	0,399	0,389	0,390	0,387	0,371	28	SULAWESI TENGGARA	Membaik	Melambat	Stagnan	Membaik
29	GORONTALO	0,407	0,408	0,408	0,418	0,417	29	GORONTALO	Melambat	Melambat	Melambat	Stagnan
30	SULAWESI BARAT	0,365	0,364	0,356	0,362	0,351	30	SULAWESI BARAT	Stagnan	Membaik	Membaik	Membaik
31	MALUKU	0,324	0,318	0,314	0,301	0,288	31	MALUKU	Membaik	Stagnan	Membaik	Membaik
32	MALUKU UTARA	0,312	0,308	0,300	0,279	0,300	32	MALUKU UTARA	Stagnan	Membaik	Membaik	Membaik
33	PAPUA BARAT	0,386	0,382	0,380	0,370	0,370	33	PAPUA BARAT	Stagnan	Stagnan	Membaik	Melambat
34	PAPUA	0,394	0,392	0,397	0,406	0,386	34	PAPUA	Stagnan	Melambat	Melambat	Membaik

Keterangan warna pada **heatmap** merupakan **perbandingan relatif antar daerah**

Keterangan Capaian Indikator Makro 2019-2023:

 Sangat Kurang (red) to Sangat Baik (green)

Keterangan Tren Kinerja Indikator Makro 2019-2023:
 ■ : Tren Kinerja Membaik (tren >=15%)
 ■ : Tren Kinerja Stagnan (0<tren<15%)
 ■ : Tren Kinerja Melambat (<0%)

Sumber Data: BPS, (diolah)

Capaian Provinsi Papua Selatan masih tergabung dalam Provinsi Papua Induk

Capaian rasio gini di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) menunjukkan adanya dinamika sepanjang periode 2019 hingga 2023, dengan tren fluktuasi yang cukup signifikan. Stabilitas harga barang di Provinsi Papua juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian rasio gini di Provinsi Papua selama periode 2019 hingga 2023. Sebagai salah satu daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi pada transportasi udara dan laut untuk distribusi barang, Provinsi Papua menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas harga, terutama untuk kebutuhan pokok

Pada tahun 2019, rasio gini tercatat sebesar 0,394. Capaian Provinsi Papua mencerminkan ketimpangan yang berada pada kategori sedang. Stabilitas ekonomi

pada Provinsi Papua berkontribusi pada tingkat ketimpangan yang tidak terlalu tinggi, kendati masih adanya tantangan terkait pemerataan ekonomi yang tetap menjadi isu utama di wilayah dengan infrastruktur yang masih berkembang seperti Papua. Pada tahun 2019, meskipun terdapat tantangan logistik di Provinsi Papua, harga kebutuhan pokok relatif stabil. Hal ini didukung oleh berbagai subsidi transportasi dan upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan barang salah satunya melalui program tol laut.

Pada tahun 2020, rasio gini Provinsi Papua menunjukkan adanya penurunan menjadi 0,392. Pada tahun 2021, rasio gini Provinsi Papua meningkat menjadi 0,397. Kendati pemerintah telah menyalurkan berbagai bentuk program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun Provinsi Papua masih dihadapi oleh tantangan logistik, aksesibilitas, dan keterbatasan akurasi dari data penerima membuat pelaksanaan dan penyaluran berbagai program tersebut kurang efektif dan merata. Sebagian besar wilayah pedalaman Papua masih sulit dijangkau, sehingga masyarakat di daerah tidak mendapatkan manfaat optimal dari program tersebut. Selain itu, ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur antara daerah perkotaan seperti Jayapura dan daerah pedalaman lain di Provinsi Papua juga memperparah ketimpangan ekonomi.

Pada tahun 2022, rasio gini Provinsi Papua meningkat signifikan hingga 0,406. Peningkatan ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan yang lebih dalam antara kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan tinggi di Provinsi Papua. Hal ini juga menjadi indikasi pemulihan ekonomi pasca-pandemi lebih banyak dirasakan oleh kelompok yang bergerak di sektor formal dan perkotaan, sementara masyarakat yang tinggal di daerah terpencil masih bergulat dengan tantangan ekonomi dan sosial. Selain itu, sektor-sektor seperti pertambangan yang mendominasi perekonomian Papua cenderung memberikan manfaat yang lebih besar kepada perusahaan besar dan pekerja berketerampilan tinggi dibandingkan masyarakat lokal di sekitar wilayah tambang.

Kendati pada beberapa tahun sebelumnya menunjukkan adanya tren peningkatan, namun pada tahun 2023, rasio gini Provinsi Papua kembali menurun secara signifikan menjadi 0,386. Penurunan ini mengindikasikan upaya atau intervensi yang dilakukan telah menunjukkan adanya keberhasilan dalam menekan ketimpangan pengeluaran yang ada. Program-program pemberdayaan ekonomi lokal yang melibatkan masyarakat adat, seperti pengelolaan hasil hutan dan perikanan, mulai memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat pedesaan. Selain itu,

peningkatan akses infrastruktur di beberapa wilayah juga berkontribusi pada penurunan ketimpangan.

Kondisi ketimpangan di Provinsi Papua sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, dan struktur ekonomi yang belum merata. Percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor ekonomi lokal, serta peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan menjadi penting untuk dioptimalkan dalam rangka menekan angka ketimpangan pengeluaran secara berkelanjutan.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara umum, capaian TPT di 34 Provinsi selama lima tahun terakhir terus membaik. Provinsi Sulawesi Barat, Papua, dan Bali merupakan daerah dengan TPT terendah sedangkan Provinsi Banten, Jawa Barat, Kep. Riau memiliki TPT tertinggi. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Barat membaik seiring dengan aktivitas ekonomi yang senantiasa membaik, ditambah dengan kemampuan akselerasi penyerapan penduduk angkatan kerja di lapangan pekerjaan di wilayah Sulawesi Barat. Hal ini sejalan dengan peningkatan tenaga kerja formal.

Tabel 3. 4 Capaian dan Tren Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka di 34 Provinsi Tahun 2019 - 2023 (%)

No	Provinsi	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	ACEH	6,17	6,59	6,30	6,17	6,03
2	SUMATERA UTARA	5,39	6,91	6,33	6,16	5,89
3	SUMATERA BARAT	5,38	6,88	6,52	6,28	5,94
4	RIAU	5,76	6,32	4,42	4,37	4,23
5	JAMBI	4,06	5,13	5,09	4,59	4,53
6	SUMATERA SELATAN	4,53	5,51	4,98	4,63	4,11
7	BENGKULU	3,26	4,07	3,65	3,59	3,42
8	LAMPUNG	4,03	4,67	4,69	4,52	4,23
9	KEP. BANGKA BELITUNG	3,58	5,25	5,03	4,77	4,56
10	KEP. RIAU	7,5	10,34	9,91	8,23	6,80
11	DKI JAKARTA	6,54	10,95	8,50	7,18	6,53
12	JAWA BARAT	8,04	10,45	9,82	8,31	7,44
13	JAWA TENGAH	4,44	6,48	5,95	5,57	5,13
14	DI YOGYAKARTA	3,18	4,57	4,56	4,06	3,69
15	JAWA TIMUR	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88
16	BANTEN	8,11	10,64	8,98	8,09	7,52
17	BALI	1,57	5,63	5,37	4,80	2,69
18	NUSA TENGGARA BARAT	3,28	4,22	3,01	2,89	2,80
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3,14	4,28	3,77	3,54	3,14
20	KALIMANTAN BARAT	4,35	5,81	5,82	5,11	5,05
21	KALIMANTAN TENGAH	4,04	4,58	4,53	4,26	4,10
22	KALIMANTAN SELATAN	4,18	4,74	4,95	4,74	4,31
23	KALIMANTAN TIMUR	5,94	6,87	6,83	5,71	5,31
24	KALIMANTAN UTARA	4,49	4,97	4,58	4,33	4,01
25	SULAWESI UTARA	6,01	7,37	7,06	6,61	6,10
26	SULAWESI TENGAH	3,11	3,77	3,75	3,00	2,95
27	SULAWESI SELATAN	4,62	6,31	5,72	4,51	4,33
28	SULAWESI TENGGARA	3,52	4,58	3,92	3,36	3,15
29	GORONTALO	3,76	4,28	3,01	2,58	3,06
30	SULAWESI BARAT	2,98	3,32	3,13	2,34	2,27
31	MALUKU	6,69	7,57	6,93	6,88	6,31
32	MALUKU UTARA	4,81	5,15	4,71	3,98	4,31
33	PAPUA BARAT	6,43	6,80	5,84	5,37	5,38
34	PAPUA	3,51	4,28	3,33	2,83	2,67

No	Provinsi	Tren Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka			
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1	ACEH	Melambat	Membaik	Stagnan	Stagnan
2	SUMATERA UTARA	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
3	SUMATERA BARAT	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
4	RIAU	Melambat	Membaik	Stagnan	Stagnan
5	JAMBI	Melambat	Stagnan	Membaik	Stagnan
6	SUMATERA SELATAN	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
7	BENGKULU	Melambat	Membaik	Stagnan	Membaik
8	LAMPUNG	Melambat	Melambat	Membaik	Membaik
9	KEP. BANGKA BELITUNG	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
10	KEP. RIAU	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
11	DKI JAKARTA	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
12	JAWA BARAT	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
13	JAWA TENGAH	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
14	DI YOGYAKARTA	Melambat	Stagnan	Membaik	Membaik
15	JAWA TIMUR	Melambat	Stagnan	Membaik	Membaik
16	BANTEN	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
17	BALI	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
18	NUSA TENGGARA BARAT	Melambat	Membaik	Stagnan	Stagnan
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
20	KALIMANTAN BARAT	Melambat	Melambat	Membaik	Stagnan
21	KALIMANTAN TENGAH	Melambat	Stagnan	Membaik	Membaik
22	KALIMANTAN SELATAN	Melambat	Melambat	Membaik	Membaik
23	KALIMANTAN TIMUR	Melambat	Stagnan	Membaik	Membaik
24	KALIMANTAN UTARA	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
25	SULAWESI UTARA	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
26	SULAWESI TENGAH	Melambat	Stagnan	Membaik	Stagnan
27	SULAWESI SELATAN	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
28	SULAWESI TENGGARA	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
29	GORONTALO	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
30	SULAWESI BARAT	Melambat	Membaik	Membaik	Stagnan
31	MALUKU	Melambat	Membaik	Stagnan	Membaik
32	MALUKU UTARA	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
33	PAPUA BARAT	Melambat	Membaik	Membaik	Melambat
34	PAPUA	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik

Keterangan warna pada heatmap merupakan perbandingan relatif antar daerah

Keterangan Capaian Indikator Makro 2019-2023:
 Sangat Kurang (red) to Sangat Baik (green)

Keterangan Tren Kinerja Indikator Makro 2019-2023:
 : Tren Kinerja Membaik (tren >= 15%)
 : Tren Kinerja Stagnan (0 < tren < 15%)
 : Tren Kinerja Melambat (< 0%)

Sumber Data: BPS, (diolah)

Capaian Provinsi Papua Selatan masih tergabung dalam Provinsi Papua Induk

Walaupun Provinsi Banten merupakan daerah dengan TPT tertinggi, namun kinerjanya terus membaik. Masih tingginya TPT di Provinsi Banten menjadi tantangan tersendiri, melihat potensi risiko perpindahan industri ke provinsi lain dikarenakan Upah Minimum Regional yang lebih rendah. Kemudian, tiga sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Banten yaitu perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Tantangan lainnya di Provinsi Banten adalah bagaimana menciptakan tenaga kerja yang berkualitas yang dapat terserap di industri pengolahan yang padat modal dan teknologi.

Secara umum, tren kinerja TPT selama lima tahun terakhir terus membaik walaupun sempat melambat ketika pandemi COVID-19 tahun 2020. Untuk itu, direkomendasikan adanya kebijakan untuk penurunan TPT di daerah antara lain: (1) penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan untuk mendukung industri kreatif dan ekonomi lokal; (2) penguatan kebijakan link and match dunia pendidikan dan dunia industri/dunia usaha berbasis sumber daya lokal; dan (3) peningkatan produktivitas serta *up-skilling* dan *re-skilling* tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua (termasuk Provinsi Papua Selatan) menunjukkan tren perbaikan yang signifikan selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, TPT di Provinsi Papua tercatat sebesar 3,51 persen. Capaian ini mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang cukup stabil, didukung oleh sektor informal seperti pertanian, perikanan, dan aktivitas berbasis komoditas lokal yang menjadi penopang utama perekonomian masyarakat Papua, terutama di wilayah pedesaan. Namun demikian, tantangan geografis, kualitas SDM, dan keterbatasan infrastruktur tetap menjadi hambatan dalam penciptaan lapangan kerja di sektor formal yang berkualitas.

Pada tahun 2020, TPT meningkat tajam menjadi 4,28 persen yang diakibatkan dari adanya dampak pandemi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Papua. Pandemi tersebut mengakibatkan perlambatan ekonomi, terutama di sektor informal dan jasa, yang banyak menyerap tenaga kerja. Penutupan akses transportasi dan pembatasan sosial berskala besar turut memperburuk kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Papua yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau menghadapi pengurangan pendapatan.

Namun, pada tahun 2021, TPT di Papua kembali menurun menjadi 3,33 persen seiring dengan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Program-program pemulihan ekonomi seperti bantuan langsung tunai (BLT), program padat karya, dan dukungan terhadap UMKM mulai memberikan dampak positif dalam

menciptakan peluang kerja. Sektor pertanian dan perikanan yang relatif tahan terhadap guncangan ekonomi akibat pandemi turut menjadi penopang utama pemulihan ketenagakerjaan di wilayah Papua.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, capaian IPM di 34 Provinsi cukup bervariasi antardaerah. Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kep. Riau merupakan daerah dengan capaian IPM tertinggi. Sedangkan yang terendah berada pada Provinsi Papua Barat dan Papua. Faktor pendukung capaian IPM di Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kep. Riau didorong oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang aksesibel dan berkualitas, kesadaran masyarakat untuk ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), kualitas layanan pendidikan yang menjangkau mayoritas penduduk serta dukungan akses infrastruktur dan program-program pemberdayaan masyarakat.

Secara umum, tren kinerja indikator IPM di 34 Provinsi terus membaik selama lima tahun terakhir. Sementara itu, capaian IPM di Provinsi Papua Barat dan Papua masih perlu dioptimalkan. Beberapa faktor utama yang menghambat pencapaian IPM di kedua daerah tersebut antara lain: masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, tingkat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum sesuai dengan SPM, penyebaran tenaga pendidik dan kesehatan yang belum merata, pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang belum optimal dan tidak memperhatikan lokasi yang jauh dari masyarakat. Direkomendasikan kebijakan ke depan perlu adanya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di daerah terutama yang masih kurang optimal antara lain: (1) pemerataan kualitas, kuantitas, serta distribusi tenaga pendidik dan kesehatan; (2) peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; (3) penyediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata; dan (4) peningkatan produktivitas SDM.

Tabel 3. 5 Capaian dan Tren Kinerja Indeks Pembangunan Manusia di 34 Provinsi Tahun 2019 - 2023 (Nilai)

No	Provinsi	Capaian Indeks Pembangunan Manusia					No	Provinsi	Tren Kinerja Indeks Pembangunan Manusia			
		2019	2020	2021	2022	2023			2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1	ACEH	71,9	73,29	73,48	74,11	74,70	1	ACEH	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
2	SUMATERA UTARA	71,74	73,62	73,84	74,51	75,13	2	SUMATERA UTARA	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
3	SUMATERA BARAT	72,39	74,29	74,56	75,16	75,64	3	SUMATERA BARAT	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
4	RIAU	73	73,67	73,89	74,45	74,95	4	RIAU	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
5	JAMBI	71,26	72,29	72,62	73,11	73,73	5	JAMBI	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
6	SUMATERA SELATAN	70,02	71,62	71,83	72,48	73,18	6	SUMATERA SELATAN	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
7	BENGKULU	71,21	72,93	73,16	73,68	74,30	7	BENGKULU	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
8	LAMPUNG	69,57	71,04	71,25	71,79	72,48	8	LAMPUNG	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
9	KEP. BANGKA BELITUNG	71,3	72,74	72,96	73,50	74,09	9	KEP. BANGKA BELITUNG	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
10	KEP. RIAU	75,48	77,69	77,87	78,48	79,08	10	KEP. RIAU	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
11	DKI JAKARTA	80,76	81,92	82,25	82,77	83,55	11	DKI JAKARTA	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
12	JAWA BARAT	72,03	72,61	72,96	73,63	74,24	12	JAWA BARAT	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
13	JAWA TENGAH	71,73	71,88	72,17	72,80	73,39	13	JAWA TENGAH	Stagnan	Membaik	Membaik	Membaik
14	DI YOGYAKARTA	79,99	79,95	80,22	80,65	81,09	14	DI YOGYAKARTA	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
15	JAWA TIMUR	71,5	73,04	73,48	74,05	74,65	15	JAWA TIMUR	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
16	BANTEN	72,44	74,41	74,68	75,25	75,77	16	BANTEN	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
17	BALI	75,38	76,52	76,69	77,40	78,01	17	BALI	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
18	NUSA TENGGARA BARAT	68,14	70,46	70,86	71,65	72,37	18	NUSA TENGGARA BARAT	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
19	NUSA TENGGARA TIMUR	65,23	66,93	67,02	67,63	68,40	19	NUSA TENGGARA TIMUR	Membaik	Stagnan	Membaik	Membaik
20	KALIMANTAN BARAT	67,65	68,76	68,99	69,71	70,47	20	KALIMANTAN BARAT	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
21	KALIMANTAN TENGAH	70,91	72,62	72,81	73,17	73,73	21	KALIMANTAN TENGAH	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
22	KALIMANTAN SELATAN	70,72	73,09	73,45	74,00	74,66	22	KALIMANTAN SELATAN	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
23	KALIMANTAN TIMUR	76,61	75,94	76,80	77,36	78,20	23	KALIMANTAN TIMUR	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
24	KALIMANTAN UTARA	71,15	71,00	71,57	72,21	72,88	24	KALIMANTAN UTARA	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
25	SULAWESI UTARA	72,99	73,67	74,03	74,52	75,04	25	SULAWESI UTARA	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
26	SULAWESI TENGAH	69,5	70,31	70,54	71,01	71,66	26	SULAWESI TENGAH	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
27	SULAWESI SELATAN	71,66	73,08	73,38	73,96	74,60	27	SULAWESI SELATAN	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
28	SULAWESI TENGGARA	71,2	71,61	71,82	72,38	72,94	28	SULAWESI TENGGARA	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
29	GORONTALO	68,49	69,51	69,82	70,62	71,25	29	GORONTALO	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
30	SULAWESI BARAT	65,73	68,40	68,64	69,19	69,80	30	SULAWESI BARAT	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
31	MALUKU	69,45	71,34	71,55	72,04	72,75	31	MALUKU	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
32	MALUKU UTARA	68,7	69,30	69,56	70,26	70,98	32	MALUKU UTARA	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
33	PAPUA BARAT	64,7	65,94	66,11	66,72	67,47	33	PAPUA BARAT	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
34	PAPUA	60,84	61,22	61,40	62,16	63,01	34	PAPUA	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik

Keterangan warna pada heatmap merupakan perbandingan relatif antar daerah

Keterangan Capaian Indikator Makro 2019-2023:
 Sangat Kurang (red) to Sangat Baik (green)

Keterangan Tren Kinerja Indikator Makro 2019-2023:
 : Tren Kinerja Membaik (tren > = 15%)
 : Tren Kinerja Stagnan (0 < tren < 15%)
 : Tren Kinerja Melambat (<0%)

Sumber Data: BPS, (diolah)

Capaian Provinsi Papua Selatan masih tergabung dalam Provinsi Papua Induk

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua (termasuk capaian Provinsi Papua Selatan) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2019 hingga 2023. IPM Papua meningkat dari 60,84 pada tahun 2019 menjadi 63,01 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Provinsi Papua, meskipun capaian tersebut masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada tahun 2019, IPM Papua tercatat sebesar 60,84. Capaian ini mencerminkan masih adanya tantangan besar dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, terutama di wilayah pedalaman yang sulit diakses. Faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. Meski demikian, program pemerintah seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan bantuan pendidikan mulai memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Pada tahun 2020, IPM Papua meningkat menjadi 61,22 meskipun pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan

upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan peningkatan layanan dasar, termasuk melalui program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi pendidikan. Di sektor kesehatan, program imunisasi dan intervensi kesehatan ibu dan anak terus berlanjut, meski menghadapi tantangan terkait akses ke wilayah terpencil selama pandemi.

Pada tahun 2021, IPM Papua kembali meningkat menjadi 61,4. Pemulihan bertahap dari adanya dampak pandemi COVID-19, tidak terlepas dari dukungan berbagai program pemerintah seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program pelatihan vokasional untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja juga mulai memberikan dampak, terutama di wilayah perkotaan seperti Jayapura. Pada tahun 2022, IPM Papua naik signifikan menjadi 62,16. Percepatan pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah pedalaman, termasuk pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, menjadi salah satu pendorong utama peningkatan ini. Selain itu, program pengurangan stunting yang dilaksanakan pemerintah, seperti pemberian makanan tambahan untuk anak-anak dan ibu hamil, mulai menunjukkan hasil yang positif. Di sektor pendidikan, program beasiswa dan bantuan operasional sekolah turut membantu meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Pada tahun 2023, IPM Provinsi Papua mencapai angka tertinggi selama periode 5 tahun terakhir, yaitu 63,01. Capaian ini mencerminkan adanya keberhasilan dari implementasi berbagai program strategis yang fokus pada pengurangan ketimpangan akses layanan dasar antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Peningkatan angka harapan hidup yang didorong oleh program kesehatan berbasis masyarakat, serta peningkatan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah-sekolah baru di wilayah terpencil, turut mendukung capaian IPM di Provinsi Papua. Selain itu, pengembangan potensi lokal melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas juga memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pada indikator pengeluaran per kapita.

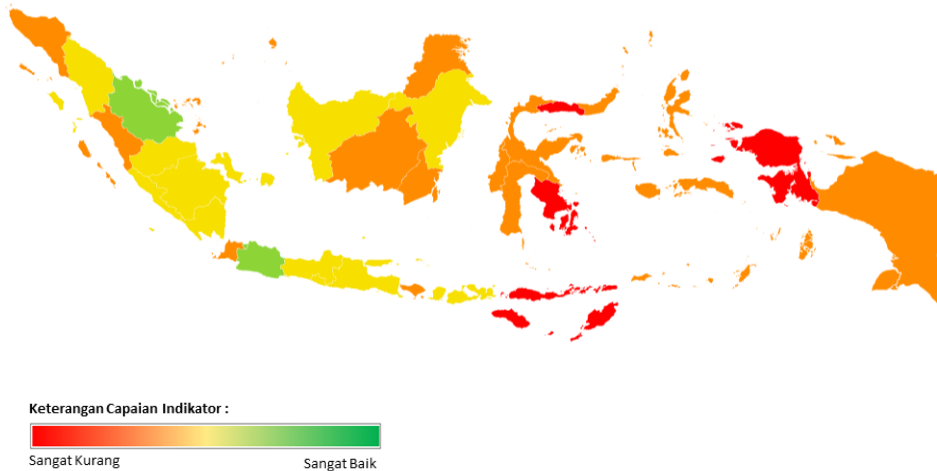
3. 2. Kinerja Prioritas Nasional di Daerah Tahun 2020-2024

a. Potret capaian indikator AP 1

Agenda Pembangunan (AP) 1 dalam RPJMN 2020 - 2024 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun AP 1 antara lain: (1) Pola

Pangan Harapan; (2) Nilai Tukar Petani; (3) Nilai Tukar Nelayan; dan (4) Realisasi PMA & PMDN.

Gambar 3. 1 Capaian Agenda Pembangunan 1 di 34 Provinsi



Potret capaian Prioritas Nasional (PN) 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan) di 34 provinsi menunjukkan hasil yang bervariasi. Secara umum, hasil capaian kinerja menunjukkan rata-rata kinerja daerah masih kurang optimal. Untuk daerah dengan capaian kurang optimal mayoritas berada di wilayah Timur, sedangkan kinerja yang lebih baik dicapai oleh daerah-daerah yang berada di wilayah Barat. Jika melihat dengan lebih mendalam, daerah yang memiliki kinerja tertinggi dicapai oleh Provinsi Riau, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Di sisi lain, daerah dengan capaian yang masih sangat kurang adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Papua Barat. Kurang optimalnya kinerja ketiga provinsi tersebut utamanya dihambat oleh capaian Pola Pangan Harapan dan Nilai Realisasi PMA dan PMDN yang sangat rendah, terlebih lagi untuk Nusa Tenggara Timur yang semua capaian indikatornya masih sangat kurang optimal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan diversifikasi dan distribusi pangan serta kegiatan penanaman modal, terutama di Kawasan Timur Indonesia.

Sementara itu, untuk Provinsi Papua secara umum menunjukkan hasil capaian pada AP 1 yang kurang optimal. Hasil yang kurang optimal tersebut tidak terlepas dari capaian 3 dari 4 indikator AP 1 yang berkinerja kurang optimal, seperti indikator Pola Pangan Harapan, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Realisasi Investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Adapun satu-satunya indikator dalam AP 1 yang tergolong sudah optimal adalah indikator Nilai Tukar Nelayan.

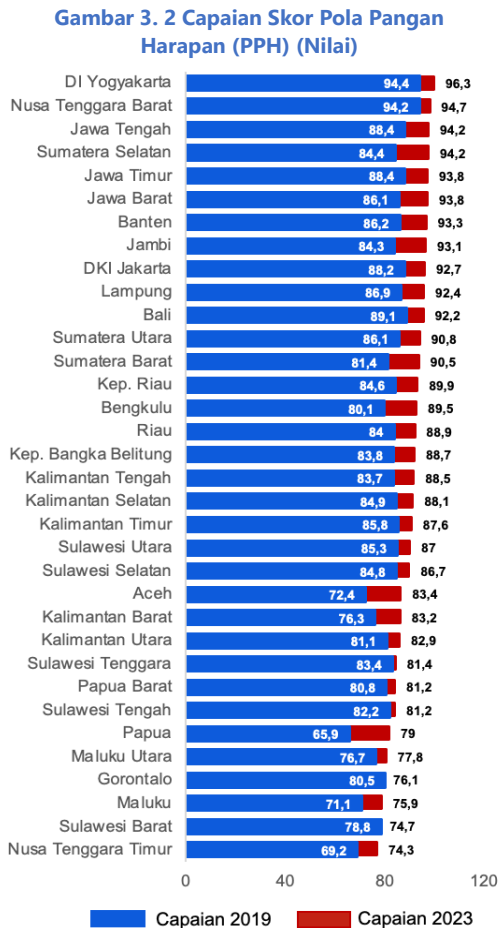
Tabel 3. 6 Capaian Indikator pada Agenda Pembangunan 1 di 34 Provinsi

NO	PROVINSI	AGENDA PEMBANGUNAN 1			
		Skor Pola Pangan Harapan	Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Nelayan	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun)
1	ACEH				
2	SUMATERA UTARA				
3	SUMATERA BARAT				
4	RIAU				
5	JAMBI				
6	SUMATERA SELATAN				
7	BENGKULU				
8	LAMPUNG				
9	KEP. BANGKA BELITUNG				
10	KEP. RIAU				
11	DKI JAKARTA				
12	JAWA BARAT				
13	JAWA TENGAH				
14	DI YOGYAKARTA				
15	JAWA TIMUR				
16	BANTEN				
17	BALI				
18	NUSA TENGGARA BARAT				
19	NUSA TENGGARA TIMUR				
20	KALIMANTAN BARAT				
21	KALIMANTAN TENGAH				
22	KALIMANTAN SELATAN				
23	KALIMANTAN TIMUR				
24	KALIMANTAN UTARA				
25	SULAWESI UTARA				
26	SULAWESI TENGAH				
27	SULAWESI SELATAN				
28	SULAWESI TENGGARA				
29	GORONTALO				
30	SULAWESI BARAT				
31	MALUKU				
32	MALUKU UTARA				
33	PAPUA BARAT				
34	PAPUA				

Sumber: EPD, 2024

Keterangan warna pada **heatmap** merupakan **perbandingan relatif antar daerah**

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)² (Nilai)



Sumber Data: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah)

Daerah dengan skor PPH yang tergolong rendah merupakan provinsi yang berada di pulau Sulawesi dan wilayah timur. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk mendorong pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tersebut sehingga distribusi pangan dapat lebih merata dan murah.

PPH adalah komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Perkembangan Skor PPH Konsumsi dan PPH Ketersediaan dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Provinsi dengan skor PPH tertinggi pada tahun 2023 adalah Provinsi D.I Yogyakarta, sedangkan provinsi dengan capaian terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara umum, hampir semua provinsi mengalami peningkatan skor PPH kecuali Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Faktor utama dari rendahnya skor pola pangan harapan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dari sisi distribusi. Akses distribusi pangan dan akses masyarakat pada sumber pangan utama masih sangat rendah dan mahal.

² Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan nilai/skor yang menunjukkan kualitas keberagaman konsumsi pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Semakin baik kualitas konsumsi pangan masyarakat maka skor PPH semakin mendekati ideal (100).

Peningkatan Indikator Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) dari 65,9 pada tahun 2019 menjadi 79 pada tahun 2023 mencerminkan perbaikan dalam keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat di Provinsi Papua. Beberapa faktor pendukung yang berkontribusi terhadap perkembangan positif ini seperti peningkatan produksi pertanian lokal.

Berdasarkan publikasi "Analisis Potensi Pertanian Provinsi Papua" oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, sektor pertanian di Provinsi Papua menunjukkan pertumbuhan signifikan. Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, terutama ubi jalar yang menjadi makanan pokok masyarakat di sebagian besar wilayah Papua, berperan dalam diversifikasi konsumsi pangan.

Selain itu, program pemerintah dalam ketahanan pangan turut berkontribusi positif dalam peningkatan skor PPH. Pemerintah pusat dan daerah telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) turut membantu meningkatkan taraf hidup dan status gizi masyarakat miskin, terutama melalui dorongan terhadap akses pangan yang lebih beragam.

Faktor eksternal lain yang turut mendorong perbaikan konsumsi pangan yang lebih beragam di Provinsi Papua, salah satunya adalah perbaikan infrastruktur konektivitas seperti jalan dan transportasi di Papua yang mempermudah distribusi bahan pangan ke berbagai daerah, sehingga masyarakat memiliki akses lebih baik terhadap beragam jenis pangan.

Upaya pemerintah dan berbagai lembaga untuk mensosialisasikan dan mendorong edukasi mengenai pentingnya konsumsi pangan beragam dan bergizi turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola makan sehat. Hal ini menjadi penting dalam meningkatkan kesadaran dan pentingnya literasi gizi dalam meningkatkan status ketahanan pangan rumah tangga khususnya di Provinsi Papua yang cenderung masih rendah. Meskipun demikian, tantangan seperti kondisi geografis yang sulit, keterbatasan sumber daya manusia, produktivitas tanaman pangan, dan ketergantungan pada komoditas tertentu masih perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan peningkatan PPH di Provinsi Papua.

Produksi Daging³ (Ton)

Produksi daging merupakan produksi 7 jenis daging hewan ternak yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi dan itik. Hasil produksi daging nasional dari

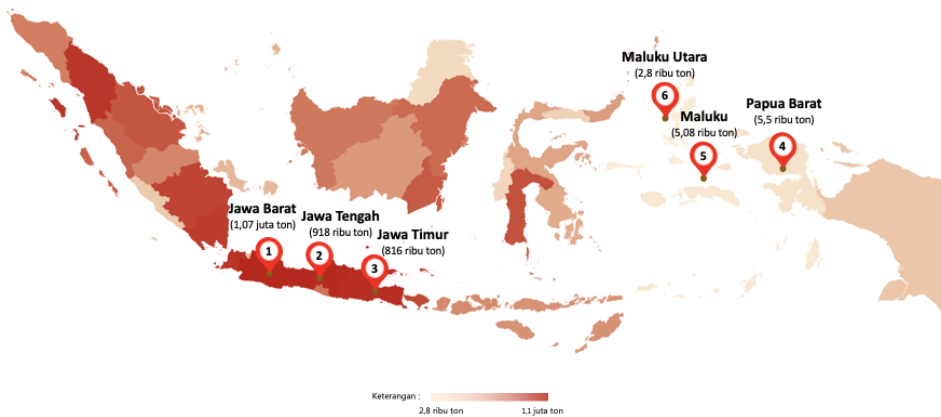
³ Produksi daging adalah jumlah karkas hasil pemotongan ternak ditambah dengan *edible offal* (bagian yang dapat dimakan) selama waktu tertentu. Daging yang dimaksud mencakup daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging domba, daging ayam, daging itik dan daging babi.

tahun 2019-2023 bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2023, provinsi dengan hasil produksi daging tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat, yang diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan, untuk provinsi dengan hasil produksi daging terendah adalah Provinsi Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat.

Secara keseluruhan, produksi daging ayam ras pedaging mendominasi merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan komoditas lain. Provinsi Jawa Barat memiliki hasil produksi daging sapi dan ayam ras pedaging yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan tingginya potensi pengembangan industri peternakan sapi dan ayam di daerah-daerah tersebut. Faktor yang melatarbelakangi rendahnya hasil produksi daging di Provinsi Maluku Utara adalah keterbelakangan akibat keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan akses pasar yang menyebabkan potensi belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, potensi yang ada di Maluku Utara lebih tinggi pada komoditas tanaman perkebunan. Direkomendasikan kedepannya untuk menerapkan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur konektivitas, pembangunan rumah potong hewan yang modern, dan pelatihan untuk para peternak.

Produksi daging di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) mengalami sedikit penurunan dari 25.287 ton pada tahun 2019 menjadi 25.244 ton pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan yang memengaruhi perkembangan sektor peternakan di Provinsi Papua. Beberapa faktor penghambat mengakibatkan terjadinya penurunan produksi, salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas transportasi, yang menghambat distribusi hasil ternak dan akses peternak ke pasar yang lebih luas. Selain itu, kondisi geografis yang sulit, dengan medan yang menantang dan penyebaran penduduk yang tidak merata, membuat implementasi program pemerintah menjadi kurang efektif di beberapa wilayah. Kendala ini diperparah oleh kurangnya SDM terutama tenaga ahli dan terampil di bidang peternakan, yang menghambat penerapan teknologi modern dan praktik peternakan yang efisien. Keterbatasan ini berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas hasil ternak di Provinsi Papua.

Gambar 3. 3 Produksi Daging Tahun 2023 (Ton)



Sumber Data: Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan, (diolah)

Nilai Tukar Petani⁴

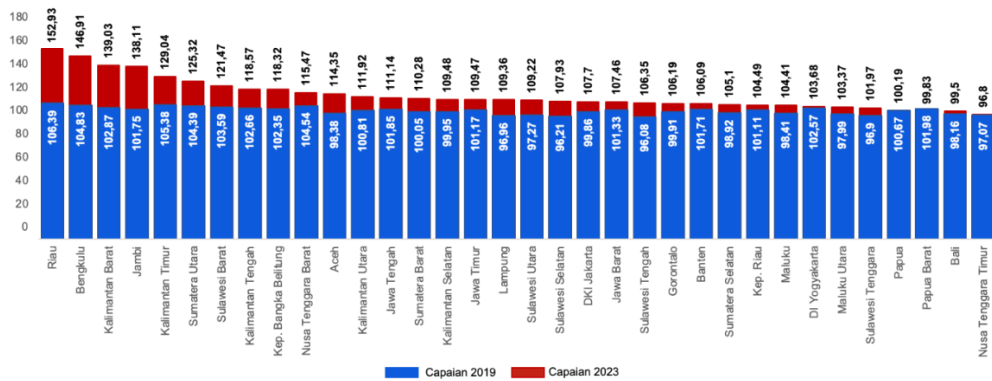
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Selama lima tahun terakhir, NTP nasional menunjukkan pergerakan fluktuatif dengan tren yang positif. Fluktuasi diakibatkan karena adanya penurunan di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Di tahun 2023, NTP tertinggi berhasil dicapai oleh Provinsi Riau yang diikuti oleh Bengkulu, dan Kalimantan Barat. Sementara itu, provinsi dengan capaian NTP terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Papua Barat. Tingginya angka NTP di Provinsi Riau didorong karena beberapa faktor seperti dukungan kebijakan nasional mengenai Biosolar (B.30 – B.50) dan meningkatnya produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan produksi kehutanan.

Di sisi lain, terdapat beberapa provinsi yang mengalami penurunan NTP seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (96,80), Bali (99,50), Papua Barat (99,83) memiliki NTP di bawah 100 yang berarti pendapatan para petani lebih rendah dari pengeluaran untuk konsumsi di provinsi tersebut. Terdapat beberapa permasalahan dalam sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur di mana adanya fenomena *El Nino* dan badai seroja yang menyebabkan para petani mengalami gagal panen karena ketidakpastian kondisi cuaca. Selain itu, mayoritas petani di NTT merupakan masyarakat tua yang masih

⁴ NTP memberikan indikasi secara umum mengenai daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal.

sangat bergantung pada bantuan pemerintah sehingga kemandirian belum tercapai. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai NTP melalui intervensi terkait pengurangan biaya input produksi dari para petani, seperti: pemberian bantuan bibit dan pupuk, subsidi bahan bakar, dan bantuan alsintan.

Gambar 3. 4 Capaian Nilai Tukar Petani (NTP)



Sumber Data: BPS, (diolah)

Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) mengalami sedikit penurunan dari 100,67 pada tahun 2019 menjadi 100,19 pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan adanya dinamika kompleks antara faktor pendukung dan tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Provinsi Papua. Beberapa faktor penghambat yang menyebabkan penurunan NTP di Provinsi Papua salah satunya adalah fluktuasi harga komoditas pertanian yang mempengaruhi pendapatan petani. Penurunan NTP pada bulan Juni 2023 sebesar 0,24 persen disebabkan oleh turunnya indeks harga yang diterima petani sebesar 0,07 persen, sementara indeks harga yang dibayar petani meningkat sebesar 0,17 persen.

Produksi Ikan⁵ (Ton)

Produksi Ikan merupakan jumlah produksi ikan yang berasal dari perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan hasil produksi ikan tertinggi pada tahun 2022, diikuti oleh Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan, hasil produksi ikan di Provinsi Jambi merupakan yang paling kecil secara nasional. Hasil produksi ikan yang tinggi di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur dikarenakan posisi geografis yang

⁵ Produksi Ikan merupakan jumlah produksi ikan yang berasal dari perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap.

berdekatan dengan laut. Oleh karena itu, kedua provinsi tersebut memiliki potensi sumber daya laut yang sangat tinggi yang mendorong masyarakat untuk berprofesi sebagai nelayan.

Hasil produksi perikanan yang rendah di Provinsi Jambi dikarenakan sebagian pembudidaya ikan dan nelayan kurang disiplin dalam menerapkan teknologi anjuran dan masih banyak yang belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), cara pembenihan ikan yang baik (CPIB), dan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB) dengan benar sehingga berpengaruh terhadap hasil produksi perikanan (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, 2022).

Permasalahan lain yang umum dihadapi dalam pencapaian target produksi ikan di antaranya adalah tingginya harga input produksi, baik untuk perikanan tangkap yang meliputi bahan bakar, kapal, dan alat tangkap, maupun perikanan budidaya yang meliputi pakan, benih, dan pencetakan tambak. Dalam upaya peningkatan produksi ikan, direkomendasikan untuk mendorong program peningkatan kapasitas pembudidaya ikan, penyaluran bantuan sarana dan prasarana produksi ikan, pemberian bantuan bibit dan pakan ikan, serta subsidi bahan bakar untuk para nelayan.

Gambar 3. 5 Capaian Produksi Ikan Tahun 2022 (Ton)



Sumber Data: Kementerian Kelautan Perikanan, (diolah)

Produksi ikan di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2023 tercatat sebesar 262.139 ton, yang menempatkan Provinsi Papua sebagai daerah dengan capaian produksi ikan terendah kelima secara nasional. Provinsi Papua sendiri memiliki sumber daya perikanan yang melimpah, terutama di wilayah perairan Samudera Pasifik dan Laut Arafura. Potensi ini didukung oleh keberadaan spesies ikan bernilai tinggi, seperti tuna, kerapu, dan udang, yang menjadi komoditas unggulan. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah turut berperan melalui program seperti

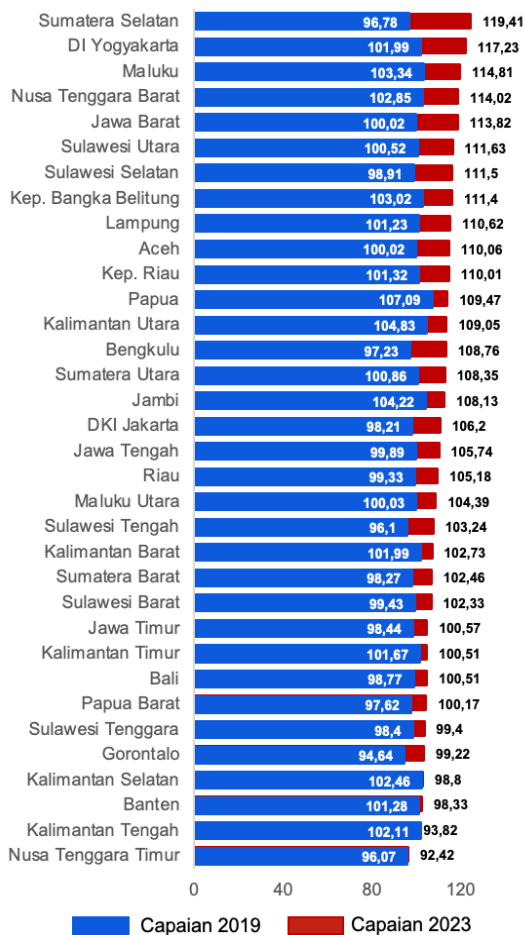
penyediaan alat tangkap ramah lingkungan, pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), serta pelatihan dan pendampingan nelayan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas.

Namun demikian, capaian indikator ini juga dipengaruhi oleh berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya infrastruktur, terutama aksesibilitas ke wilayah pesisir yang menjadi sentra perikanan. Kondisi geografis Papua yang luas dan sulit dijangkau menghambat distribusi hasil tangkapan, sehingga menurunkan efisiensi rantai pasok. Selain itu, fasilitas penyimpanan seperti cold storage masih tergolong minim, sehingga mengurangi daya saing hasil perikanan Papua di pasar nasional maupun internasional. Keterbatasan teknologi juga menjadi tantangan, di mana sebagian besar nelayan masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien. Faktor lain yang memengaruhi adalah rendahnya literasi nelayan terkait keberlanjutan sumber daya, yang dapat mengancam keberlanjutan produksi di masa depan.

Meskipun menghadapi tantangan, produksi ikan di Papua masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan. Langkah strategis seperti peningkatan infrastruktur pelabuhan perikanan, penyediaan fasilitas pasca-panen yang memadai, dan integrasi dengan pasar nasional serta internasional dapat menjadi solusi untuk mendorong kontribusi sektor perikanan ke depan. Dengan dukungan sumber daya yang melimpah dan program-program pemerintah yang terus diperkuat, diharapkan Provinsi Papua dapat meningkatkan indikator produksi ikan secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perekonomian nasional.

Nilai Tukar Nelayan⁶

Gambar 3. 6 Capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN)



Sumber Data: BPS, (diolah)

NTN adalah indikator yang mengukur kemampuan daya beli nelayan sebagai salah satu pelaku utama di subsektor perikanan tangkap. Capaian NTN di Indonesia bergerak secara fluktuatif selama 2020-2023. Selain itu, terdapat perubahan tahun dasar pada tahun 2020 sehingga ada perubahan angka yang signifikan jika dibandingkan dengan angka tahun 2019.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan capaian NTN tertinggi pada tahun 2023, dengan tingkat pertumbuhan yang cukup signifikan dalam 4 tahun terakhir. Selain itu, terdapat beberapa provinsi lain yang memiliki pertumbuhan angka yang signifikan (>12 poin) seperti Provinsi Bengkulu, Jawa Barat, dan Maluku.

Di sisi lain, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan angka NTN terendah pada tahun 2023 (92,42) dan mengalami penurunan nilai jika dibandingkan dengan capaian NTN pada tahun 2020 (94,20). Ditemukan juga beberapa provinsi lain yang mengalami penurunan capaian, seperti Provinsi Kalimantan Tengah, Banten, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

⁶ NTN pengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap

Secara umum, terdapat beberapa faktor penyebab penurunan NTN di antaranya adalah penurunan harga ikan di sebagian wilayah karena menurunnya tingkat konsumsi, kenaikan harga BBM yang merupakan biaya operasional, upah penangkapan, es batu dan sewa kapal motor. Spesifik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kendala yang ditemukan adalah adanya ketidakpastian cuaca yang mempengaruhi hasil tangkapan nelayan tradisional, aksesibilitas laut yang masih kurang memadai, dan rendahnya investasi teknologi di bidang perikanan. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendorong angka NTN adalah memberikan bantuan pemberian kapal untuk nelayan, subsidi bahan bakar, perluasan pasar penjualan produk perikanan, peningkatan pemanfaatan teknologi untuk budidaya dan penangkapan ikan.

Kemudian, Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) mengalami peningkatan dari 107,09 pada tahun 2019 menjadi 109,47 pada tahun 2023, yang menunjukkan perbaikan kesejahteraan nelayan di wilayah Papua. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, termasuk program-program yang dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah dan pusat. Salah satu faktor pendukung utama adalah upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan sektor perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, salah satunya telah menginisiasi pengembangan budidaya rumput laut di wilayah adat Saireri dan Mamta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan setempat dengan memanfaatkan potensi kelautan yang ada

Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan program strategis seperti Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya. Program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir dengan meningkatkan kualitas hidup nelayan dan pembudidaya ikan. Implementasi program ini di berbagai daerah, termasuk Papua, diharapkan dapat meningkatkan Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan.

Di sisi lain, masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan pencapaian NTN di Provinsi Papua, seperti keterbatasan infrastruktur, akses pasar yang terbatas, dan fluktuasi harga komoditas perikanan. Selain itu, masih banyak nelayan di Papua yang masih berada pada tingkat ekonomi subsisten, di mana hasil tangkapan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa ada surplus yang signifikan untuk diperdagangkan. Faktor ini diperparah oleh akses yang terbatas terhadap

pembiayaan atau modal usaha, sehingga nelayan kesulitan meningkatkan kapasitas produksi mereka.

Nilai Realisasi PMA dan PMDN⁷ (Triliun)

Nilai realisasi penanaman modal dihitung dari perolehan segala bentuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Perkembangan nilai realisasi investasi nasional menunjukkan tren positif dalam 5 tahun terakhir.

Nilai Realisasi PMA dan PMDN tertinggi dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023, lalu diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Selanjutnya, untuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan merupakan daerah dengan nilai realisasi yang terendah. Hal tersebut menunjukkan aktivitas investasi di Indonesia masih terfokus di wilayah Barat, khususnya pulau Jawa.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian angka realisasi investasi di Provinsi DKI Jakarta beberapa di antaranya adalah dikembangkannya sistem pengajuan izin dan nonizin secara *online*, pendirian Jakarta *Investment Center* (JIC) untuk memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan segala informasi tentang investasi di Jakarta, pengintegrasian Sistem JakEvo-AJIB untuk memudahkan perizinan secara *online* (Dinas PM-PTSP Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Gambar 3. 7 Nilai Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2023 (Triliun)



Sumber Data: Kementerian Investasi/BKPM, (diolah)

Realisasi investasi di wilayah Papua tergolong rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain, terdapat faktor penghambat yang menjadi penyebab rendahnya

⁷ Nilai realisasi penanaman modal dihitung dari perolehan segala bentuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

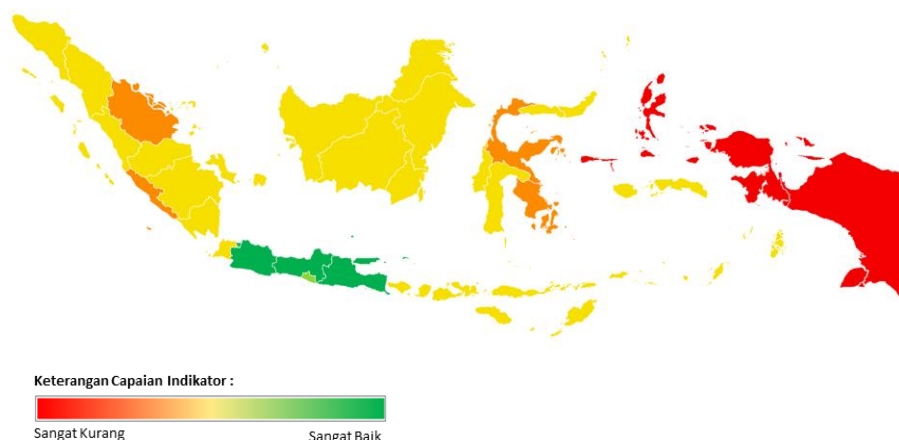
aktivitas investasi, yaitu: ketidakstabilan keamanan dan politik di beberapa daerah, terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar daerah, kurangnya konsistensi dan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga non-pemerintah, prosedur birokrasi dan perizinan yang cukup rumit, hak kepemilikan tanah

Selanjutnya, untuk nilai realisasi PMA dan PMDN di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2023 sebesar Rp1,30 Triliun. Jumlah tersebut masih belum optimal jika dibandingkan daerah lain.

b. Potret capaian indikator AP 2

Agenda Pembangunan (AP) 2 dalam RPJMN 2020 - 2024 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun AP 2 antara lain: (1) Perkembangan Status Pembangunan Desa (Desa Mandiri dan Berkembang); serta (2) Persentase capaian penerapan SPM di daerah (%).

Gambar 3. 8 Capaian Agenda Pembangunan 2 di 34 Provinsi



Perlunya Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan di Kawasan Timur Indonesia

Secara umum, hasil capaian kinerja menunjukkan rata-rata kinerja daerah masih kurang optimal. Untuk daerah dengan capaian kurang optimal mayoritas berada di wilayah Maluku dan Papua, sedangkan kinerja yang lebih baik dicapai oleh daerah-daerah yang berada di wilayah Jawa. Jika melihat dengan lebih detail, daerah yang memiliki kinerja tertinggi dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI

Jakarta dan Jawa Barat. Di sisi lain, daerah dengan capaian yang masih sangat kurang adalah Provinsi Maluku, Papua Barat, dan Papua. Kurang optimalnya kinerja ketiga provinsi tersebut utamanya dihambat oleh capaian perkembangan pembangunan desa dan persentase capaian penerapan SPM di daerah yang masih rendah, terlebih lagi untuk Papua Barat yang semua capaian indikatornya masih sangat kurang optimal. Hal ini menunjukkan perlunya penetapan prioritas pembangunan dana desa, pengembangan BUMDesa, dan fokus pembangunan pada sektor-sektor kebutuhan dasar masyarakat terutama di Kawasan Timur Indonesia.

Sementara itu, untuk Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) secara umum menunjukkan hasil yang kurang optimal pada capaian AP 2. Hasil kurang optimal tersebut tidak terlepas dari capaian indikator Perkembangan status pembangunan desa (desa mandiri) dan Persentase capaian penerapan SPM di daerah (%) yang masih sangat rendah.

Tabel 3. 7 Capaian Indikator pada Agenda Pembangunan 2 di 34 Provinsi

NO	PROVINSI	AGENDA PEMBANGUNAN 2	
		Perkembangan status pembangunan desa (desa mandiri)	Persentase capaian penerapan SPM di daerah (%)
1	ACEH		
2	SUMATERA UTARA		
3	SUMATERA BARAT		
4	RIAU		
5	JAMBI		
6	SUMATERA SELATAN		
7	BENGKULU		
8	LAMPUNG		
9	KEP. BANGKA BELITUNG		
10	KEP. RIAU		
11	DKI JAKARTA		
12	JAWA BARAT		
13	JAWA TENGAH		
14	DI YOGYAKARTA		
15	JAWA TIMUR		
16	BANTEN		
17	BALI		
18	NUSA TENGGARA BARAT		
19	NUSA TENGGARA TIMUR		
20	KALIMANTAN BARAT		
21	KALIMANTAN TENGAH		
22	KALIMANTAN SELATAN		
23	KALIMANTAN TIMUR		
24	KALIMANTAN UTARA		
25	SULAWESI UTARA		

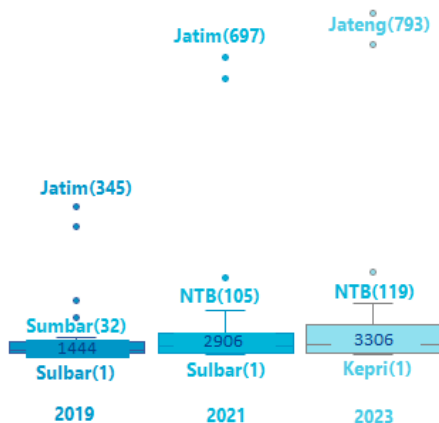
NO	PROVINSI	AGENDA PEMBANGUNAN 2	
		Perkembangan status pembangunan desa (desa mandiri)	Persentase capaian penerapan SPM di daerah (%)
26	SULAWESI TENGAH		
27	SULAWESI SELATAN		
28	SULAWESI TENGGARA		
29	GORONTALO		
30	SULAWESI BARAT		
31	MALUKU		
32	MALUKU UTARA		
33	PAPUA BARAT		
34	PAPUA		

Sumber: EPD, 2024

Keterangan warna pada *heatmap* merupakan perbandingan relatif antar daerah

Perkembangan Status Pembangunan Desa (Desa Mandiri dan Berkembang)⁸

Gambar 3. 9 Jumlah Desa Mandiri (Tertinggi dan Terendah) Tahun 2019 - 2023



Sumber Data: Kementerian PPN/Bappenas (diolah)

Perkembangan pembangunan desa mengalami peningkatan dilihat dari peningkatan jumlah Desa Mandiri dan Desa Berkembang. Pencapaian lainnya yang mendorong peningkatan pembangunan desa hingga tahun 2023, di antaranya (a) penurunan tingkat kemiskinan perdesaan menjadi 12,22 persen; serta (b) peningkatan kemajuan dan kemandirian desa melalui revitalisasi 9.114 BUMDesa Berkembang, 1.677 BUMDesa Maju, 564 BUMDesa Bersama Berkembang, dan 532 BUMDesa Bersama Maju.

⁸ Status desa dapat diklasifikasikan menjadi lima status, yaitu: Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal.

Program dan kegiatan strategis dalam mendukung percepatan pembangunan desa, antara lain (a) penetapan prioritas penggunaan dana desa, (b) pengembangan BUMDesa, dan (c) pengembangan Desa Wisata.

Provinsi dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak terdapat di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sampai tahun 2023 masih terdapat beberapa provinsi yang tidak memiliki Desa Mandiri terutama di wilayah Indonesia Timur, antara lain Provinsi NTT, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Ke depan, pengembangan status pembangunan desa perlu terus didorong melalui (a) optimalisasi pencapaian SDGs Desa dengan menginternalisasi 18 tujuan SDGs desa ke dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; (b) peningkatan pemenuhan layanan dasar (pendidikan dan kesehatan), terutama di desa tertinggal dan sangat tertinggal; (c) peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan di desa, melalui peningkatan akses pembiayaan, peningkatan sarana dan prasarana ekonomi, peningkatan kerja sama antar desa dan antar-*stakeholders*; dan (d) peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Papua tidak memiliki desa dengan status mandiri pada tahun 2019 maupun hingga tahun 2023. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat perkembangan desa di Provinsi Papua. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur dasar, seperti akses transportasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Berdasarkan laporan "Statistik Potensi Desa Provinsi Papua 2021" oleh BPS mengindikasikan masih banyak desa di Provinsi Papua yang kekurangan fasilitas layanan dasar, yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat desa.

Tantangan lainnya meliputi tingkat pendidikan yang rendah dan keterbatasan sumber daya manusia yang terampil di desa-desa di wilayah Papua. Hal ini menghambat kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi lokal dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Selain itu, masalah keamanan di beberapa wilayah juga menjadi faktor penghambat investasi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah telah meluncurkan berbagai program, seperti Dana Desa, Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang bertujuan meningkatkan pembangunan dan kemandirian desa. Namun, implementasi program ini di Papua menghadapi kendala dalam hal distribusi dan pemanfaatan dana secara efektif, terutama akibat keterbatasan kapasitas administrasi dan pengawasan di tingkat desa.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat upaya dari pemerintah untuk mendorong pembangunan desa di Papua, berbagai tantangan struktural dan geografis masih menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan status desa mandiri di wilayah Papua.

Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal (%)

Terdapat 62 kabupaten yang termasuk daerah tertinggal yang tersebar di 5 (lima) wilayah, yaitu Sumatra, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Wilayah dengan jumlah daerah tertinggal terbanyak, yaitu wilayah Papua sebanyak 30 kabupaten. Secara umum dari tahun 2021-2023, perkembangan capaian persentase penduduk miskin di kabupaten daerah tertinggal Wilayah Sumatra cenderung sudah dapat mencapai target. Capaian persentase penduduk miskin di kabupaten daerah tertinggal khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dari tahun 2020-2023 cenderung tidak mencapai target. Sedangkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, capaian persentase penduduk miskin di kabupaten daerah tertinggal setiap tahunnya sudah dapat mencapai target.

Gambar 3. 10 Capaian Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal Tahun 2023 (%)



Ket: Angka merupakan rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi tersebut

Sumber Data: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah)

Capaian rata-rata persentase penduduk miskin di kabupaten daerah tertinggal tertinggi yaitu di Provinsi Papua Pegunungan. Beberapa faktor penghambat utama capaian rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal tersebut yaitu

faktor geografis, infrastruktur yang masih terbatas, tingkat pendidikan dan kesehatan yang masih rendah, faktor budaya, dan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, perlu adanya intervensi yang lebih untuk penanganan kemiskinan di daerah tertinggal.

Di Provinsi Papua Selatan masih terdapat 3 daerah tertinggal yaitu Kab. Mappi, Kab. Asmat, dan Kab. Boven Digoel. Rata-rata persentase penduduk miskin yang ada di tiga daerah tersebut sebesar 23,70 persen. Hal tersebut masih cukup tinggi sehingga perlu untuk terus dioptimalkan.

Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal (Nilai)

Terdapat 62 kabupaten yang termasuk daerah tertinggal yang tersebar di 5 (lima) wilayah, yaitu Sumatra, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Wilayah dengan jumlah daerah tertinggal terbanyak, yaitu wilayah Papua sebanyak 30 kabupaten.

Pada tahun 2020 dan 2023, provinsi induk yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat sudah mencapai target rata-rata IPM di daerah tertinggal setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2021 kedua provinsi induk tersebut belum mencapai target. Selanjutnya untuk tahun 2022, hanya Provinsi Papua saja yang dapat mencapai targetnya.

Capaian rata-rata IPM di kabupaten daerah tertinggal terendah yaitu di Provinsi Papua Pegunungan. Beberapa faktor utama yang menghambat pencapaian IPM di kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Papua Pegunungan antara lain: masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, tingkat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum sesuai dengan SPM, penyebaran tenaga pendidik dan kesehatan yang belum merata, pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang belum optimal dan tidak memperhatikan lokasi yang jauh dari masyarakat. Pada Provinsi Papua Selatan, rata-rata capaian IPM di 3 daerah tertinggal yaitu sebesar 61,63. Hal ini perlu terus ditingkatkan untuk mencapai pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing.

Gambar 3. 11 Capaian Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal Tahun 2023 (Nilai)



Ket: Angka merupakan rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi tersebut

Sumber Data: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah)

Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah⁹ (%)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Capaian SPM 2023 secara umum sudah menunjukkan angka capaian yang baik. Dimana rata-rata capaian SPM tertinggi berada di Pulau Jawa. Berdasarkan provinsinya, capaian tertinggi (100 persen) berada di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan daerah yang menjadi perhatian dengan rata-rata capaian SPM di bawah 90 persen berada pada Provinsi Riau, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Selain itu terdapat 3 provinsi yang belum melaporkan SPM yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

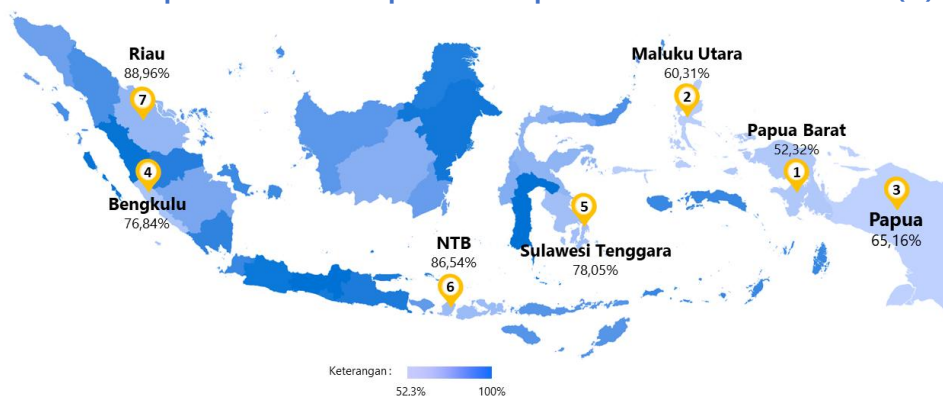
Keberhasilan pencapaian SPM yang optimal sangat bergantung pada orientasi pembangunan daerah tersebut. Provinsi dengan capaian SPM yang tinggi cenderung memfokuskan pembangunannya pada sektor-sektor kebutuhan dasar masyarakatnya. Strategi dalam manajemen pembangunan antara pemenuhan kebutuhan dasar dan tujuan-tujuan pembangunan yang visioner dengan kapasitas fiskal yang terbatas juga menjadi kunci penting dalam pencapaian SPM. Namun

⁹ Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

demikian, terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam pencapaian SPM yang optimal antara lain seperti banyaknya masalah prioritas yang harus diselesaikan dengan jumlah anggaran yang terbatas, tantangan akses geografis, dan ketersediaan SDM pendukung.

Adapun hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penerapan SPM yaitu: (1) Memastikan kesiapan anggaran; (2) Memahami antara jenis penerima layanan dan mutu layanan; (3) Memastikan jumlah target yang dilayani berdasarkan hasil pengisian format 4 (empat) Tahapan penerapan SPM sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021; (4) Menyampaikan laporan realisasi penerapan SPM sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan setiap triwulan; (5) Menyusun dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM untuk membuat strategi pencapaian pemenuhan SPM di daerah; dan (6) Meningkatkan koordinasi Tim Penerapan SPM dengan melakukan rapat koordinasi secara berkala.

Gambar 3. 12 Capaian Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah Tahun 2023 (%)



Sumber Data: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah)

c. Potret capaian indikator AP 3

Agenda Pembangunan (AP) 3 dalam RPJMN 2020 - 2024 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun AP 3 antara lain: (1) Cakupan Kepesertaan JKN; (2) Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12 - 23 bulan; (3) Prevalensi *stunting* pada balita; (4) Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar; (5) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas; (6) Indeks Pemberdayaan Gender; serta (7) Indeks Pembangunan Pemuda.

menunjukkan capaian yang optimal jika dibandingkan secara relatif dengan daerah lainnya.

Tabel 3. 8 Capaian Indikator pada Agenda Pembangunan 3 di 34 Provinsi

NO	PROVINSI	AGENDA PEMBANGUNAN 3						
		Cakupan kepesertaan JKN (%)	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Pemuda
1	ACEH							
2	SUMATERA UTARA							
3	SUMATERA BARAT							
4	RIAU							
5	JAMBI							
6	SUMATERA SELATAN							
7	BENGKULU							
8	LAMPUNG							
9	KEP. BANGKA BELITUNG							
10	KEP. RIAU							
11	DKI JAKARTA							
12	JAWA BARAT							
13	JAWA TENGAH							
14	DI YOGYAKARTA							
15	JAWA TIMUR							
16	BANTEN							
17	BALI							
18	NUSA TENGGARA BARAT							
19	NUSA TENGGARA TIMUR							
20	KALIMANTAN BARAT							
21	KALIMANTAN TENGAH							
22	KALIMANTAN SELATAN							
23	KALIMANTAN TIMUR							
24	KALIMANTAN UTARA							
25	SULAWESI UTARA							
26	SULAWESI TENGAH							

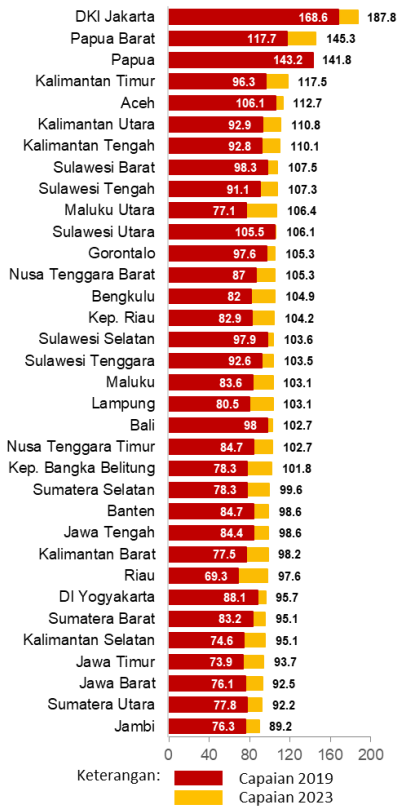
NO	PROVINSI	AGENDA PEMBANGUNAN 3						
		Cakupan kepesertaan JKN (%)	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Pemuda
27	SULAWESI SELATAN							
28	SULAWESI TENGGARA							
29	GORONTALO							
30	SULAWESI BARAT							
31	MALUKU							
32	MALUKU UTARA							
33	PAPUA BARAT							
34	PAPUA							

Sumber: EPD, 2024

Keterangan warna pada *heatmap* merupakan **perbandingan relatif antar daerah**

Cakupan Kepesertaan JKN¹⁰ (%)

Gambar 3. 14 Capaian Indikator Cakupan Kepesertaan JKN



Selama tahun 2019 hingga 2023, cakupan kepesertaan JKN di seluruh daerah cenderung meningkat dimana peningkatan tertinggi berada di Provinsi Maluku Utara (29,30 persen), Riau (28,30 persen), dan Papua Barat (27,60 persen), sedangkan Provinsi Papua menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami penurunan yaitu sebesar 1,4 persen.

Tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah yang memiliki cakupan kepesertaan JKN tertinggi sedangkan Provinsi Jambi memiliki cakupan kepesertaan JKN terendah pada tahun 2023.

Sumber: sismonev.djsn.go.id, (diolah)

Perkembangan Cakupan Kepesertaan JKN terus menerus di tingkatkan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan terus melakukan perluasan di daerah melalui program-program yang dikembangkan seperti PESIAR

(Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi) dan pengawalan Rencana Aksi Kementerian/Lembaga oleh tim koordinasi Optimalisasi JKN yang mencakup pemetaan masyarakat termasuk penduduk rentan yang belum terlindungi JKN serta melakukan sosialisasi dan advokasi kepada pemerintah daerah terkait cakupan kepesertaan JKN. Secara umum, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan capaian cakupan kepesertaan JKN di Indonesia adalah kerjasama antara pemerintah dan swasta, khususnya dalam aspek tarif. Pihak pemerintah tetap harus mendukung

¹⁰ Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan JKN atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

fasilitas kesehatan terutama dengan fasilitas kesehatan swasta terkait dengan dukungan tarif JKN, ketersediaan SDM, dan sebaran peserta JKN yang tidak hanya fokus di Puskesmas/ klinik milik pemerintah (Arimbi, Diah, dkk, 2022).

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) menunjukkan angka yang sangat tinggi, dengan 143,2 persen pada tahun 2019 dan sedikit menurun menjadi 141,2 persen pada tahun 2023. Meskipun terdapat penurunan, capaian ini tetap menjadikan Papua sebagai daerah dengan tingkat kepesertaan tertinggi secara nasional.

Salah satu faktor utama yang mendukung tingginya cakupan JKN di Papua adalah program pemerintah yang proaktif dalam mendaftarkan penduduk ke dalam skema JKN, terutama melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di Papua didominasi oleh peserta BPJS Kesehatan PBI, dengan angka signifikan di berbagai kabupaten/kota.

Penurunan cakupan dari 143,2 persen pada tahun 2019 menjadi 141,2 persen pada tahun 2023 dapat disebabkan oleh beberapa tantangan. Salah satunya adalah tantangan geografis Papua yang luas dan memiliki medan yang sulit, sehingga menyulitkan pendataan dan distribusi layanan kesehatan secara merata. Selain itu, adanya kemungkinan data ganda atau ketidakakuratan data kependudukan yang dapat memengaruhi angka cakupan yang dilaporkan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya jaminan kesehatan juga menjadi hambatan dalam mencapai cakupan yang lebih akurat dan efektif.

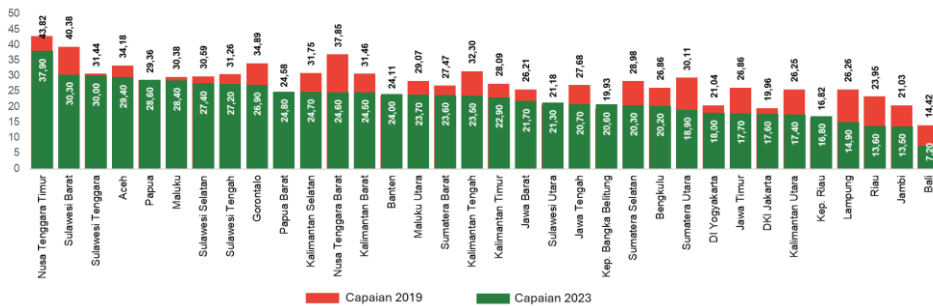
Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita¹¹ (%)

Selama tahun 2019 hingga 2023, prevalensi *stunting* di seluruh daerah cenderung menurun dimana penurunan tertinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (13,25 persen), Lampung (11,36 persen), dan Sumatra Utara (11,21 persen). Namun terdapat beberapa provinsi yang mengalami peningkatan angka prevalensi *stunting* diantaranya yaitu Provinsi Kep. Bangka Belitung (0,67 persen), Papua Barat (0,22 persen) dan Sulawesi Utara (0,2 persen). Provinsi Bali merupakan daerah angka prevalensi *stunting* terendah di Indonesia. Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara

¹¹ Prevalensi *stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Hal ini ditandai dengan tinggi badan balita tidak sesuai dengan anak seusianya.

Timur dan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua yaitu Papua Tengah dan Papua Pegunungan menjadi daerah yang memiliki angka prevalensi *stunting* tertinggi.

Gambar 3. 15 Capaian Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Tahun 2019 dan 2023 di 34 Provinsi (%)



Sumber: SSGI, Survei Kesehatan Indonesia, (diolah)

Provinsi Bali menjadi satu-satunya provinsi dengan kategori *stunting* rendah (kurang dari 10 persen) sedangkan Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan prevalensi *stunting* tertinggi pada tahun 2023. Sebagai provinsi dengan tingkat prevalensi *stunting* terendah, Bali melaksanakan strategi percepatan penurunan *stunting* melalui penguatan konvergensi lintas sektor, intervensi spesifik dan sensitif tepat sasaran, peningkatan kolaborasi lini lapangan (KPM, PKB, PLKB, Kader), penyediaan data sasaran yang valid, penguatan monitoring dan evaluasi di berbagai jenjang, peningkatan sosialisasi dan KIE.

Percepatan penurunan *stunting* di Provinsi Bali terwujud karena adanya inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, di antaranya yaitu: (1) penguatan dan pemberdayaan keluarga serta remaja pada lingkungan rumah dalam upaya pencegahan *stunting*; (2) penjarangan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang bebas *stunting*; (3) gerakan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat seperti Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMARIKAN), Hasil Olahan Non Beras, berbahan dasar Jagung dan Ikan Laut (Horas Jangkut), dan Gerakan Jumat Minum Pil Pintar dan syantik/TTD (Gemar Tersyantik); (4) penggunaan sistem informasi sebagai inovasi pencatatan elektronik dalam perekaman data individu maupun sebagai layanan pemantauan pelaksanaan prevalensi *stunting*; serta (5) program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.

Selama tahun 2020 hingga Tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan capaian prevalensi *stunting* tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2023, adanya Daerah Otonomi Baru di Pulau Papua, angka prevalensi *stunting*

tertinggi berada di Papua Tengah disusul oleh NTT. Faktor utama penyebab masih tingginya angka prevalensi *stunting* di Provinsi NTT yaitu: (1) masih tingginya tingkat kemiskinan yang membatasi akses terhadap makanan bergizi; (2) masih terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan terutama daerah perdesaan dan terpencil; (3) kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memperburuk masalah gizi buruk; dan (4) faktor budaya yang mempengaruhi pola asuh dan pola makan anak.

Direkomendasikan kebijakan akselerasi penanganan *stunting* terutama untuk daerah-daerah yang masih tinggi stuntingnya seperti Papua Tengah, NTT, dan Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya seperti pemenuhan akses terhadap infrastruktur layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi dan pemerataan akses terhadap layanan kesehatan terutama di daerah perdesaan dan daerah terpencil.

Prevalensi *stunting* di Papua Selatan pada tahun 2023 tercatat sebesar 25 persen. Dari 4 kabupaten yang ada, Kab. Boven Digoel memiliki prevalensi stunting tertinggi yaitu 34,2 persen. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan telah melakukan berbagai intervensi untuk menurunkan angka stunting. Selain memberikan makanan tambahan melalui puskesmas, juga memberikan tablet penambah darah bagi remaja perempuan.

Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan¹² (%)

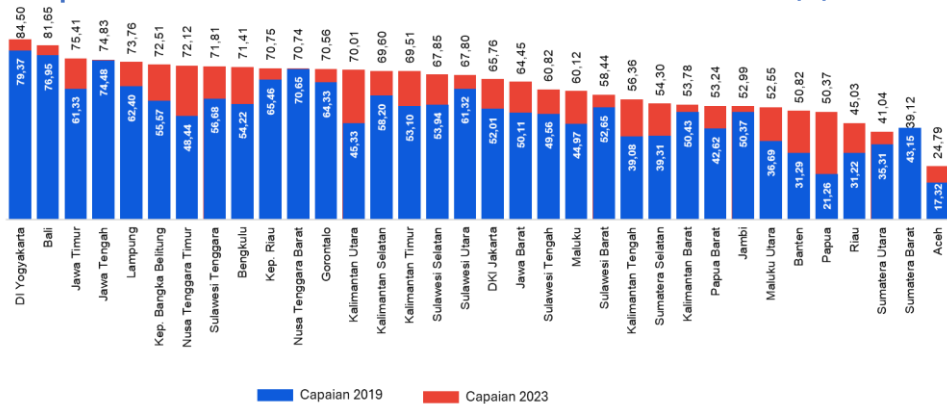
Pada tahun 2023, Provinsi D.I. Yogyakarta menjadi provinsi dengan capaian indikator imunisasi dasar lengkap (IDL) anak usia 12-23 bulan tertinggi (84,5 persen), diikuti Provinsi Bali (81,65 persen) sedangkan Provinsi Aceh menjadi provinsi dengan capaian terendah (24,79 persen). Sebagai provinsi dengan tingkat capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) anak usia 12-23 bulan, Provinsi D.I.Yogyakarta melaksanakan strategi dan upaya melalui peningkatan koordinasi teknis dengan kabupaten/kota, puskesmas, dan fasilitas pelayanan imunisasi swasta, peningkatan mutu atau kualitas sistem pencatatan dan pelaporan melalui program 'SIMUNDU' (Sistem Informasi Imunisasi Terpadu), pelatihan atau peningkatan kapasitas petugas imunisasi di puskesmas dan pelayanan swasta, serta melakukan supervisi atau asistensi program imunisasi secara berjenjang.

Selama tahun 2019 hingga 2023, persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada anak usia 12-23 bulan di seluruh daerah cenderung meningkat dimana daerah

¹² Bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap meliputi satu dosis imunisasi HB_x0002_0, satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT-HB/DPT-HB-HiB, empat kali imunisasi polio atau tiga kali imunisasi IPV, dan satu kali imunisasi campak

dengan peningkatan tertinggi ada di Provinsi Papua (29,11 persen), Kalimantan Utara (24,68 persen), dan Nusa Tenggara Timur (23,68 persen). Namun terdapat provinsi yang mengalami penurunan angka persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan yaitu Sumatra Barat yang menurun sebesar 4,03 persen.

Gambar 3. 16 Capaian Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada Anak Usia 12-23 Bulan Tahun 2019 dan 2023 di 34 Provinsi (%)



Sumber: SSGI, Survei Kesehatan Indonesia, (diolah)

Provinsi Aceh (24,79 persen) dan Sumatra Barat (39,12 persen) menjadi dua provinsi dengan capaian IDL terendah. Hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) keyakinan keagamaan dan budaya; (2) kurangnya edukasi dan pemahaman tentang imunisasi; (3) tantangan geografis dan aksesibilitas; (4) keraguan terhadap kualitas vaksin yang digunakan dalam rangkaian IDL. Di Indonesia sendiri, berdasarkan UNICEF (2023), masih terdapat lebih dari setengah juta anak Indonesia yang belum pernah mendapatkan imunisasi rutin apapun atau berstatus *zero dose*. Hal tersebut diatasi dengan upaya UNICEF dan pemerintah dalam menyusun strategi nasional dengan fokus pada daerah dengan cakupan imunisasi rendah serta pelibatan berbagai *stakeholders* juga sangatlah penting.

Direkomendasikan kebijakan terutama untuk daerah-daerah yang belum optimal capaian agar ada upaya percepatan pemenuhan imunisasi dasar lengkap seperti perluasan edukasi terkait pentingnya imunisasi serta perluasan akses layanan kesehatan terutama di daerah terpencil.

Capaian imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) menunjukkan peningkatan signifikan dari 21,26 persen pada tahun 2019 menjadi 50,37 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, diantaranya adalah implementasi program imunisasi nasional yang terintegrasi dengan fokus pada layanan imunisasi dasar lengkap pada anak di bawah dua tahun. Di tingkat daerah, Dinas Kesehatan

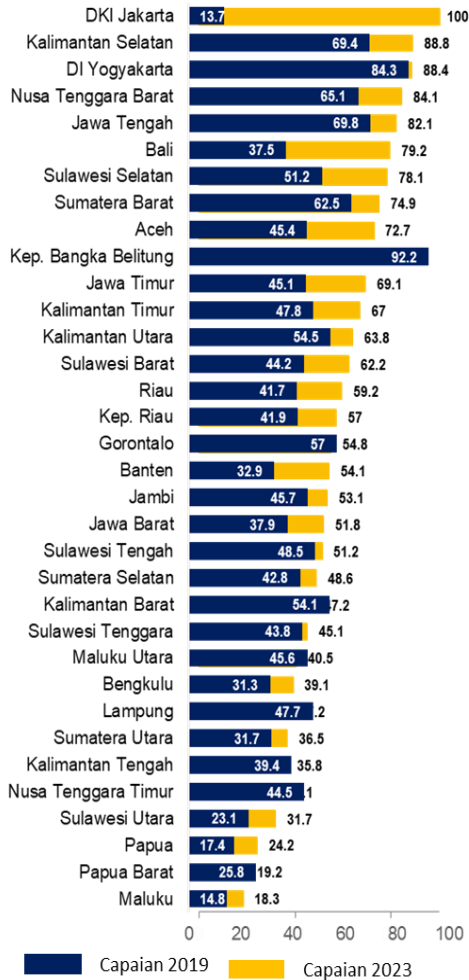
Provinsi Papua aktif melaksanakan program imunisasi rutin dan tambahan, termasuk kolaborasi dengan berbagai pihak seperti UNICEF dan Yayasan Berkat Lestari untuk meningkatkan cakupan imunisasi dan menanggulangi infodemic di Provinsi Papua.

Selain itu, upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan mengenai pentingnya imunisasi turut berperan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi orang tua dalam membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Pemerintah daerah juga menyediakan layanan imunisasi gratis di berbagai fasilitas kesehatan, seperti Posyandu, Puskesmas, dan rumah sakit umum daerah, untuk memudahkan akses bagi masyarakat.

Meskipun demikian, tantangan seperti kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur, dan persepsi negatif terhadap imunisasi masih menjadi hambatan dalam mencapai cakupan imunisasi yang optimal di Provinsi Papua. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan setiap anak mendapatkan haknya atas layanan kesehatan yang memadai.

Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar¹³ (%)

Gambar 3. 17 Capaian Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar Tahun 2019 dan 2023 di 34 Provinsi (%)



Sumber: SSGI, Survei Kesehatan Indonesia, (diolah)

Selama tahun 2019 hingga 2023, persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar di seluruh daerah cenderung meningkat dimana daerah dengan peningkatan tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta (86,30 persen), Bali (41,70 persen), dan Aceh (27,30 persen). Namun terdapat provinsi yang mengalami penurunan angka persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar cukup signifikan yaitu Provinsi Kep. Bangka Belitung (21,90 persen).

Provinsi Maluku, Papua Barat, dan Papua (termasuk Papua Selatan) merupakan daerah dengan capaian persentase puskesmas dengan tenaga kerja sesuai standar sedangkan Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, DI Yogyakarta.

Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan dengan jangkauan yang cukup luas. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Maluku adalah penyediaan sarana prasarana kesehatan yang belum merata, kualitas dan kuantitas layanan kesehatan (sarana prasarana dan tenaga kesehatan) yang masih belum optimal.

¹³ Tenaga kesehatan sesuai standar pada setiap Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan (nakes) sesuai standar yaitu dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sanitasi lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian.

Direkomendasikan adanya kebijakan terutama untuk daerah-daerah yang masih belum optimal yaitu: (1) perluasan akses pelayanan dasar kesehatan; (2) peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan (sarana prasarana dan tenaga kesehatan), (3) pengembangan pelayanan kesehatan berbasis gugus pulau, (4) pengembangan *telemedicine* berbasis gugus pulau.

Kemudian, persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 untuk Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) adalah sebesar 24,20 persen. Hal tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 17,40 persen. Nilai tersebut masih sangat jauh di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 56 persen. Sebagai wilayah dengan karakteristik geografis yang sangat luas, tantangan di Papua terkait dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, infrastruktur yang terbatas, serta disparitas yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam akses terhadap tenaga kesehatan.

Namun demikian, faktor pendukung utama yang berkontribusi pada peningkatan indikator tersebut di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) adalah keberadaan program-program pemerintah pusat seperti Nusantara Sehat dan penugasan tenaga kesehatan khusus di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Program Nusantara Sehat menempatkan tenaga kesehatan berbasis tim di Puskesmas di wilayah DTPK, sehingga membantu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan juga telah menyediakan program afirmasi pendidikan bagi putra-putri daerah Papua untuk menjadi tenaga kesehatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan lokal yang memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.

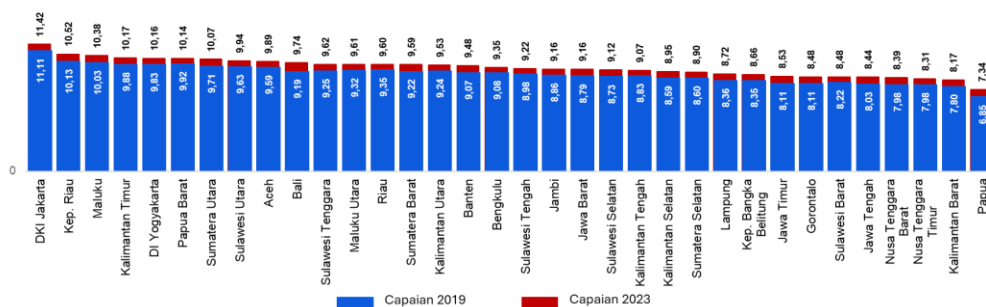
Rata-Rata Lama sekolah Penduduk Usia 15 tahun ke atas¹⁴ (Tahun)

Secara umum, capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 15 tahun ke atas di 34 provinsi terus meningkat. Provinsi Bali dan Papua merupakan provinsi dengan capaian RLS meningkat cukup signifikan selama empat tahun terakhir. Provinsi DKI Jakarta, Kep. Riau, dan Maluku merupakan daerah dengan RLS tertinggi sedangkan Provinsi Papua, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur memiliki RLS

¹⁴ Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah waktu dalam satuan tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

terendah. Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan antarprovinsi yang salah satunya disebabkan oleh belum meratanya akses layanan pendidikan di seluruh provinsi. Untuk itu, perlu adanya pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan khususnya pada daerah-daerah yang masih kurang optimal.

Gambar 3. 18 Capaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Tahun 2019 dan 2023 di 34 Provinsi (Tahun)



Sumber: BPS, (diolah)

Sebagai provinsi dengan tingkat rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas tertinggi, Provinsi DKI Jakarta mendorong strategi untuk memastikan ketersediaan anggaran untuk mengurangi angka putus sekolah di tiap jenjang melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Biaya Operasional Pendidikan, serta perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus. Di samping itu, berbagai inovasi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dalam mendukung capaian rata-rata lama sekolah juga dilakukan, seperti pemberian Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) kepada peserta didik baru pada awal tahun pelajaran di satuan pendidikan swasta untuk mendukung wajib belajar 12 tahun. Selain itu, untuk memastikan mutu pendidikan terjaga, Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi juga mengembangkan Sistem Jakarta Pelatihan (Jaklat) sebagai media dalam pengembangan guru DKI Jakarta yang profesional. Lebih lanjut, upaya mendukung capaian rata-rata lama sekolah juga ditempuh melalui program Sekolah *Net Zero Carbon* untuk menginisiasi perwujudan bangunan masa depan berkonsep *green building* yang nyaman bagi peserta didik, sehingga lebih nyaman dan betah dalam mengikuti kegiatan pelajaran dan pembelajaran di satuan pendidikan.

Direkomendasikan adanya kebijakan untuk percepatan peningkatan RLS terutama di daerah-daerah yang masih belum optimal yaitu (1) Peningkatan akses,

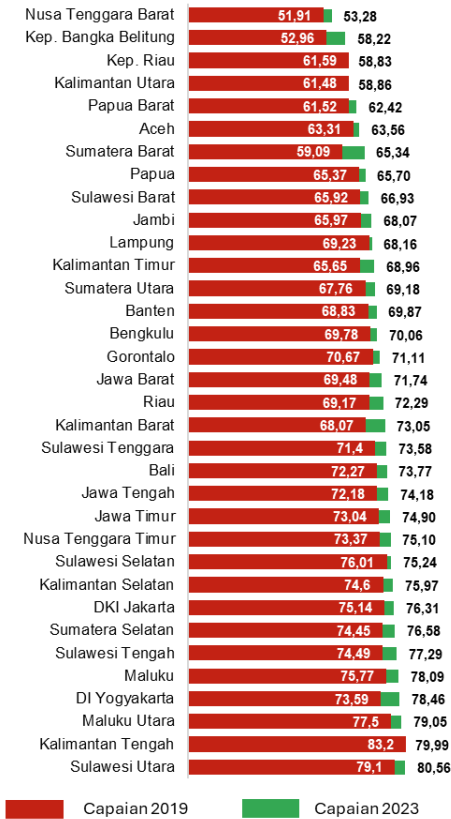
kuantitas dan kualitas layanan pendidikan (sarpras dan tenaga pendidik) terutama di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal, (2) Peningkatan pemahaman akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak usia sekolah; (3) Pengembangan pendidikan sekolah berpola asrama; dan (4) Pembangunan sekolah kecil kampung untuk peningkatan partisipasi sekolah.

Di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan), RLS mengalami peningkatan dari 6,85 tahun pada tahun 2019 menjadi 7,34 tahun pada tahun 2023. Walaupun menunjukkan tren peningkatan, angka ini masih tergolong rendah secara nasional dan mencerminkan masih adanya berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan pencapaian RLS di Provinsi Papua. Perkembangan RLS di Provinsi Papua dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama yang terkait dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi. Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian RLS di Provinsi Papua diantaranya adalah Program Wajib Belajar 12 Tahun dan Program Indonesia Pintar (PIP). Kedua program tersebut memiliki peran penting terutama dalam memberikan bantuan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program afirmasi pendidikan khusus bagi anak-anak di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), yang mencakup banyak daerah di Papua. Peningkatan pembangunan infrastruktur pendidikan, seperti sekolah-sekolah terpadu dan fasilitas asrama bagi siswa di daerah terpencil, turut menjadi faktor pendukung signifikan dalam meningkatkan RLS. Selain itu, pengiriman guru ke daerah terpencil melalui program Guru Penggerak dan Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) membantu mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas.

Namun, Provinsi Papua juga menghadapi tantangan yang signifikan dalam upaya meningkatkan RLS. Salah satu tantangan terbesar adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau, seperti daerah pegunungan dan pedalaman yang terisolasi, sehingga akses ke sekolah menjadi sangat terbatas. Infrastruktur yang belum memadai, termasuk jalan dan fasilitas transportasi, membuat banyak anak tidak dapat bersekolah secara konsisten. Selain itu, kesenjangan ekonomi yang tinggi di wilayah ini menjadi faktor penghambat utama, karena banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu terpaksa putus sekolah untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Faktor budaya juga memengaruhi, di mana pendidikan formal belum sepenuhnya dianggap prioritas dalam beberapa komunitas adat.

Indeks Pemberdayaan Gender¹⁵ (Nilai)

Gambar 3. 19 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2019 dan 2023 di 34 Provinsi (Nilai)



Sumber: BPS, (diolah)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) mengalami sedikit peningkatan dari 65,37 pada tahun 2019 menjadi 65,7 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, meskipun masih tergolong kurang optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan IDG di Provinsi Papua meliputi faktor pendukung dan tantangan spesifik yang dihadapi di Provinsi Papua.

Secara umum, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di seluruh provinsi meningkat dari tahun 2019 ke 2023, kecuali Provinsi Sulawesi Selatan, Lampung, Kalimantan Utara, Kep. Riau, dan Kalimantan Tengah.

Provinsi Sumatera Barat dan Kep. Bangka Belitung merupakan provinsi yang memiliki peningkatan IDG tertinggi.

Pada tahun 2023, Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara memiliki Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tertinggi sedangkan Provinsi NTB, Kep. Bangka Belitung dan Kep. Riau memiliki IDG terendah.

Jika dibandingkan dengan nasional, terdapat 30 Provinsi yang memiliki IDG di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemberdayaan gender sudah meningkat namun masih belum merata di seluruh provinsi atau masih terdapat kesenjangan IDG antarprovinsi.

¹⁵ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

Salah satu faktor pendukung peningkatan IDG di Provinsi Papua adalah meningkatnya keterwakilan perempuan dalam legislatif. Tingkat keterwakilan perempuan di legislatif meningkat dari 14,55 persen pada tahun 2021 menjadi 15,94 persen pada tahun 2022. Peningkatan ini secara tidak langsung mencerminkan sudah adanya komitmen terhadap kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu, perbaikan dalam dimensi kesehatan reproduksi turut berkontribusi terhadap peningkatan IDG. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan persentase wanita yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan, dari 34,8 persen pada tahun 2021 menjadi 28,2 persen pada tahun 2022. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi perempuan menjadi faktor pendukung signifikan dalam pencapaian IDG.

Namun demikian, Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan IDG. Salah satunya adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Penurunan dimensi pasar tenaga kerja menjadi salah satu penyebab meningkatnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Papua pada tahun 2023. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan, terutama di daerah terpencil, menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi mereka di sektor ekonomi formal. Selain itu, norma sosial dan budaya yang masih membatasi peran perempuan dalam ranah publik turut menghambat pemberdayaan gender di wilayah Papua.

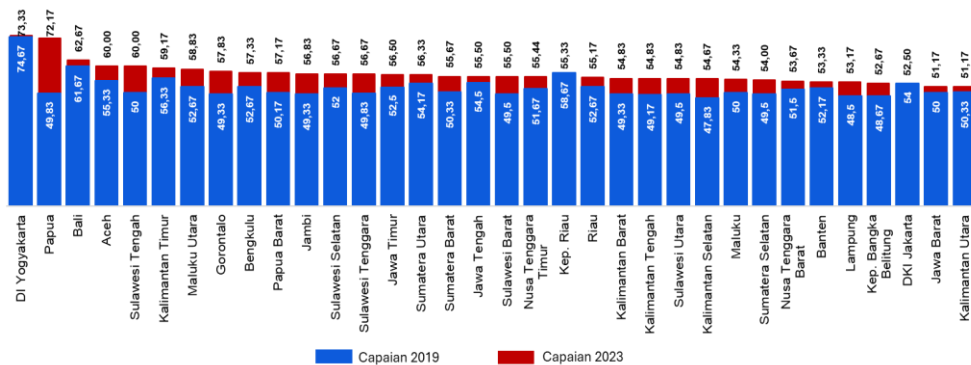
Untuk mengatasi tantangan tersebut dan mendukung peningkatan IDG di Provinsi Papua, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan perempuan. Salah satunya adalah program pelatihan keterampilan dan akses permodalan bagi perempuan, yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi kelompok perempuan. Selain itu, peningkatan akses terhadap pendidikan bagi perempuan juga menjadi salah satu prioritas, melalui program pemberian beasiswa dan pengembangan fasilitas pendidikan yang lebih baik di daerah terpencil. Dengan implementasi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan Provinsi Papua dapat terus meningkatkan pencapaian IDG dan mewujudkan kesetaraan gender yang lebih optimal di masa mendatang.

Indeks Pembangunan Pemuda¹⁶ (Nilai)

Secara umum, capaian Indeks Pembangunan Pemuda di 34 Provinsi dari tahun 2019 ke 2023 meningkat, kecuali di Provinsi Kep. Riau, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Sementara itu, Provinsi Papua memiliki peningkatan IPP yang sangat signifikan selama empat tahun terakhir.

Pada tahun 2023, Provinsi DI Yogyakarta, Papua, dan Bali merupakan daerah dengan IPP tertinggi sementara yang terendah berada pada Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Gambar 3. 20 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2019 dan 2023 di 34 Provinsi (Nilai)



Sumber Data: Kemenpora, (diolah)

Capaian domain pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan kesempatan kerja, serta gender dan diskriminasi tersebar secara merata di 34 Provinsi. Namun, sebaran capaian domain partisipasi dan kepemimpinan terkonsentrasi di wilayah Indonesia Timur. Provinsi di wilayah timur Indonesia memiliki IPP domain partisipasi dan kepemimpinan dengan klasifikasi tinggi, sementara yang rendah berada di wilayah Kalimantan.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) menunjukkan peningkatan signifikan dari 49,83 pada tahun 2019 menjadi 72,17 pada tahun 2023. Capaian ini menjadikan Papua sebagai provinsi dengan IPP tertinggi kedua secara nasional setelah Provinsi DI Yogyakarta, menunjukkan adanya kemajuan yang sangat optimal dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Papua.

¹⁶ Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah instrumen yang dapat menggambarkan capaian pembangunan pemuda di Indonesia. IPP terdiri dari 5 domain pembangunan yang di dalamnya memuat 15 indikator pembangunan pemuda. Kelima domain tersebut adalah (1) domain pendidikan, (2) domain kesehatan dan kesejahteraan, (3) domain lapangan dan kesempatan kerja, (4) domain partisipasi dan kepemimpinan, serta (5) domain gender dan diskriminasi.

Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tersebut, baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, maupun gender dan diskriminasi.

Salah satu faktor utama yang mendukung peningkatan ini adalah keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan akses dan partisipasi pemuda dalam pendidikan. Peningkatan rata-rata lama sekolah dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi di Papua telah mendorong pembangunan kapasitas individu pemuda. Selain itu, berbagai program beasiswa seperti Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) yang ditujukan untuk pemuda Papua telah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan peluang pendidikan yang lebih inklusif dan berkesinambungan.

Dari segi kesehatan dan kesejahteraan, upaya intensif pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi pemuda, termasuk penurunan angka kesakitan, persentase pemuda korban kejahatan, dan angka pernikahan usia anak, turut berkontribusi pada pencapaian IPP yang lebih tinggi. Salah satu capaian signifikan adalah penurunan angka remaja perempuan yang sedang hamil, yang mencerminkan keberhasilan kampanye kesehatan reproduksi dan upaya pencegahan pernikahan dini yang gencar dilakukan di daerah-daerah terpencil Papua.

Pada domain lapangan dan kesempatan kerja, peningkatan persentase pemuda wirausaha kerah putih dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda mencerminkan keberhasilan program-program pemberdayaan ekonomi yang dirancang khusus untuk pemuda Papua. Program seperti pelatihan kewirausahaan berbasis lokal dan pemberian akses modal usaha melalui kerjasama dengan lembaga keuangan menjadi faktor kunci dalam memperluas akses pemuda ke dunia kerja formal dan informal.

Namun demikian Provinsi Papua juga masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan pencapaian pembangunan pemuda. Salah satunya adalah kesenjangan infrastruktur yang masih membatasi akses ke pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah pedalaman Papua. Selain itu, norma-norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan dalam sektor publik juga menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi pemuda perempuan di bidang ekonomi dan politik.

d. Potret capaian indikator AP 4

Agenda Pembangunan (AP) 4 dalam RPJMN 2020 - 2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun AP 4 antara lain: (1) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK); (2) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB); serta (3) Nilai Budaya Literasi.

Gambar 3. 21 Capaian Agenda Pembangunan 4 di 34 Provinsi



Keterangan Capaian Indikator :



Ketimpangan dalam Melestarikan Budaya dan Literasi di Wilayah Timur

Secara umum, gambar diatas menunjukkan capaian revolusi mental dan pembangunan kebudayaan cukup bervariasi antardaerah. Berdasarkan tren kinerja indikator penyusun Agenda Pembangunan 4 tahun 2019 hingga 2023, kinerja Provinsi Bali, Kepulauan Riau dan DI Yogyakarta sudah lebih optimal dibandingkan provinsi lainnya. Provinsi Bali merupakan provinsi yang paling optimal dalam mencapai kinerja indikator IPK dan IKUB di tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Bali mampu menambah nilai ekonomi melalui aktivitas budaya yang dimiliki, serta menjaga toleransi, kerjasama dan kerukunan umat beragama. Sedangkan provinsi di wilayah timur memiliki kinerja yang belum optimal dalam meningkatkan revolusi mental dan membangun kebudayaan. Faktor yang menghambat kinerja tersebut disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran untuk melestarikan budaya dan masih minimnya minat literasi, sehingga dibutuhkan intervensi optimal untuk meningkatkan kualitas kebudayaan dan pendidikan di Kawasan Timur Indonesia.

Sementara itu, untuk Provinsi Papua secara umum menunjukkan capaian dengan kategori kurang optimal pada AP 4. Hal ini tidak terlepas dari capaian dari indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Nilai Budaya Literasi yang tergolong memiliki capaian yang rendah. Sementara untuk indikator Indeks Kerukunan Umat

Beragama memiliki capaian yang tergolong moderat. Berikut adalah tabel capaian indikator pada Agenda Pembangunan 4 di 34 Provinsi.

Tabel 3. 9 Capaian Indikator pada Agenda Pembangunan 4 di 34 Provinsi

NO	PROVINSI	AGENDA PEMBANGUNAN 4		
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai Budaya Literasi
1	ACEH			
2	SUMATERA UTARA			
3	SUMATERA BARAT			
4	RIAU			
5	JAMBI			
6	SUMATERA SELATAN			
7	BENGGULU			
8	LAMPUNG			
9	KEP. BANGKA BELITUNG			
10	KEP. RIAU			
11	DKI JAKARTA			
12	JAWA BARAT			
13	JAWA TENGAH			
14	DI YOGYAKARTA			
15	JAWA TIMUR			
16	BANTEN			
17	BALI			
18	NUSA TENGGARA BARAT			
19	NUSA TENGGARA TIMUR			
20	KALIMANTAN BARAT			
21	KALIMANTAN TENGAH			
22	KALIMANTAN SELATAN			
23	KALIMANTAN TIMUR			
24	KALIMANTAN UTARA			
25	SULAWESI UTARA			
26	SULAWESI TENGAH			
27	SULAWESI SELATAN			
28	SULAWESI TENGGARA			
29	GORONTALO			
30	SULAWESI BARAT			
31	MALUKU			
32	MALUKU UTARA			
33	PAPUA BARAT			
34	PAPUA			

Sumber: EPD, 2024

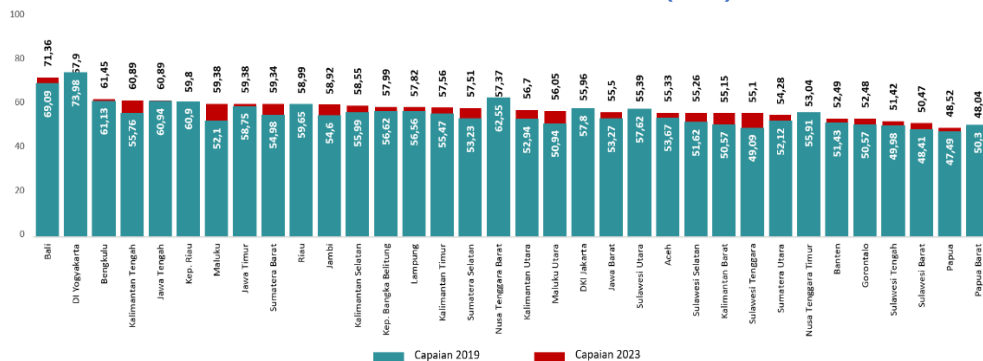
Keterangan warna pada *heatmap* merupakan perbandingan relatif antar daerah

Indeks Pembangunan Kebudayaan¹⁷ (Nilai)

Secara umum tren kinerja IPK tahun 2019 hingga 2023 di seluruh provinsi cukup fluktuatif dan cenderung meningkat. Provinsi Maluku mengalami peningkatan nilai IPK yang cukup signifikan sebesar 7,28 poin, sedangkan Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami penurunan nilai IPK yang cukup signifikan sebesar minus 6,08 poin dari tahun 2019 hingga 2023. Perlambatan kinerja IPK Provinsi D.I Yogyakarta disebabkan oleh penurunan pada aspek ekonomi budaya, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya dan literasi budaya, sedangkan hanya dimensi pendidikan dan gender yang mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan Provinsi D.I Yogyakarta tanpa disadari mulai tergeser oleh modernisasi.

Pertumbuhan IPK sempat melambat di tahun 2019 hingga 2021 karena penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar) yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Selain itu, masih ada beberapa provinsi yang capaian IPK tahun 2023 belum pulih seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19 yaitu Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Riau, NTB, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, NTT dan Papua Barat.

Gambar 3. 22 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2019 dan 2023 di 34 Provinsi (Nilai)



Sumber Data: Kemendikbudristek, (diolah)

Pada tahun 2023, provinsi dengan capaian kinerja IPK tertinggi adalah oleh Provinsi Bali, D.I Yogyakarta, dan Bengkulu. Tingginya capaian IPK Provinsi Bali didorong oleh nilai dimensi ekonomi budaya, pendidikan, warisan budaya dan gender. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Bali mengalami peningkatan aktivitas ekonomi dari hasil pemanfaatan objek budaya, upaya melestarikan budaya, serta

¹⁷ Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya, (2) dimensi pendidikan, (3) dimensi ketahanan sosial budaya, (4) dimensi warisan budaya, (5) dimensi ekspresi budaya, (6) dimensi budaya literasi, dan (7) dimensi kesetaraan gender.

terciptanya persamaan dan peluang partisipasi yang sama antara perempuan dengan laki-laki.

Selanjutnya, terdapat tiga provinsi dengan capaian IPK tahun 2023 terendah yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat. Dimensi ekonomi budaya dan warisan budaya Provinsi Papua Barat lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya, hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pemanfaatan ekonomi dan pelestarian terhadap objek budaya oleh masyarakat masih belum optimal dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, direkomendasikan penajaman intervensi yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui pelestarian budaya pada daerah-daerah yang capaiannya menurun dan belum optimal, melalui program intervensi yang menysar pendidikan, kebudayaan dan perekonomian.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) menunjukkan peningkatan dari 47,49 pada tahun 2019 menjadi 48,52 pada tahun 2023. Meskipun terdapat kenaikan, capaian ini masih tergolong kurang optimal dan menempatkan Papua sebagai provinsi dengan IPK terendah kedua secara nasional setelah Papua Barat. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, khususnya dalam dimensi Pendidikan dan Ketahanan Sosial Budaya, namun tantangan besar masih terdapat pada dimensi Ekonomi Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya.

Indeks Kerukunan Umat Beragama¹⁸ (Nilai)

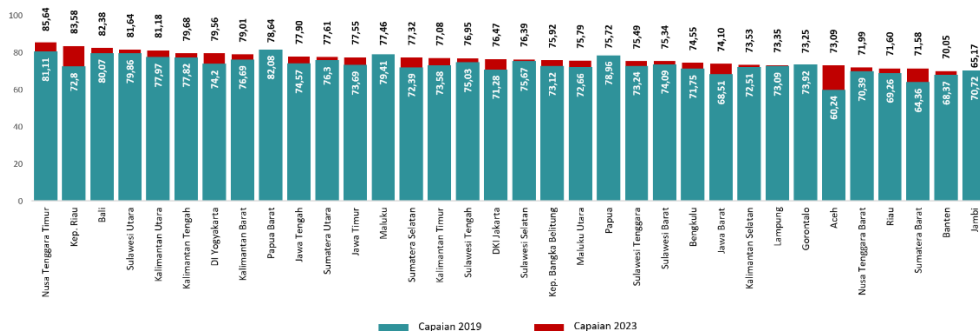
Provinsi dengan capaian IKUB tertinggi di tahun 2023 adalah Provinsi NTT, Kepulauan Riau, dan Bali. Meningkatnya aspek toleransi, kerja sama, kesetaraan, kerukunan dan keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan mendorong tingginya pencapaian IKUB.

Secara umum tren kinerja IKUB tahun 2019 hingga 2023 di seluruh provinsi cenderung meningkat. Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau mengalami peningkatan nilai IKUB yang cukup signifikan, sementara itu terdapat beberapa provinsi yang mengalami perlambatan kinerja IKUB diantaranya yaitu Provinsi Gorontalo, Maluku, Papua, Papua Barat dan Jambi.

¹⁸ Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan Indeks yang menyatakan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. Terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

Provinsi yang memperoleh capaian IKUB terendah di tahun 2023 adalah Provinsi Jambi, Banten dan Sumatera Barat. Aspek kerja sama di Provinsi Jambi memiliki nilai terendah dibandingkan aspek toleransi dan kesetaraan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan aktif, empati, dan simpati kepada kelompok lain dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan masih perlu diperkuat dalam kehidupan bermasyarakat.

Gambar 3. 23 Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019 dan 2023 di 34 Provinsi (Nilai)



Sumber Data: Kementerian Agama, (diolah)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) mengalami penurunan dari 78,96 pada tahun 2019 menjadi 75,72 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya dinamika dalam hubungan antarumat beragama di Provinsi Papua. IKUB diukur berdasarkan tiga komponen utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama.

Penurunan IKUB di Papua dipengaruhi oleh beberapa tantangan. Salah satunya adalah potensi konflik sosial yang dipicu oleh isu-isu non-agama, seperti ketidakpuasan terhadap pembangunan atau distribusi sumber daya, yang kemudian dapat merembet menjadi ketegangan antarumat beragama. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak akurat atau provokatif melalui media sosial dapat memicu kesalahpahaman dan meningkatkan sentimen negatif antar kelompok agama. Kurangnya pemahaman mendalam tentang ajaran agama lain juga dapat menimbulkan prasangka dan stereotip yang menghambat kerukunan.

Secara keseluruhan, meskipun Provinsi Papua mengalami penurunan IKUB antara tahun 2019 dan 2023, berbagai faktor pendukung seperti peran tokoh agama dan program pemerintah tetap berkontribusi positif dalam menjaga kerukunan. Namun, tantangan seperti potensi konflik sosial dan penyebaran informasi yang tidak akurat perlu terus diantisipasi melalui upaya bersama antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat.

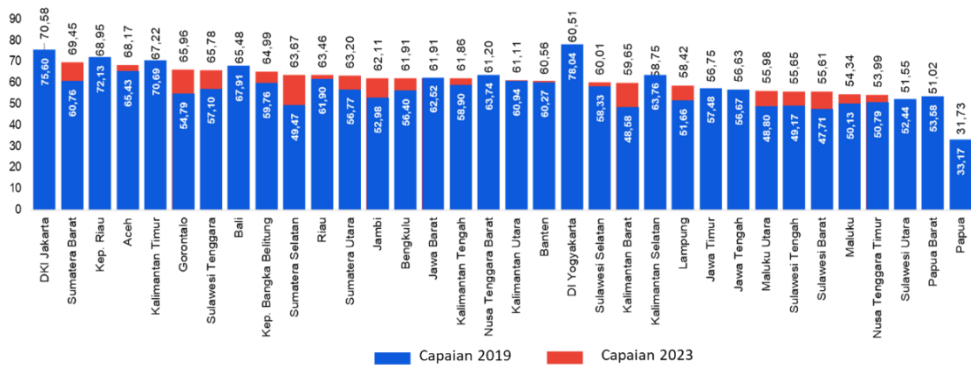
Nilai Budaya Literasi¹⁹

Provinsi Sumatera Selatan, Gorontalo, dan Kalimantan Barat mengalami tren peningkatan budaya literasi yang cukup signifikan ditahun 2019 hingga 2023, sedangkan Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami penurunan kinerja nilai budaya literasi terbesar dari tahun 2019 hingga 2023 sebesar minus 17,53.

Selain provinsi D.I Yogyakarta, provinsi dengan capaian kinerja budaya literasi yang menurun yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini diindikasikan dari tingginya arus global dan mobilitas masyarakat sehingga menurunkan nilai-nilai literasi budaya yang ada di provinsi tersebut. Provinsi dengan capaian nilai budaya literasi tertinggi pada tahun 2023 adalah Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Tingginya capaian literasi didorong oleh semakin meningkatnya media literasi melalui platform digital, meskipun jumlah kunjungan pembaca ke perpustakaan semakin menurun hampir di seluruh provinsi.

Provinsi Papua merupakan provinsi dengan nilai budaya literasi terendah di tahun 2023. Sementara itu, capaian nilai literasi budaya Provinsi Papua Barat tahun 2023 adalah sebesar 51,02 dan merupakan yang terendah kedua di wilayah Maluku-Papua. Untuk itu, direkomendasikan penajaman intervensi yang dapat meningkatkan nilai budaya literasi pada daerah-daerah yang capaiannya menurun dan belum optimal, melalui program intervensi yang menysasar dunia pendidikan.

Gambar 3. 24 Capaian Nilai Literasi Budaya Tahun 2019 dan -2023 di 34 Provinsi



Sumber Data: Kemendikbudristek, (diolah)

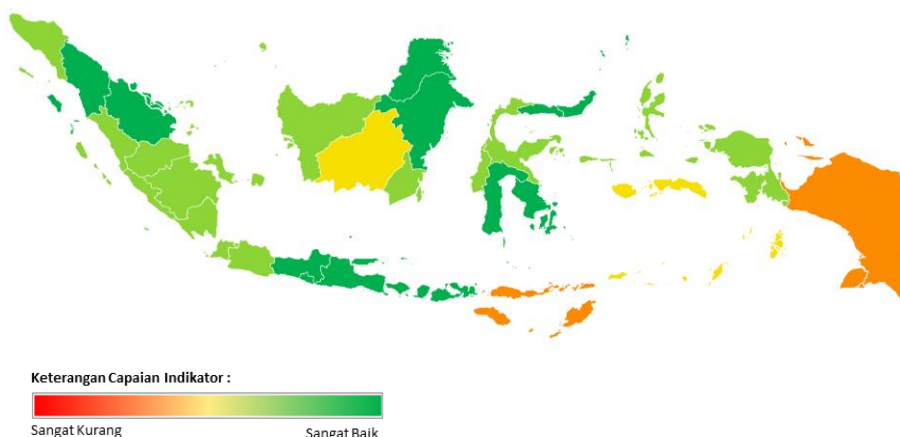
¹⁹ Nilai Budaya Literasi merupakan salah satu dimensi dalam penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Definisi operasional dari Budaya Literasi yaitu aktivitas serta sarana/prasarana pendukung untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat dalam mendapatkan suatu informasi dan pengetahuan.

Indikator Budaya Literasi di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) mengalami penurunan dari nilai 33,17 pada tahun 2019 menjadi 31,73 pada tahun 2023, yang tergolong kurang optimal dan menjadi daerah dengan capaian indikator Budaya Literasi yang terendah secara nasional. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat. Salah satunya adalah faktor rendahnya akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas. Keterbatasan infrastruktur perpustakaan dan taman bacaan masyarakat mengakibatkan minimnya fasilitas yang mendukung budaya literasi di Provinsi Papua. Selain itu, tantangan geografis dengan kondisi wilayah yang sulit dijangkau memperparah distribusi bahan bacaan ke daerah-daerah terpencil. Keterbatasan akses internet juga menjadi hambatan signifikan, mengingat indikator budaya literasi mencakup persentase penduduk yang membaca selain kitab suci, mengakses internet, dan mengunjungi perpustakaan atau taman bacaan masyarakat.

e. Potret capaian indikator AP 5

Agenda Pembangunan (AP) 5 dalam RPJMN 2020 - 2024 yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun AP 5 antara lain: (1) Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau; (2) Rasio elektrifikasi; serta (3) Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman.

Gambar 3. 25 Capaian Agenda Pembangunan 5 di 34 Provinsi



Pemerataan Layanan Dasar di Daerah 3T dan Metropolitan

Secara keseluruhan, capaian AP 5 sudah baik di seluruh provinsi kecuali di Provinsi Papua, NTT, Maluku, dan Kalimantan Tengah. Capaian optimal didukung oleh

rasio elektrifikasi yang meningkat di semua daerah. Meskipun rasio elektrifikasi meningkat, capaian mayoritas provinsi masih rendah pada indikator akses rumah tangga terhadap sanitasi serta hunian layak dan terjangkau. Tercatat bahwa daerah metropolitan DKI Jakarta memiliki persentase rumah layak huni terendah. Fenomena ini menandakan masih banyaknya permukiman kumuh di daerah perkotaan. Sedangkan untuk daerah di luar Pulau Jawa cenderung mengalami masalah yang menyeluruh, baik dari akses terhadap hunian layak dan terjangkau, akses sanitasi, serta elektrifikasi. Oleh karena itu, perlu adanya pemerataan infrastruktur secara keseluruhan di wilayah luar Pulau Jawa dan pengoptimalan akses hunian layak di kawasan metropolitan.

Secara keseluruhan dari indikator pada AP 5, Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) menunjukkan capaian kurang optimal. Indikator Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau serta indikator Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan Aman menjadi dua indikator dengan capaian paling kurang optimal pada AP 5. Sementara, untuk indikator rasio elektrifikasi menjadi indikator dengan capaian paling optimal dibandingkan indikator lainnya pada AP 5. Berikut adalah tabel capaian indikator pada Agenda Pembangunan 5 di 34 Provinsi.

Tabel 3. 10 Capaian Indikator pada Agenda Pembangunan 5 di 34 Provinsi

NO	PROVINSI	AGENDA PEMBANGUNAN 5		
		Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau	Rasio Elektrifikasi	Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan Aman
1	ACEH			
2	SUMATERA UTARA			
3	SUMATERA BARAT			
4	RIAU			
5	JAMBI			
6	SUMATERA SELATAN			
7	BENGKULU			
8	LAMPUNG			
9	KEP. BANGKA BELITUNG			
10	KEP. RIAU			
11	DKI JAKARTA			
12	JAWA BARAT			
13	JAWA TENGAH			
14	DI YOGYAKARTA			
15	JAWA TIMUR			
16	BANTEN			
17	BALI			
18	NUSA TENGGARA BARAT			
19	NUSA TENGGARA TIMUR			

NO	PROVINSI	AGENDA PEMBANGUNAN 5		
		Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau	Rasio Elektrifikasi	Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan Aman
20	KALIMANTAN BARAT			
21	KALIMANTAN TENGAH			
22	KALIMANTAN SELATAN			
23	KALIMANTAN TIMUR			
24	KALIMANTAN UTARA			
25	SULAWESI UTARA			
26	SULAWESI TENGAH			
27	SULAWESI SELATAN			
28	SULAWESI TENGGARA			
29	GORONTALO			
30	SULAWESI BARAT			
31	MALUKU			
32	MALUKU UTARA			
33	PAPUA BARAT			
34	PAPUA			

Sumber: EPD, 2024

Keterangan warna pada *heatmap* merupakan perbandingan relatif antar daerah

Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak dan Terjangkau²⁰ (%)

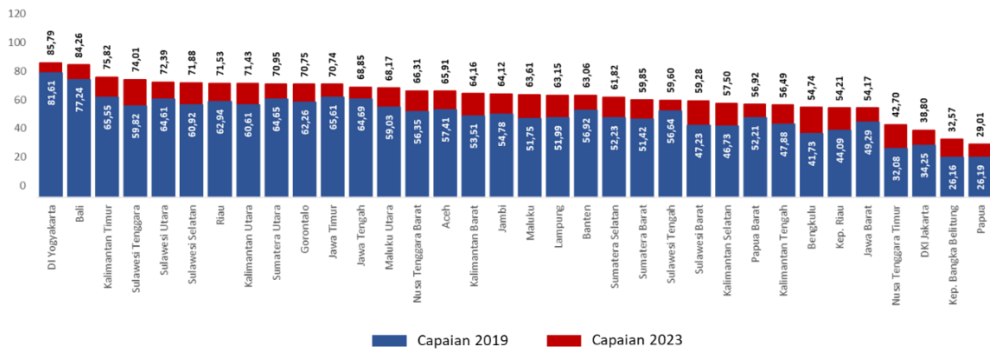
Kriteria hunian layak adalah terpenuhinya aspek ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses ke air minum dan sanitasi layak, serta keterjangkauan dan keamanan bermukim. Secara nasional, dalam rentang waktu 2019 – 2023 rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan kinerja peningkatan capaian rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau dalam 5 tahun terakhir (2019 – 2023), Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang signifikan pada akses hunian layak dan terjangkau (meningkat 14,19 persen).

Provinsi dengan capaian tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan capaian 85,79 persen. Sedangkan terdapat 4 provinsi dengan capaian terendah antara Provinsi Papua, dengan capaian terakhir pada 2023 sebesar 29,01 persen, disusul Provinsi Bangka Belitung (2023: 32,57 persen), Provinsi DKI Jakarta (2023: 38,8 persen), dan Provinsi NTT (2023: 42,7 persen) dengan capaian masih di bawah 50 persen. Sementara itu, capaian rumah tangga yang menempati

²⁰ Kriteria hunian layak didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

hunian layak dan terjangkau Provinsi Papua Barat tahun 2023 adalah sebesar 56,92 persen.

Gambar 3. 26 Capaian Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2019 dan 2023 di 34 Provinsi (%)



Sumber Data: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah)

Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat akses hunian layak dan terjangkau di provinsi-provinsi di atas adalah faktor kondisi geografis khususnya di wilayah pegunungan dan kepulauan, minimnya sarana prasarana pendukung, biaya konstruksi yang tinggi, faktor keragaman budaya, serta kondisi demografi dan kepadatan penduduk. Direkomendasikan adanya kebijakan yang dapat menyasar pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, seperti sanitasi, air bersih, dan air minum, serta bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin di daerah terpencil dapat sesuai standar.

Capaian indikator rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di Provinsi Papua mengalami peningkatan dari 26,19 persen pada tahun 2019 menjadi 29,01 persen pada tahun 2023. Meskipun ada peningkatan, capaian ini masih tergolong rendah dan menjadi yang terendah secara nasional. Peningkatan yang terjadi salah satunya didukung oleh sejumlah program dan kebijakan yang diimplementasikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu faktor pendukung utama adalah pelaksanaan program nasional seperti Program Sejuta Rumah yang berfokus pada penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Papua juga telah berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan perumahan layak huni melalui program pembangunan rumah swadaya dan subsidi perumahan, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil dan tertinggal.

Rasio Elektrifikasi²¹

Sebagian besar provinsi memiliki capaian rasio elektrifikasi telah mendekati 100 persen pada tahun 2023. Rasio elektrifikasi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 99,79 persen. Provinsi DKI Jakarta dan Bali menjadi provinsi dengan rasio elektrifikasi tertinggi yaitu 100 persen di tahun 2023. Hal ini menandakan akses ketenagalistrikan sudah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di kedua provinsi tersebut

Gambar 3. 27 Distribusi Capaian Rasio Elektrifikasi Tahun 2023 di 34 Provinsi



Sumber Data: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah)

Beberapa provinsi dengan rasio elektrifikasi belum mencapai 99 persen antara lain Provinsi Papua Selatan (98,96 persen), Kalimantan Tengah (97,75 persen), Maluku (97,16 persen), Nusa Tenggara Timur (95,27 persen), Papua Tengah (94,19 persen), dan Papua Pegunungan (93,82 persen). Beberapa faktor yang menghambat capaian elektrifikasi antara lain terkendala terbatasnya aksesibilitas, belum optimalnya jangkauan ketenagalistrikan, serta tantangan geografis (pegunungan dan kepulauan). Pemenuhan akses listrik di daerah sulit aksesibilitas dapat dilakukan melalui pembangunan sumber energi terbarukan sesuai dengan kondisi daerah, seperti penggunaan panel surya, tenaga angin, tenaga air, dan panas bumi.

Capaian rasio elektrifikasi Provinsi Papua Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar 98,96 persen. Hingga akhir Desember 2023, menurut Kementerian ESDM, masih terdapat 16 desa di Papua Selatan yang belum berlistrik.

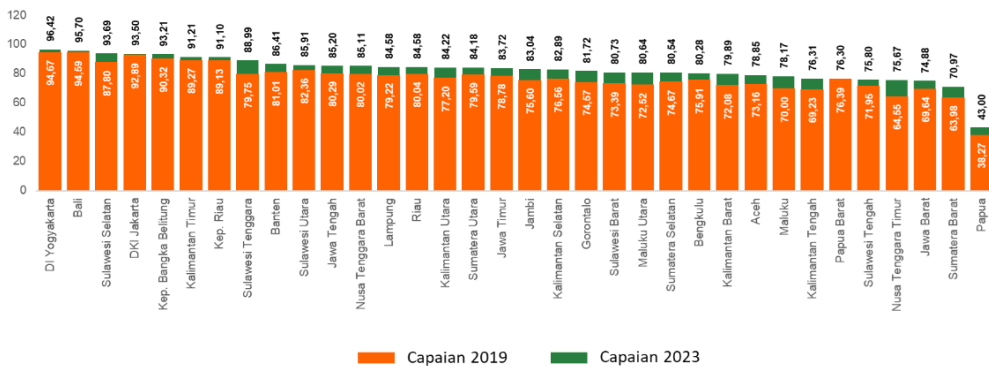
²¹ Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total.

Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman²² (%)

Provinsi DI Yogyakarta merupakan daerah dengan capaian rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) tertinggi nasional sedangkan Provinsi Papua merupakan daerah dengan capaian terendah nasional pada tahun 2023.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan kinerja terbaik secara nasional dibuktikan dengan peningkatan tertinggi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (meningkat 11,12 persen) dalam lima tahun terakhir (2019 - 2023). Hal ini tidak lepas dari upaya seluruh pihak, baik pusat maupun daerah termasuk kontribusi mitra pembangunan (*non-state actor*) dalam pemenuhan infrastruktur sanitasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 3. 28 Capaian Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman Tahun 2019 – 2023 di 34 Provinsi (%)



Keterangan: Angka merupakan data capaian 2019 dan 2023

Sumber Data: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah)

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang berkinerja baik karena dapat mengintegrasikan layanan air limbah domestik menjadi salah satu lini bisnis di BUMD Air Minum. Walaupun secara umum terjadi peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2019, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan capaian terendah nasional sebesar 43,00 persen pada tahun 2023. Provinsi

²² Rumah tangga disebut mengakses sanitasi yang aman (*safely managed*) apabila fasilitas sanitasi digunakan hanya ART sendiri dengan jenis kloset berupa leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Papua Barat mengalami penurunan sebesar 0,09 persen selama tahun 2019-2023. Penurunan disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan hunian, serta kondisi geografis yang mengakibatkan sulitnya pemerataan akses sanitasi. Direkomendasikan kebijakan ke depan agar tetap mendorong peningkatan dan pemerataan infrastruktur sanitasi khususnya di wilayah Papua agar dapat mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya.

Indikator rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) menunjukkan peningkatan dari 38,27 persen pada tahun 2019 menjadi 43 persen pada tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan, namun capaian Provinsi Papua masih menjadi yang terendah secara nasional. Adapun tantangan yang dihadapi dalam peningkatan indikator tersebut di Provinsi Papua diantaranya diakibatkan oleh faktor faktor geografis yang ekstrem, seperti medan yang sulit dijangkau dan tersebarinya pemukiman di wilayah terpencil. Hal ini menyebabkan proses pembangunan infrastruktur sanitasi membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar dibandingkan wilayah lain. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, dan sumber daya air bersih menjadi hambatan signifikan.

Tantangan lainnya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat di beberapa wilayah tentang pentingnya sanitasi yang aman, sehingga perilaku seperti buang air besar sembarangan atau pembuangan limbah domestik yang tidak sesuai standar masih umum terjadi. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang sanitasi, terutama di tingkat lokal, untuk mendukung pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi yang telah dibangun.

Di sisi lain, beberapa faktor pendukung yang berkontribusi terhadap peningkatan indikator ini antara lain adalah implementasi program-program nasional dan daerah seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) serta Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Program-program ini dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang aman dan berkelanjutan, terutama di wilayah pedalaman dan pedesaan yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses. Selain itu, dukungan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan daerah, khususnya untuk pembangunan infrastruktur sanitasi seperti instalasi pengolahan air limbah domestik dan perbaikan fasilitas sanitasi umum, turut berperan dalam peningkatan indikator tersebut.

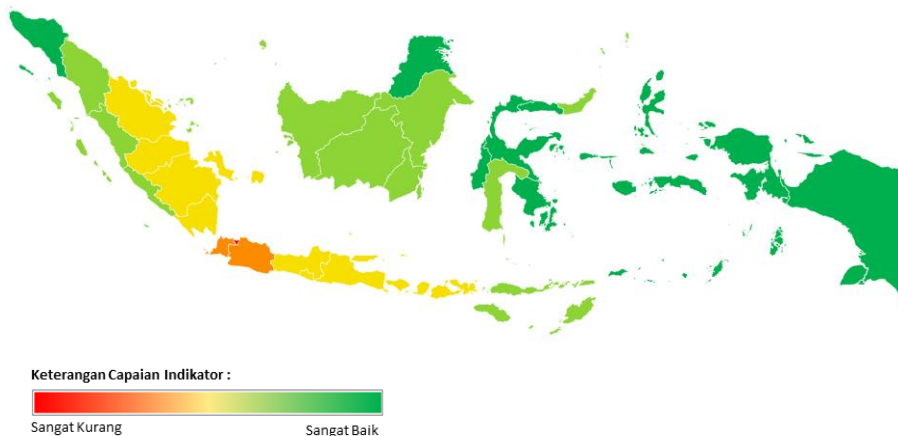
Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan yang lebih terintegrasi dan berbasis kebutuhan lokal. Salah satunya adalah fokus pada pemberdayaan masyarakat adat Papua melalui pendekatan budaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan lembaga donor internasional

untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Dengan upaya kolaboratif yang berkelanjutan, diharapkan indikator rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak di Papua diharapkan akan terus meningkat secara signifikan di masa mendatang.

f. Potret capaian indikator AP 6

Agenda Pembangunan (AP) 6 dalam RPJMN 2020 - 2024 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun AP 6 yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Gambar 3. 29 Capaian Agenda Pembangunan 6 di 34 Provinsi



Implementasi Ekonomi Hijau sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Ke Depan

Selama lima tahun terakhir, capaian pada Agenda Pembangunan (AP) 6 dalam RPJMN 2020-2024 menunjukkan mayoritas daerah memiliki kinerja yang sudah cukup optimal terutama di wilayah Timur Indonesia seperti Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, dan Provinsi Kalimantan Utara. Sementara kinerja AP 6 wilayah Jawa menjadi daerah dengan rata-rata capaian terendah khususnya untuk Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Daya dukung lingkungan yang rendah, aktivitas ekonomi yang kurang ramah lingkungan dan eksternalitas negatif dari adanya fenomena *urban sprawl* memperburuk kondisi lingkungan di berbagai daerah tersebut. Berikut adalah tabel capaian indikator pada Agenda Pembangunan 6 di 34 Provinsi.

Secara keseluruhan dari indikator pada AP 6, Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) menunjukkan capaian berkategori paling optimal. Capaian pada AP 6 terefleksi dari capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Papua yang tergolong sudah cukup baik jika dibandingkan dengan capaian daerah lainnya.

Tabel 3. 11 Capaian Indikator pada Agenda Pembangunan 6 di 34 Provinsi

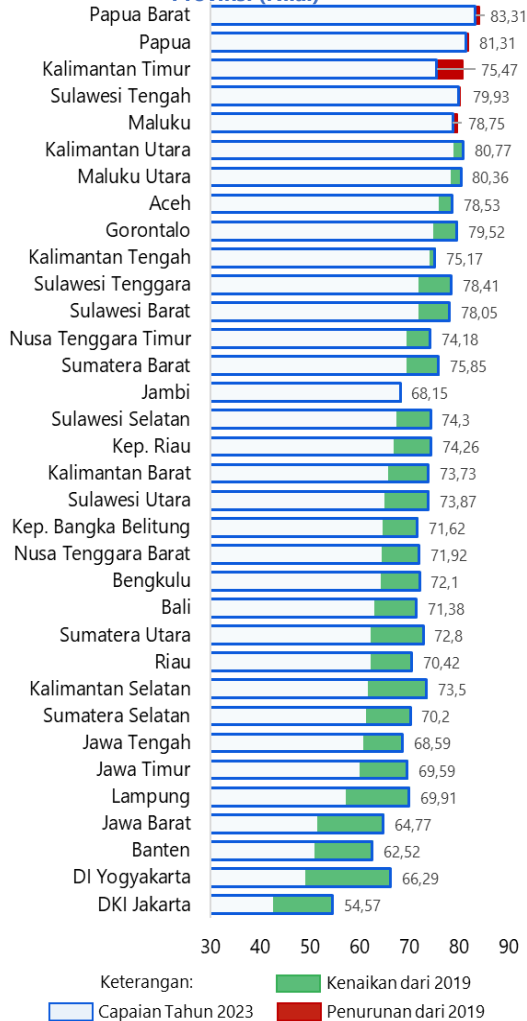
NO	PROVINSI	AGENDA PEMBANGUNAN 6
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
1	ACEH	
2	SUMATERA UTARA	
3	SUMATERA BARAT	
4	RIAU	
5	JAMBI	
6	SUMATERA SELATAN	
7	BENGKULU	
8	LAMPUNG	
9	KEP. BANGKA BELITUNG	
10	KEP. RIAU	
11	DKI JAKARTA	
12	JAWA BARAT	
13	JAWA TENGAH	
14	DI YOGYAKARTA	
15	JAWA TIMUR	
16	BANTEN	
17	BALI	
18	NUSA TENGGARA BARAT	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	
20	KALIMANTAN BARAT	
21	KALIMANTAN TENGAH	
22	KALIMANTAN SELATAN	
23	KALIMANTAN TIMUR	
24	KALIMANTAN UTARA	
25	SULAWESI UTARA	
26	SULAWESI TENGAH	
27	SULAWESI SELATAN	
28	SULAWESI TENGGARA	
29	GORONTALO	
30	SULAWESI BARAT	
31	MALUKU	
32	MALUKU UTARA	
33	PAPUA BARAT	
34	PAPUA	

Sumber: EPD, 2024

Keterangan warna pada *heatmap* merupakan perbandingan relatif antar daerah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup²³ (Nilai)

Gambar 3. 30 Tren Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2023 di 34 Provinsi (Nilai)



Sumber Data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (diolah)

Berdasarkan tren lima tahun terakhir (2019 - 2023), peningkatan tertinggi IKLH provinsi adalah Provinsi D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, dan Lampung. Namun, ketiga provinsi tersebut termasuk dalam lima provinsi dengan IKLH terendah di tahun 2019.

Beberapa faktor pendorong terjadinya peningkatan yang signifikan dari provinsi dengan IKLH yang rendah dalam lima tahun terakhir antara lain yaitu pengendalian pencemaran lingkungan yang diperketat, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, serta kolaborasi antar *stakeholders* dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan (Kementerian LHK, 2023). Direkomendasikan kebijakan ke depan agar tetap mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup di provinsi-provinsi tersebut agar dapat mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya.

Cukup berbanding terbalik, berdasarkan tren lima tahun terakhir (2019 - 2023), provinsi yang mengalami penurunan IKLH antara lain Provinsi Kalimantan

²³ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Timur, Maluku, Papua Barat, Papua, dan Sulawesi Tengah. Provinsi – provinsi tersebut merupakan lima provinsi dengan IKLH tertinggi di tahun 2019.

Beberapa faktor yang memengaruhi penurunan IKLH di lima provinsi tersebut antara lain yaitu dipengaruhi oleh meningkatnya kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi suatu daerah terutama pada sektor industri pengolahan, pertambangan, perdagangan, dan jasa (Dinas LH Provinsi Kalimantan Timur, 2023), sehingga ke depan direkomendasikan agar kebijakan peningkatan aktivitas ekonomi dapat lebih memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2023 yang mencapai angka 81,31 tergolong sebagai capaian yang optimal jika dibandingkan secara relatif dengan daerah lainnya. Pencapaian ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung. Salah satunya adalah tingginya luas tutupan hutan di Provinsi Papua, yang berkontribusi secara signifikan terhadap Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Tutupan hutan yang masih terjaga menjadi penyumbang besar dalam menyerap karbon, mengatur siklus hidrologi, serta melestarikan keanekaragaman hayati. Upaya konservasi hutan, termasuk program restorasi dan pengelolaan kawasan konservasi, telah berperan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem di wilayah tersebut.

Faktor pendukung lainnya adalah keberhasilan dalam menjaga kualitas udara, yang tercermin melalui tingginya Indeks Kualitas Udara (IKU). Hal ini didukung oleh rendahnya aktivitas industri berat dan rendahnya emisi polutan udara di Papua. Keberadaan kawasan yang jauh dari aktivitas urbanisasi yang masif membantu menjaga kualitas udara yang baik, yang menjadi salah satu indikator penyusun IKLH. Selain itu, peningkatan pengelolaan kawasan pesisir dan laut juga menjadi faktor pendukung yang signifikan, terutama dalam meningkatkan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Pemerintah daerah bersama dengan kementerian terkait telah melaksanakan program konservasi ekosistem pesisir, seperti mangrove dan terumbu karang, serta mengontrol pencemaran laut yang berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan laut.

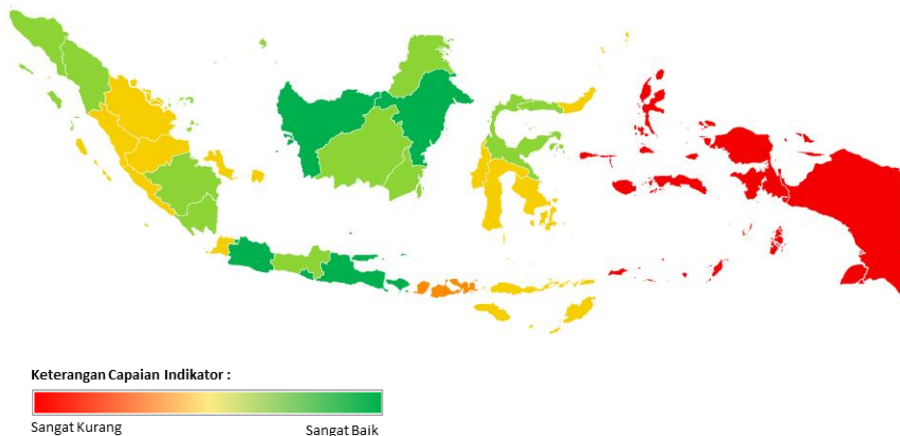
Di sisi lain, Provinsi Papua juga dihadapi oleh tantangan penurunan kualitas lingkungan hidup. Hal ini terefleksi dari enurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Papua dari 81,79 pada tahun 2019 menjadi 81,31 pada tahun 2023. Salah satu faktor utama yang memengaruhi penurunan ini adalah penurunan Indeks Kualitas Air (IKA), yang menurun dari 57,83 pada tahun 2021 menjadi 55,07 pada tahun 2022. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan pencemaran pada sumber-sumber air di wilayah Papua. Selain itu, ancaman aktivitas eksploitasi sumber

daya alam seperti praktik penambangan dan pembalakan liar yang terjadi turut berpotensi menyebabkan peningkatan degradasi lingkungan, termasuk pencemaran air dan kerusakan ekosistem. Perubahan penggunaan lahan, seperti alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian atau permukiman tanpa perencanaan yang matang, juga mengurangi tutupan lahan hijau yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah Papua

g. Potret capaian indikator AP 7

Agenda Pembangunan (AP) 7 dalam RPJMN 2020 - 2024 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun AP 7 yaitu: Indeks Demokrasi Provinsi.

Gambar 3. 31 Capaian Agenda Pembangunan 7 di 34 Provinsi



Indeks Demokrasi Indonesia di Kawasan Timur Indonesia masih belum optimal

Secara keseluruhan, capaian Agenda Pembangunan 7 sudah cukup baik dengan didominasi warna hijau dan kuning. Provinsi DKI Jakarta, Bali dan DIY memiliki capaian yang sangat baik dengan warna hijau tua jika dibandingkan provinsi lainnya. Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan didominasi dengan capaian yang sudah baik (hijau). Capaian di Pulau Sumatra dan Sulawesi didominasi dengan warna kuning atau capaiannya cukup. Sementara itu capaian agenda pembangunan di pulau maluku dan papua berwarna merah atau capaiannya masih sangat kurang untuk agenda pembangunan 7.

Secara keseluruhan dari indikator pada AP 7, Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) menunjukkan capaian berkategori kurang optimal. Capaian pada AP 7 terefleksi dari capaian indikator Indeks Demokrasi Provinsi di Provinsi Papua yang

tergolong rendah. Berikut adalah tabel capaian indikator pada Agenda Pembangunan 7 di 34 Provinsi.

Tabel 3. 12 Capaian Indikator pada Agenda Pembangunan 7 di 34 Provinsi

NO	PROVINSI	AGENDA PEMBANGUNAN 7
		Indeks Demokrasi Provinsi
1	ACEH	
2	SUMATERA UTARA	
3	SUMATERA BARAT	
4	RIAU	
5	JAMBI	
6	SUMATERA SELATAN	
7	BENGKULU	
8	LAMPUNG	
9	KEP. BANGKA BELITUNG	
10	KEP. RIAU	
11	DKI JAKARTA	
12	JAWA BARAT	
13	JAWA TENGAH	
14	DI YOGYAKARTA	
15	JAWA TIMUR	
16	BANTEN	
17	BALI	
18	NUSA TENGGARA BARAT	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	
20	KALIMANTAN BARAT	
21	KALIMANTAN TENGAH	
22	KALIMANTAN SELATAN	
23	KALIMANTAN TIMUR	
24	KALIMANTAN UTARA	
25	SULAWESI UTARA	
26	SULAWESI TENGAH	
27	SULAWESI SELATAN	
28	SULAWESI TENGGARA	
29	GORONTALO	
30	SULAWESI BARAT	
31	MALUKU	
32	MALUKU UTARA	
33	PAPUA BARAT	
34	PAPUA	

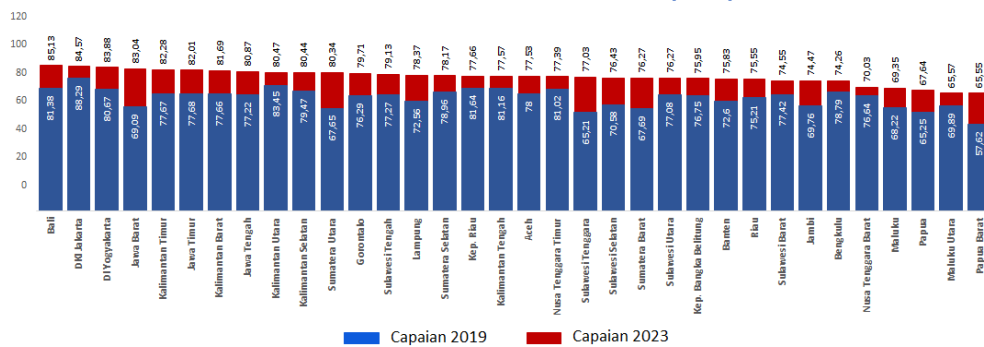
Sumber: EPD, 2024

Keterangan warna pada **heatmap** merupakan **perbandingan relatif antar daerah**

Indeks Demokrasi Indonesia²⁴ (Nilai)

Secara umum tren kinerja IDI tahun 2019 hingga 2023 di seluruh provinsi cenderung meningkat. Provinsi yang mengalami peningkatan terbesar yaitu Provinsi Jawa Barat sebesar 13,95 poin, kemudian Provinsi Sumatera Utara sebesar 12,69 poin, dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 11,82 poin. Aspek kebebasan menjadi aspek terbesar yang mendorong tingginya tingkat demokrasi di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara, sementara aspek kesetaraan menjadi aspek terbesar yang mendorong tingginya demokrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gambar 3. 32 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2019 dan 2023 di 34 Provinsi (Nilai)



Sumber Data: BPS, (diolah)

Selain itu, tiga provinsi dengan tren penurunan IDI tertinggi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 6,61 poin, Provinsi Bengkulu sebesar 4,53 poin, dan Provinsi Maluku Utara sebesar 4,32 poin. Hal ini disebabkan oleh penyebaran hoaks yang masih marak dan masif, serta kemajuan perkembangan teknologi yang cukup cepat. Selain itu, isu demokrasi yang negatif ketika musim pemilu juga diindikasikan menjadi penyebab menurunnya tingkat Indeks Demokrasi di beberapa daerah.

Pada tahun 2023, capaian IDI tertinggi berada pada Provinsi Bali, DKI Jakarta, dan D.I. Yogyakarta, sedangkan capaian terendah berada pada Provinsi di wilayah timur yaitu Papua Barat, Maluku Utara, Papua, dan Maluku. Oleh karena itu, direkomendasikan penajaman intervensi terkait penguatan demokrasi terutama pada aspek kapasitas lembaga demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) menunjukkan peningkatan dari 65,25 pada tahun 2019 menjadi 67,64 pada tahun

²⁴ Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan tiga aspek yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi.

2023. Meskipun demikian, capaian ini masih tergolong kurang optimal dan menempatkan Papua sebagai daerah dengan peringkat IDI terendah ketiga secara nasional pada tahun 2023. IDI mengukur perkembangan demokrasi melalui tiga aspek utama, yaitu Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi.

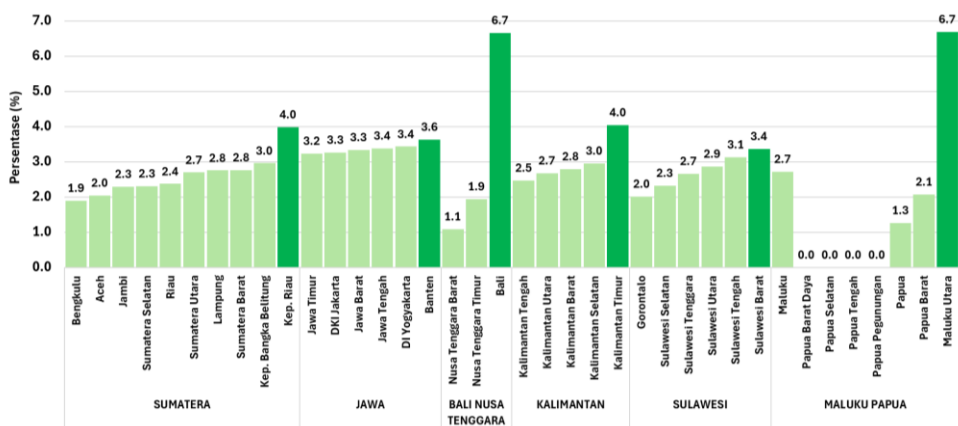
Beberapa faktor penghambat dari kurang optimalnya pencapaian IDI di Provinsi Papua, diantaranya disebabkan keterbatasan akses informasi dan partisipasi politik bagi masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, dinamika sosial dan politik di Papua, termasuk isu keamanan dan konflik lokal, dapat mempengaruhi stabilitas lembaga demokrasi dan pelaksanaan hak-hak politik. Kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai juga menjadi hambatan dalam mengoptimalkan fungsi lembaga demokrasi di tingkat lokal.

Di sisi lain, peningkatan IDI di Papua dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Salah satunya adalah upaya pemerintah daerah dalam menjamin kebebasan sipil, termasuk kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat. Implementasi kebijakan yang mendukung hak-hak tersebut berkontribusi pada peningkatan skor aspek Kebebasan Sipil. Selain itu, adanya program-program yang mendorong partisipasi politik masyarakat, seperti sosialisasi pemilu dan pendidikan politik, turut memperkuat aspek Hak-Hak Politik.

3. 3. Evaluasi Kontribusi

a. Laju pertumbuhan ekonomi

Gambar 3. 33 Evaluasi Kontribusi Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Periode 2020-2023



Sumber: BPS, diolah

Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19 Ditopang oleh Pemulihan Ekonomi di Daerah

Kontribusi daerah terhadap capaian laju pertumbuhan ekonomi nasional periode 2020-2023 menunjukkan besaran yang bervariasi, mengingat masing-masing provinsi mengalami fase pemulihan yang berbeda-beda pasca terkena dampak pandemi Covid-19 yang pertama kali muncul di awal tahun 2020. Secara umum, kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik proyek pembangunan nasional yang dilaksanakan di masing-masing provinsi. Proyek-proyek pemerintah yang berfokus pada pengembangan pariwisata, pembangunan kawasan industri untuk mendukung sektor perdagangan, serta pembangunan infrastruktur transportasi yang meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, ditambah dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk menarik investasi di sektor energi, tidak hanya telah memperkuat peran sejumlah provinsi sebagai pusat ekonomi regional, tetapi juga memperkuat posisi masing-masing provinsi dalam berkontribusi terhadap capaian laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Bali dan Maluku Utara Berkontribusi Paling Tinggi dalam Pertumbuhan Perekonomian Nasional Periode 2020 – 2023

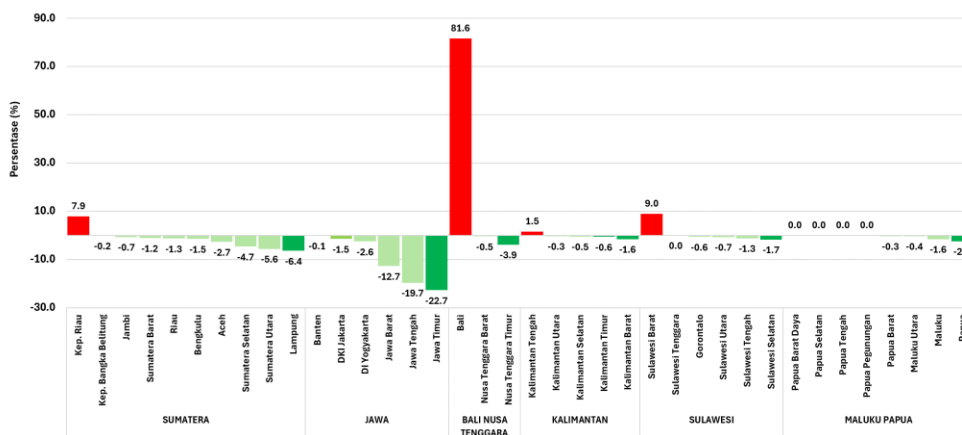
Angka PDB Riil Nasional meningkat dari Rp10.722 triliun (2020) menjadi Rp12.301 triliun (2023) dengan rata-rata mencapai 4,68 persen per tahun selama periode 2020-2023. Provinsi Bali dan Maluku Utara menjadi provinsi dengan kontribusi paling tinggi dalam peningkatan LPE Nasional selama periode 2020 – 2023. Dari sisi kewilayahan, rata-rata provinsi yang berada di Wilayah Jawa memiliki kontribusi sebesar 3,4 persen dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional, diikuti oleh Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (3,2 persen), Kalimantan (3,0 persen), Sulawesi (2,7 persen), Sumatra (2,6 persen), serta Maluku dan Papua (1,6 persen). Provinsi Bali, meskipun terkena dampak pandemi yang signifikan, mulai pulih dengan proyek revitalisasi pariwisata seperti pengembangan kawasan wisata Nusa Dua serta pembangunan infrastruktur termasuk bandara internasional. Sedangkan Provinsi Maluku Utara, selain dipengaruhi aktivitas hilirisasi pertambangan nikel juga terjadi peningkatan konektivitas dan akses pasar melalui proyek pengembangan pelabuhan dan infrastruktur di Ternate yang turut berkontribusi mendukung perekonomian nasional lewat pertumbuhan sektor perikanan dan pariwisata.

Sepanjang tahun 2020 hingga 2023, seluruh provinsi di wilayah Maluku dan Papua termasuk Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) memberikan kontribusi

positif terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, kontribusi pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Papua selama periode ini hanya sebesar 1,3 persen, menjadikannya kontribusi tertinggi ketiga di antara provinsi-provinsi di Pulau Maluku dan Papua.

b. Tingkat kemiskinan

Gambar 3. 34 Evaluasi Kontribusi Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Nasional Periode 2020-2023



Sumber: BPS, diolah

Perlinsos menjadi Faktor Penting Penurunan Tingkat Kemiskinan

Kontribusi daerah terhadap capaian penurunan angka kemiskinan nasional periode 2020-2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang memungkinkan banyak sektor usaha dapat kembali beroperasi; (2) Program jaminan sosial dan bantuan sosial dari pemerintah membantu masyarakat yang terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka; (3) Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan; (4) Program pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM guna meningkatkan kapasitas dan akses pasar; (5) Program pelatihan dan pendampingan bagi petani untuk meningkatkan hasil pertanian dan diversifikasi tanaman praktik pertanian yang ramah lingkungan; serta (6) Dampak sosial dari pengembangan infrastruktur desa dimana hal tersebut turut memperbaiki aksesibilitas dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat. Faktor-faktor di atas telah meningkatkan pendapatan dan akses terhadap layanan dasar pada sektor rumah tangga secara signifikan selama periode 2020-2023, sehingga sebagian besar masyarakat berangsur-angsur dapat keluar dari kemiskinan – khususnya di Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua.

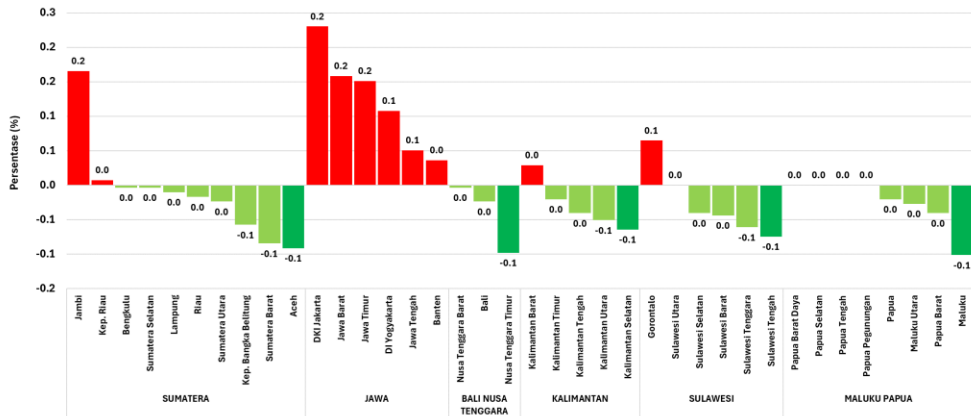
Jawa Timur Berkontribusi Paling Signifikan dalam Penurunan Kemiskinan Nasional Periode 2020 – 2023

Tingkat Kemiskinan Nasional menurun dari 10,19 persen (2020) menjadi 9,36 persen (2023) terhadap total populasi penduduk miskin, yang berarti bahwa tingkat kemiskinan nasional rata-rata berkurang 0,03% per tahun selama periode 2020-2023. Provinsi Jawa Timur berkontribusi sebesar 22,7 persen terhadap total penurunan tingkat kemiskinan nasional. Sebaliknya, Provinsi Bali berkontribusi sebesar 81,6 persen dalam perlambatan penurunan tingkat kemiskinan nasional. Secara kewilayahan, rata-rata provinsi di Wilayah Jawa memiliki kontribusi sebesar 9,9 persen dalam upaya menurunkan perubahan TK nasional selama periode 2020-2023, diikuti oleh provinsi-provinsi di Sumatra (1,6%), Maluku dan Papua (0,6%), serta Kalimantan (0,3%). Adapun Wilayah Bali-Nusa Tenggara dan Sulawesi justru berkontribusi meningkatkan perubahan TK nasional dalam periode yang sama, yakni masing-masing secara rata-rata sebesar 25,8 persen dan 0,8 persen. Ketergantungan Provinsi Bali pada sektor pariwisata yang terdampak parah oleh pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Meskipun selanjutnya terjadi pemulihan ekonomi, faktor ketidakpastian dan fluktuasi dalam kunjungan wisatawan turut memengaruhi ketersediaan lapangan kerja. Untuk Provinsi Papua Barat berkontribusi positif terhadap penurunan kemiskinan nasional selama tahun 2020 hingga 2023 sebesar 0,3 persen.

Selama periode 2020-2023, Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) memberikan kontribusi positif terbesar terhadap penurunan kemiskinan nasional sebesar 2,5 persen, menjadikannya kontributor tertinggi pertama di wilayah Maluku dan Papua. Kendati secara kontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, namun penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua sempat mengalami dinamika khususnya pada tahun 2020 ketika terjadi pandemi Covid-19.

c. Rasio gini

Gambar 3. 35 Evaluasi Kontribusi Provinsi Terhadap Rasio Gini Nasional Periode 2020-2023



Sumber: BPS, diolah

Wilayah Jawa Berkontribusi Paling Tinggi pada Kenaikan Ketimpangan Nasional Periode 2020 – 2023

Angka Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan Rasio Gini Nasional meningkat dari 0,381 (2020) menjadi 0,388 (2023), yang berarti bahwa angka rasio gini nasional rata-rata meningkat 0,002 poin per tahun selama periode 2020-2023. Provinsi DKI Jakarta berkontribusi sebesar 23,0 persen dari total penurunan poin indeks yang terjadi. Rata-rata provinsi yang berada di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki kontribusi sebesar 4,2 persen dalam upaya menurunkan perubahan rasio gini nasional selama periode 2020-2023, diikuti oleh Wilayah Kalimantan (2,9 persen), Sulawesi (2,6 persen), Maluku dan Papua (2,4 persen), serta Sumatra (1,2 persen). Adapun provinsi-provinsi yang berada di Wilayah Jawa justru berkontribusi dalam peningkatan rasio gini nasional dalam periode yang sama, yakni rata-rata sebesar 12,2 persen. Peningkatan ketimpangan pendapatan yang terjadi di Wilayah Jawa lebih banyak didorong oleh faktor urbanisasi dan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja di sektor usaha formal yang mengakibatkan terdesaknya para pekerja ke dalam sektor informal dengan tawaran upah rendah.

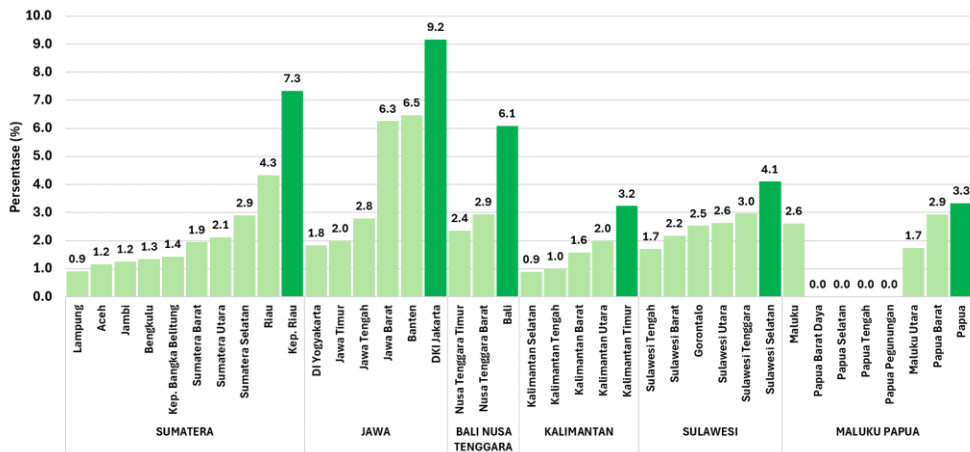
Urbanisasi di Wilayah Perkotaan Tidak Diiringi Peningkatan Kesempatan Kerja

Kontribusi daerah terhadap capaian rasio gini nasional periode 2020-2023 menunjukkan besaran yang bervariasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Respons pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 terhadap

sektor perekonomian yang berakibat pada peningkatan ketimpangan dan relatif berlangsung lebih cepat bagi masyarakat kelompok berpendapatan tinggi daripada kelompok berpendapatan rendah; (2) Adanya lonjakan inflasi akibat dislokasi ekonomi dan ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi sektoral, gangguan rantai pasokan, kebijakan stimulus fiskal dan moneter yang diberikan oleh pemerintah dan bank sentral sebagai respons terhadap terkait pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan lebih besar kepada kelompok berpendapatan rendah dan berujung pada berkurangnya daya beli; (3) Adanya perubahan kebijakan tarif dan insentif perpajakan yang mempengaruhi daya beli, tetapi tidak berpengaruh pada distribusi kekayaan kelompok pendapatan tertentu; dan (4) Faktor struktural seperti urbanisasi yang cepat dan meningkatnya biaya hidup di perkotaan, tetapi tidak diikuti oleh pembukaan kesempatan kerja dengan penawaran nilai upah yang lebih baik. Untuk Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) merupakan kontributor terbesar pertama di Wilayah Maluku Papua dalam menurunkan rasio gini Nasional pada tahun 2020 hingga 2023.

d. Tingkat pengangguran terbuka

Gambar 3. 36 Evaluasi Kontribusi Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional Periode 2020-2023



Sumber: BPS, diolah

Jakarta dan Kep. Riau Berkontribusi Paling Signifikan dalam Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional Periode 2020 – 2023

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional menurun dari 7,07 persen (2020) menjadi 5,32 persen (2023) terhadap total angkatan kerja, yang

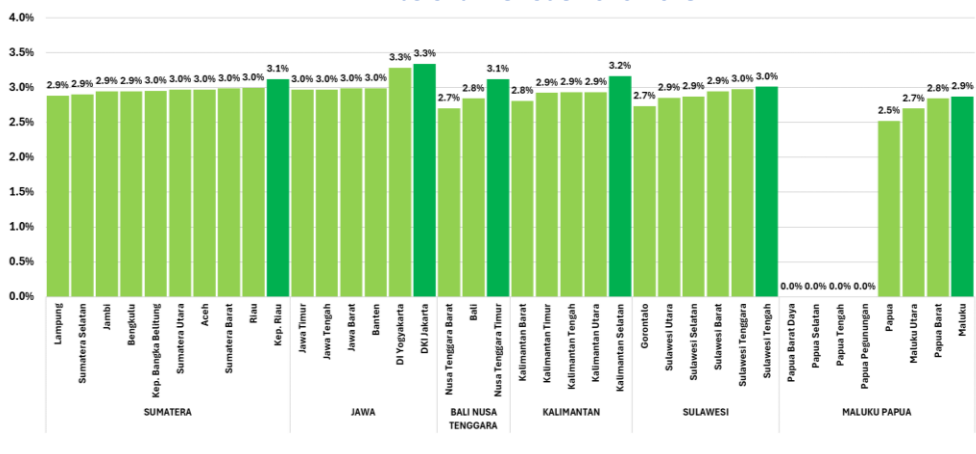
berarti bahwa angka TPT nasional rata-rata berkurang 0,09 persen per tahun selama periode 2020-2023. Provinsi DKI Jakarta berkontribusi sebesar 9,2 persen dari total realisasi penurunan persentase angka TPT nasional, diikuti Provinsi Kep. Riau dengan kontribusi sebesar 7,3 persen. Rata-rata provinsi yang berada di Wilayah Jawa memiliki kontribusi sebesar 4,7 persen dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka nasional selama periode 2020-2023, diikuti oleh provinsi-provinsi di Bali dan Nusa Tenggara (3,8 persen), Sulawesi (2,7 persen), Sumatra (2,5 persen), Kalimantan (1,7 persen), serta Maluku dan Papua (1,3 persen). Pemulihan sektor pariwisata dan perdagangan pasca Covid-19 menjadi pendorong utama penurunan TPT di Provinsi Kep. Riau.

Pemulihan Sektor Pariwisata dan Perdagangan Pasca Covid-19 sebagai Faktor Pendukung Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Daerah

Kontribusi daerah terhadap capaian penurunan angka TPT nasional periode 2020-2023 menunjukkan besaran yang bervariasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 di berbagai sektor ekonomi (misal, pariwisata dan perdagangan), lebih banyak lapangan kerja yang mulai tercipta berkat dukungan program pemerintah yang meliputi pelatihan kerja, bantuan subsidi upah, dan pengembangan kewirausahaan. Selain itu, terjadi pergeseran struktur ekonomi menuju tren digitalisasi yang membuat sektor-sektor ekonomi menjadi lebih produktif dalam menciptakan jenis pekerjaan baru. Di sisi lain, adanya tantangan dalam upaya mengurangi pengangguran berupa peningkatan jumlah angkatan kerja yang pesat terutama di kalangan generasi muda. Dari sisi kontribusi terhadap penurunan TPT nasional, Provinsi Papua selama tahun 2020 hingga 2023 mampu berkontribusi positif sebesar 3,3 persen terhadap upaya penurunan TPT nasional. Kontribusi positif Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) juga merupakan yang tertinggi pertama di wilayah Maluku dan Papua. Namun dilihat dari sisi kontribusinya tergolong relatif kecil dibandingkan berbagai daerah di wilayah lain seperti di wilayah Sumatra dan Jawa.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Gambar 3. 37 Evaluasi Kontribusi Provinsi Terhadap Indeks Pembangunan Nasional Periode 2020-2023



Sumber: BPS, diolah

Jakarta Berkontribusi Paling Tinggi pada Kenaikan IPM Nasional Periode 2020 – 2023

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional meningkat dari 72,81 (2020) menjadi 74,39 (2023), yang berarti bahwa angka IPM nasional rata-rata bertambah 0,395 poin per tahun selama periode 2020-2023. Provinsi DKI Jakarta berkontribusi paling tinggi sebesar 3,3 persen dari total kenaikan poin indeks yang terjadi. Rata-rata provinsi yang berada di Pulau Jawa memiliki kontribusi sebesar 3,1 persen dalam upaya menaikkan angka IPM nasional selama periode 2020-2023, diikuti oleh provinsi-provinsi di Sumatra (3,0%), Kalimantan (3,0%), Bali dan Nusa Tenggara (2,9%), Sulawesi (2,4%), serta Maluku dan Papua (1,4%). Peningkatan IPM di Jakarta didorong oleh penyediaan program-program pendidikan yang lebih inklusif, peningkatan layanan kesehatan, dan kebijakan pengembangan perkotaan berkelanjutan (misalnya, perumahan dan akses transportasi umum). Secara umum, seluruh provinsi di Indonesia mengalami tren peningkatan IPM dalam periode 2020-2023. Untuk Provinsi Papua Barat, merupakan kontributor terbesar kedua di Wilayah Maluku – Papua dalam meningkatkan IPM Nasional pada tahun 2020 hingga 2023 setelah Provinsi Maluku yaitu berkontribusi sebesar 2,8 persen.

Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Mengakselerasi Peningkatan Aspek Pengeluaran

Kontribusi daerah terhadap capaian peningkatan IPM nasional periode 2020-2023 menunjukkan besaran yang bervariasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1) Pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 berperan penting dalam meningkatkan kembali pendapatan masyarakat; (2) Pelaksanaan program pemerintah yang berfokus pada perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan (misalnya, program vaksinasi) dimana hal tersebut berkontribusi pada peningkatan harapan hidup masyarakat; (3) Adanya peningkatan akses pendidikan melalui program beasiswa dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat; (4) Kebijakan ekonomi pemerintah – salah satunya investasi infrastruktur dasar – yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Sepanjang tahun 2020 hingga 2023 Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya peningkatan IPM nasional. Namun demikian, Provinsi Papua juga menjadi daerah dengan kontribusi positif terhadap peningkatan IPM tertinggi secara wilayah atau sebesar 2,9 persen.

“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”



BAB IV

Hasil Evaluasi RKP

“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”

BAB IV HASIL EVALUASI RKP

4.1 Kinerja Makro RKP 2023

a. Hasil Skoring Kinerja Capaian Daerah

Skoring kinerja capaian pembangunan daerah dalam EKPD 2023 dihitung berdasarkan empat indikator perbandingan yaitu: (1) perbandingan terhadap target RKP Kewilayahan; (2) perbandingan terhadap target RKPD; (3) perbandingan terhadap realisasi tahun 2022; dan (4) perbandingan dengan wilayah setara. Terdapat tiga target pada RKP Kewilayahan RKP tahun 2023 yaitu pertumbuhan ekonomi (LPE), tingkat kemiskinan (TK), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Sementara pada target RKPD, terdapat lima indikator yang dibandingkan yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini (RG), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tabel di bawah ini menunjukkan hasil skoring kinerja capaian Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) tahun 2023.

Tabel 4.1 Skoring Kinerja Capaian Tahun 2023 (*)

Indikator Pembanding	Indikator				
	LPE (%)	TK (%)	TPT (%)	RG	IPM
Capaian 2023	5,22	26,03	2,67	0,386	63,01
I. Sasaran RKP					
1.1 Target	8,70	24,23	3,12		
1.2 Capaian Kinerja	60,0%	92,5%	114,4%		
1.3 Skor	2	3	3		
II. Sasaran RKPD					
2.1 Target	5,75	20,00	2,16	0,385	65,00
2.2 Capaian Kinerja	90,8%	69,9%	76,4%	99,6%	96,9%
2.3 Skor	3	2	2	3	3
III. Realisasi 2022					
3.1 Capaian 2022	8,97	26,80	2,83	0,393	62,16
3.2 Rasio 2023/2022	58,2%	103,0%	106,0%	101,8%	101,4%
3.3 Skor	1	2	2	2	3
IV. Wilayah Setara					
4.1 Rerata Wilayah	6,69	17,20	4,10	0,341	69,16
4.2 Capaian Kinerja	78,0%	48,7%	134,9%	86,7%	91,1%
4.3 Skor	1	1	3	1	1

Keterangan: (*) Masih menggunakan hasil skoring Provinsi Papua
Sumber: Hasil EKPD 2023

Berdasarkan capaian kinerja Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan), indikator LPE masih perlu dioptimalkan, dimana capaiannya belum mencapai target RKP Kewilayahan, tidak lebih baik dibandingkan tahun 2022, dan lebih rendah dibandingkan wilayah setara. Namun, indikator LPE Provinsi Papua sudah mencapai 90 persen target RKPD.

Selanjutnya, skoring kinerja untuk indikator TK Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) juga masih perlu dioptimalkan, dimana capaiannya belum mencapai sasaran RKPD. Kemudian, capaiannya masih perlu dioptimalkan kembali jika dibandingkan realisasi tahun 2022, dan masih lebih tinggi dibandingkan wilayah setara. Namun demikian, capaian TK Provinsi Papua sudah mencapai 90 persen target RKP Kewilayahan.

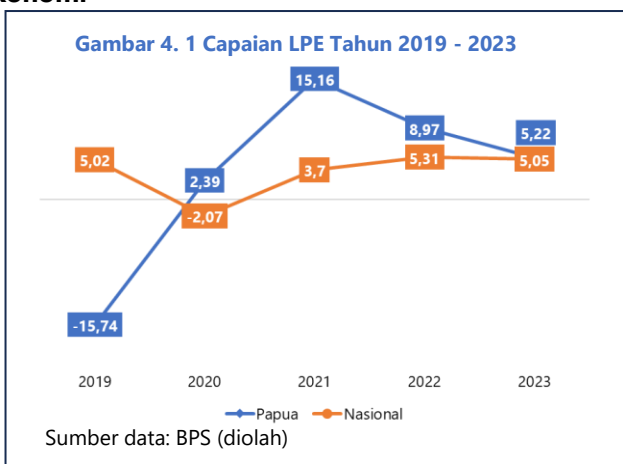
Kemudian, skoring kinerja untuk indikator TPT Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) sudah cukup optimal. Capaiannya sudah melebihi target RKP Kewilayahan dan lebih rendah dibandingkan wilayah setara. Namun, belum mencapai target RKPD dan perlu dioptimalkan jika dibandingkan realisasi tahun 2022.

Skoring kinerja untuk indikator RG Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) masih perlu dioptimalkan. Walaupun capaiannya sudah mencapai 90 persen target, namun masih perlu dioptimalkan jika dibandingkan capaian 2022 dan masih lebih tinggi dibandingkan wilayah setara.

Terakhir, skoring kinerja untuk indikator IPM Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) sudah cukup baik. Capaiannya sudah mencapai 90 persen target RKPD, melebihi capaian 2022. Namun, masih perlu dioptimalkan jika dibandingkan wilayah setara.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode 2019 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi Papua (termasuk Papua Selatan) cukup fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada tahun 2019 sempat mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu sebesar 15,74 persen. Hal ini dipicu oleh penurunan produksi

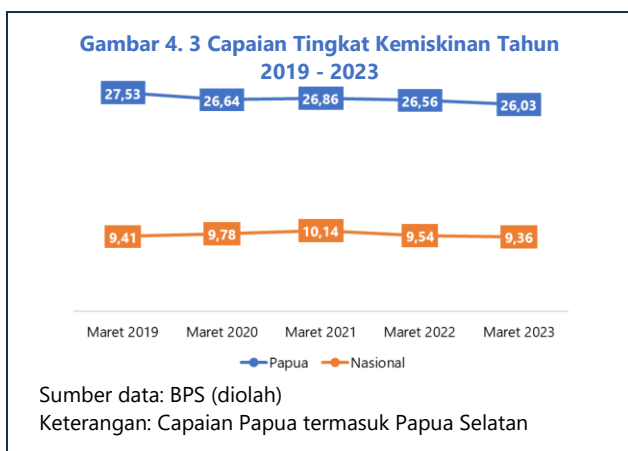


pertambangan akibat transisi tambang terbuka ke tambang bawah tanah. Namun demikian, adanya persiapan pelaksanaan PON Papua tahun 2020 dapat menahan kontraksi ekonomi Papua lebih dalam lagi.

Kemudian terus menguat hingga tahun 2021 mencapai 15,16 persen. Kemudian hingga 2023 terus tumbuh namun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. LPE Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2023 sebesar 5,22 persen. Hal ini disebabkan karena terjadinya pertumbuhan yang positif pada semua lapangan usaha walupun beberapa lapangan usaha melambat jika dibandingkan dengan tahun 2022. Tiga Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi tahun 2023 diantaranya Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,37 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,78 persen; serta Jasa Perusahaan sebesar 6,88 persen.

Menurut data BPS Papua, struktur PDRB Papua menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 39,64 persen; diikuti oleh Konstruksi sebesar 13,44 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,08 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,32 persen; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,05 persen.

c. Tingkat Kemiskinan

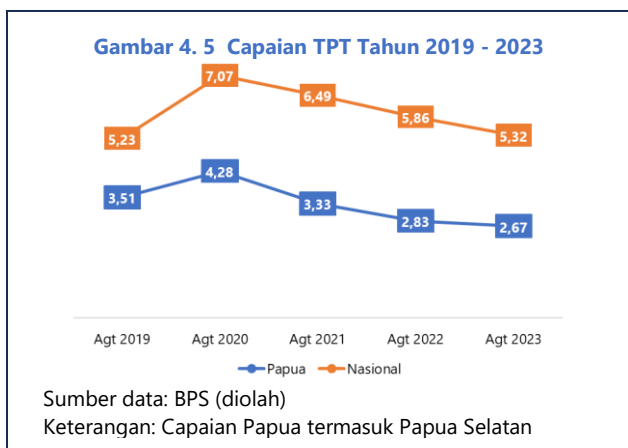


Tingkat kemiskinan Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada periode 2019 hingga 2023 terus menurun walaupun cukup stagnan penurunannya yaitu sebesar 1,5 poin persentase. Tingkat kemiskinan Papua (termasuk Papua Selatan) tahun 2023 sebesar 26,03 persen dan mengalami penurunan kurang signifikan

dari tahun 2022 (26,80 persen). Berdasarkan skoring capaian kinerja tahun 2023, Provinsi Papua belum mampu menekan angka kemiskinan dengan tingkat ketercapaian kinerja terhadap target dan sasaran RKP tahun 2023, RKPD tahun 2023, dan rerata wilayah yang masih di bawah 100 persen, hanya tingkat ketercapaian kinerja untuk sasaran realisasi 2022 yang sudah lebih dari 100 persen. Target RKPD 2023 tingkat kemiskinan di Provinsi Papua mencapai 20 persen sepertinya sangat berat direalisasikan. Hal ini karena pada bulan Maret 2023 tingkat kemiskinan di Papua baru mencapai 26,03 persen, yang berarti harus dapat diturunkan hingga 6 persen selama periode Maret sampai dengan September 2023. Tingkat kemiskinan Provinsi Papua masih jauh di atas rata-rata nasional. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama untuk mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan di Papua secara umum.

Di daerah-daerah pegunungan dan dataran rendah yang belum memiliki sarana dan prasarana dasar yang memadai dan jauh dari pusat pelayanan pemerintah provinsi. Pada kabupaten/kota daerah pegunungan dan dataran rendah umumnya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Papua. Seperti di tahun 2022, tercatat Kabupaten Deyiai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Mamberamo Tengah, semua daerah ini memiliki tingkat kemiskinan di atas 35 persen, sementara untuk Provinsi Papua sebesar 26,80 persen. Paling tinggi adalah Kabupaten Intan Jaya (42,03 persen) dan Kabupaten Deyiai (40,31 persen).

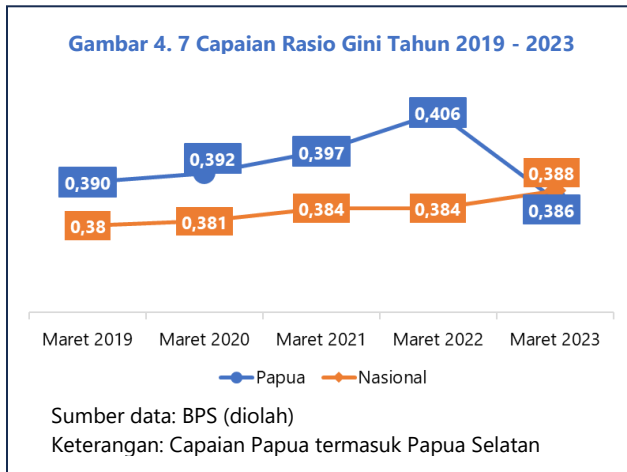
d. Tingkat Pengangguran Terbuka



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua pada periode 2019 hingga 2023 terus menurun. Pada tahun 2023, TPT Provinsi Papua mengalami penurunan menjadi 2,67 persen. Berdasarkan skoring capaian kinerja tahun 2023, Provinsi Papua mampu menurunkan TPT dan mencapai target untuk target

RKP 2023 dan rerata wilayah setara. Tingkat ketercapaian kinerja di atas 100 persen untuk sasaran RKP, realisasi 2022 dan wilayah setara sedangkan capaian RKPD 2023 masih di bawah 100 persen yaitu hanya 76,4 persen. Perbaikan ini didorong oleh kinerja pemerintah yaitu dengan mengoptimalkan program stimulus berupa penyaluran subsidi seperti kartu sembako, kartu prakerja, dan lainnya, ditambah dengan percepatan dan perluasan stimulus kredit lanjutan kepada sektor riil. Dengan mengembangkan sektor riil yang besar dan bersentuhan langsung dengan ekonomi masyarakat maka akan dimungkinkan terjadi reversal level ekonomi menuju level yang lebih baik lagi dengan relatif waktu yang lebih singkat. Pemerintah daerah harus dapat menggunakan belanja daerahnya dengan tepat sasaran karena belanja daerah merupakan salah satu penggerak konsumsi yang lebih tinggi, dan mendorong kembalinya sektor lapangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.

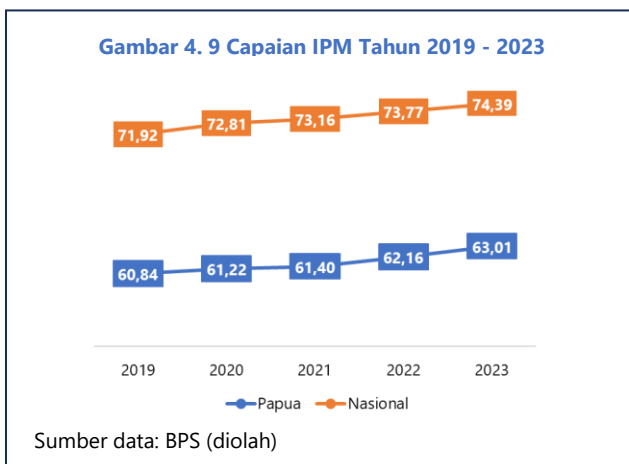
e. Rasio gini



Capaian rasio gini Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada periode 2019 hingga 2022 cenderung meningkat. Kemudian, pada tahun 2023 rasio gini Provinsi Papua adalah 0,386. Berdasarkan skoring capaian kinerja tahun 2023, Provinsi Papua belum optimal dalam menekan angka rasio gini karena belum mencapai

target sasaran RKPD 2023 dan wilayah setara dan capaian kinerjanya masih di bawah 100 persen, namun pada realisasi tahun 2022 capaian kinerja sudah diatas 100 persen. Ketimpangan yang tinggi sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peningkatan kriminalitas atau konflik sosial. Adapun Langkah pemerintah daerah dalam menanggulangi ketimpangan tersebut adalah dengan massif merencanakan dan melakukan pembangunan jembatan dan jalan di berbagai daerah terpencil agar masyarakat dapat memiliki akses ke berbagai daerah, hal tersebut dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Bersama dengan dinas setempat. Salah satu yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah dengan adanya jalan Trans Papua dan Jembatan Yotefa. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan peningkatan distribusi listrik ke daerah yang belum terjangkau listrik..

f. Indeks Pembangunan Manusia



Indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada periode 2019 hingga 2023 terus meningkat. Namun capaian tersebut masih jauh berada di bawah nasional. Pada tahun 2023, IPM Provinsi Papua mengalami kenaikan dan tercatat sebesar 63,01 jika dibandingkan dengan

realisasi tahun 2022. Berdasarkan skoring capaian kinerja tahun 2023, Provinsi Papua sudah cukup optimal dalam meningkatkan IPM karena telah mencapai target sasaran realisasi 2022 yang capaian kinerjanya sudah di atas 100 persen, namun capaian untuk wilayah setara hanya 91,1 persen. Peningkatan IPM ini didorong oleh kinerja pemerintah yaitu dengan memprioritaskan peningkatan kualitas SDM melalui: 1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; 2) Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas; 3) Penanganan stunting; 4) Pendidikan Afirmasi Papua. Arah kebijakan pembangunan papua tahun 2024 – 2026 yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif.

4. 2 Kinerja Makro RKP 2024

a. Hasil Skoring Kinerja Capaian Daerah

Skoring kinerja capaian pembangunan daerah dalam EKPD 2024 dihitung berdasarkan lima indikator pembandingan yaitu: (1) perbandingan terhadap target RKP Kewilayahan; (2) perbandingan terhadap target RKPD; (3) perbandingan terhadap realisasi tahun 2023; (4) perbandingan dengan wilayah setara; dan (5) perbandingan dengan nasional. Terdapat tiga target pada RKP Kewilayahan RKP tahun 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi (LPE), tingkat kemiskinan (TK), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Sementara pada target RKPD, terdapat lima indikator yang dibandingkan yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini (RG), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tabel di bawah ini menunjukkan hasil skoring kinerja capaian Provinsi Papua Selatan tahun 2024.

Tabel 4. 2 Skoring Kinerja Capaian Tahun 2024

Indikator Pembanding	Indikator				
	LPE (%)	TK (%)	TPT (%)	RG	IPM
Capaian 2024	4,55	17,44	4,05	0,404	68,86
I. Sasaran RKP					
1.1 Target	4,65	23,75	2,25		
1.2 Capaian Kinerja	97,8%	126,6%	20,0%		
1.3 Skor	3	3	1		
II. Sasaran RKPD					
2.1 Target	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2.2 Capaian Kinerja					
2.3 Skor					
III. Realisasi 2023					
3.1 Capaian 2023	4,27	n.a.	n.a.	n.a.	68,24
3.2 Rasio 2024/2023	106,6%				100,9%
3.3 Skor	3				2
IV. Wilayah Setara					
4.1 Rerata Wilayah	7,03	19,20	4,11	0,350	68,22
4.2 Capaian Kinerja	64,8%	109,2%	101,5%	84,5%	100,9%
4.3 Skor	1	2	2	1	2
V. Nasional					
5.1 Capaian Nasional	5,03	9,03	4,91	0,379	75,02
5.2 Capaian Kinerja	90,5%	6,9%	117,5%	93,4%	91,8%
5.2 Skor	1	1	2	1	1

Keterangan: data RKPD Provinsi Papua Selatan tahun 2024 tidak tersedia

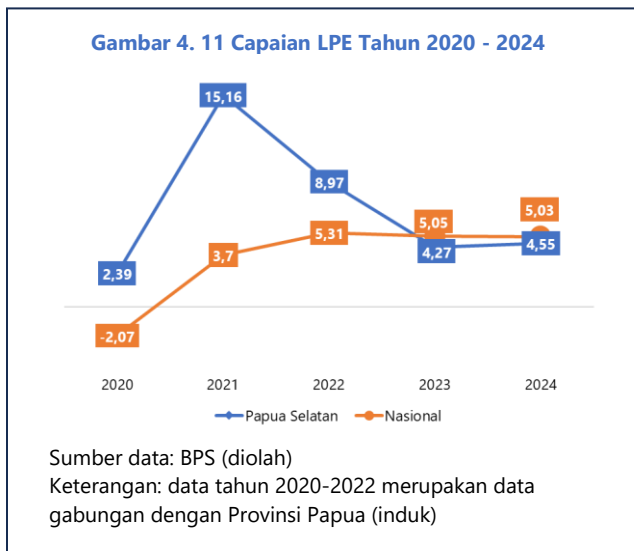
Sumber: EPD, 2024

Berdasarkan skoring hasil kinerja, indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Selatan pada tahun 2024 masih perlu dioptimalkan. LPE Provinsi Papua Selatan sudah mencapai lebih dari 90 persen target RKP kewilayahan dan lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Namun demikian, perlu dioptimalkan jika dibandingkan capaian wilayah setara dan nasional.

Kemudian, untuk skoring kinerja indikator tingkat kemiskinan Provinsi Papua Selatan menunjukkan kinerja yang perlu dioptimalkan juga. Walaupun sudah mencapai target RKP Kewilayahan, namun masih perlu dioptimalkan jika dibandingkan capaian wilayah setara dan nasional.

Selanjutnya, untuk skoring kinerja indikator TPT Provinsi Papua Selatan menunjukkan kinerja yang belum optimal, dimana belum mencapai 90% target RKP kewilayahan, wilayah setara dan capaian nasional. Lebih lanjut, untuk skoring kinerja rasio gini Provinsi Papua Selatan menunjukkan kinerja yang perlu dioptimalkan karena capaiannya masih lebih tinggi dibandingkan capaian wilayah setara, dan capaian nasional. Terakhir, skoring kinerja untuk indikator IPM Papua Selatan juga masih perlu dioptimalkan terutama jika dibandingkan capaian nasional, wilayah setara dan realisasi tahun sebelumnya.

b. Laju pertumbuhan ekonomi



Provinsi Papua Selatan merupakan daerah pemekaran dari Provinsi Papua. Capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Selatan selama dua tahun terakhir terus menguat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Selatan pada dua tahun terakhir masih berada di bawah nasional.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Selatan tahun 2024 sebesar 4,55 persen sementara capaian nasional sebesar 5,03 persen. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan aktivitas pada seluruh lapangan usaha terlihat dari pertumbuhan positif seluruh sektor. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,08 persen; Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,45 persen; serta Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 6,54 persen.

Struktur perekonomian Papua Selatan dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2024 masih menunjukkan komposisi yang sama dengan tahun 2023. Lapangan Usaha Konstruksi masih menjadi kontributor terbesar pada perekonomian Papua Selatan sebesar 23,21 persen; diikuti Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,51 persen; serta Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,81 persen.

Sementara itu, struktur PDRB Papua Selatan menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2024 didominasi oleh Komponen PK-RT, yaitu sebesar 73,10 persen. Kontributor terbesar selanjutnya adalah Komponen PMTB dengan sumbangan sebesar 35,97 persen; diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa dengan kontribusi sebesar 31,07 persen; Komponen PK-P sebesar 23,67 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,33 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB mempunyai distribusi yang juga besar, yaitu sebesar 64,68 persen. Hal ini menunjukkan ekonomi Papua Selatan masih sangat tergantung dari produk impor.

Berdasarkan spasial, kontribusi PDRB Kabupaten Merauke menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Provinsi Papua Selatan yaitu sebesar 61 persen, sementara 29 persen lainnya disumbang oleh tiga kabupaten lain yaitu Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, dan Kab. Asmat. Perekonomian Kab. Merauke dikontribusikan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor konstruksi; serta sektor perdagangan besar dan eceran.

Selain itu, terdapat beberapa faktor pendukung pertumbuhan ekonomi di Papua Selatan yaitu (1) peningkatan konsumsi rumah tangga; (2) peningkatan kinerja ekspor nontambang seperti komoditas kayu olahan; (3) adanya peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN untuk pengembangan pabrik gula dan bioethanol di Papua Selatan.

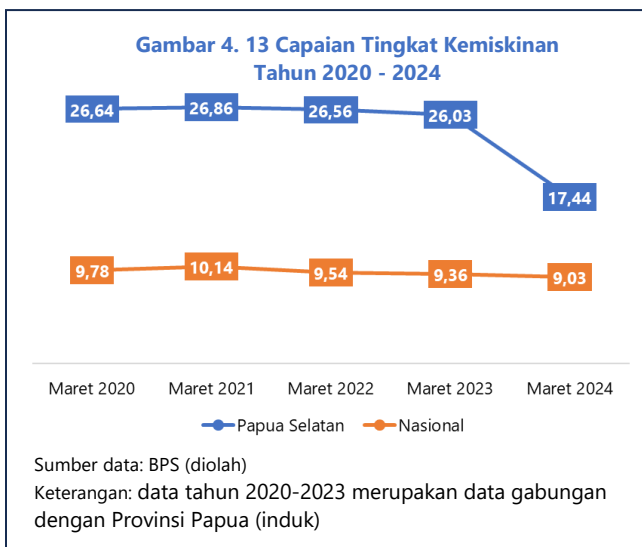
Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang menghambat tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Selatan yaitu (1) Perlambatan kinerja sektor pertanian karena adanya pergeseran masa panen. Secara pangsa, produksi padi didominasi di Papua Selatan dengan pangsa sebesar 99% di antara Wilayah Papua lainnya; (2) Belum optimalnya konektivitas wilayah; (3) Kualitas dan daya saing SDM yang masih rendah; dan (4) Konektivitas dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi kendala utama dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor industri.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terdapat beberapa rekomendasi ke depan yaitu (1) Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis SDA (pertanian, perkebunan, dan perikanan) (Kementan, KemenKP, Dinas KUMKM dan Perindag, DPPKP); (2) Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarwilayah (KemenPU, DPUPR); (3) Melakukan reboisasi dan rehabilitasi hutan serta lahan kritis

untuk meningkatkan kemampuan lahan dalam menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir dan tanah longsor (KLHK, Dinas LHKP); (4) Pemanfaatan program pemerintah melalui APBN untuk asuransi pertanian JASINDO dalam rangka memitigasi dampak perubahan iklim (Kementan, DPPKP).

c. Tingkat kemiskinan

Capaian tingkat kemiskinan Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada periode tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami penurunan. Namun demikian masih berada jauh di atas nasional. Kemudian, pada tahun 2024, capaian tingkat kemiskinan Provinsi Papua Selatan sendiri lebih rendah dibandingkan capaian wilayah Papua secara keseluruhan yaitu mencapai 17,44 persen.



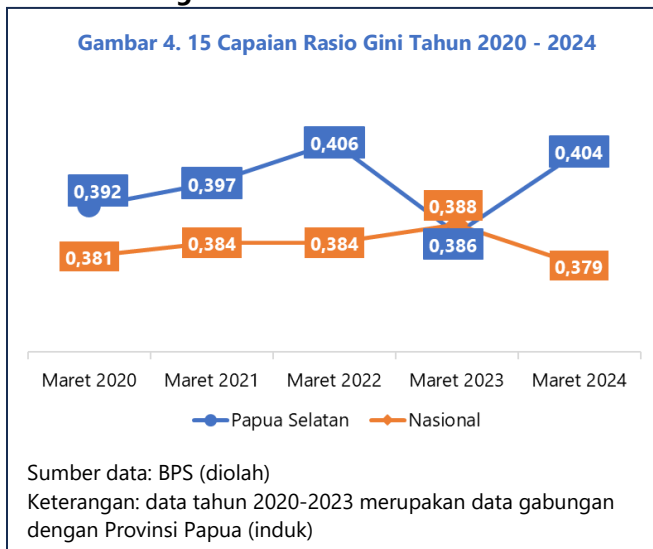
Dengan berdirinya Provinsi Papua Selatan yang mencakup Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat, BPS mulai melakukan pengukuran kesejahteraan penduduk, termasuk potret angka kemiskinan yang baru disediakan mulai bulan Maret 2024. Pada daerah perkotaan, jumlah penduduk miskin mencapai 5,97 ribu orang, yang merepresentasikan 3,10 persen dari total populasi perkotaan. Di sisi lain, daerah perdesaan memiliki jumlah penduduk miskin yang jauh lebih tinggi, yaitu 86,23 ribu orang, dengan persentase penduduk miskin mencapai 25,64 persen. Ketika digabungkan, total jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan mencapai 92,20 ribu orang, dengan persentase total 17,44 persen. Data ini mengindikasikan bahwa kemiskinan di wilayah perdesaan relatif lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan. Ini dapat menjadi indikasi kasar bahwa terjadi ketimpangan kesejahteraan antar wilayah tersebut di Papua Selatan.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Selatan yaitu (1) Tingginya garis kemiskinan yang jauh di atas nasional, dengan garis kemiskinan menjadi faktor dominan; (2) Kurang optimalnya program bantuan langsung kepada masyarakat; dan (3) Kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin; serta (4)

Pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan di Provinsi Papua Selatan, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yaitu (1) Memastikan keterjangkauan harga kebutuhan bahan makanan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin (Dinsos dan PPPA); (2) Memperbaiki dan memperbarui satu data kemiskinan dengan memanfaatkan Data Regsosek agar bantuan lebih tepat sasaran (BPS, Bappenas, Dinsos); (3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan seperti *telemedicine* dan pelayanan kesehatan bergerak (Kemenkes dan Dinkes); dan (4) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari dan sekolah berpola asrama (Kemendikdasmen, Disdikbud).

d. Rasio gini



Capaian rasio gini Provinsi Papua termasuk Papua Selatan pada periode 2020 hingga 2023 terus menurun walaupun sempat stagnan pada 2022 hingga 2023. Kemudian, pada tahun 2024 capaian rasio gini Provinsi Papua Selatan mencapai 0,404. Hal ini mengalami peningkatan rasio gini setelah capaiannya terpisah

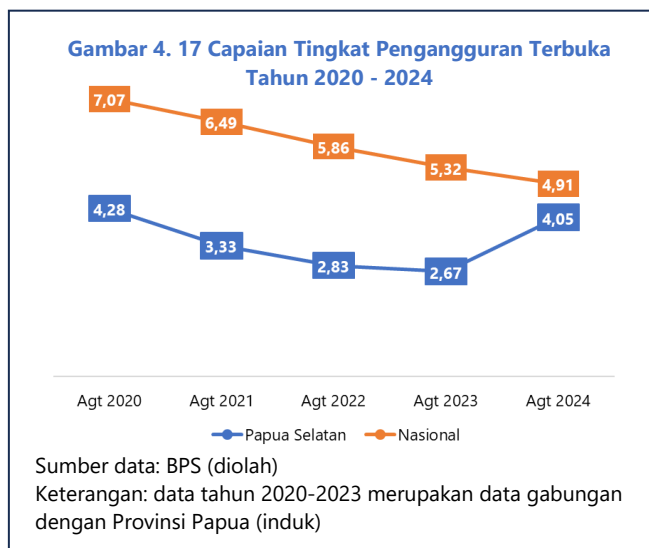
karena adanya pemekaran. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka rasio nasional pada Maret 2024 yang sebesar 0,379.

Adapun faktor yang ditengarai menghambat belum optimalnya rasio gini Provinsi Papua Selatan yaitu (1) Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya program pelatihan membatasi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih mampu; (2) Papua Selatan terletak di daerah pegunungan yang sulit dijangkau, sehingga infrastruktur yang memadai masih terbatas; dan (3) Pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Untuk itu, guna terus menurunkan capaian rasio gini di Provinsi Papua Selatan, terdapat beberapa rekomendasi ke depan antara lain (1) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari dan sekolah berpola asrama (Kemendikdasmen, Disdikbud); (2) Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarwilayah (KemenPU, DPUPR); dan (3) Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis SDA (pertanian, perkebunan, dan perikanan) (Kementan, KemenKP, Dinas KUMKM dan Perindag, DPPKP).

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) selama periode 2020 hingga 2023 terus menurun. Kemudian, setelah adanya pemekaran, capaian TPT Provinsi Papua Selatan pada tahun 2024 mengalami peningkatan hingga mencapai 4,05 persen. Pada Agustus 2024, TPT mengalami peningkatan sebesar 0,67 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Peningkatan tersebut terjadi pada dua kabupaten yaitu Kab. Merauke dan Kab. Boven Digoel.



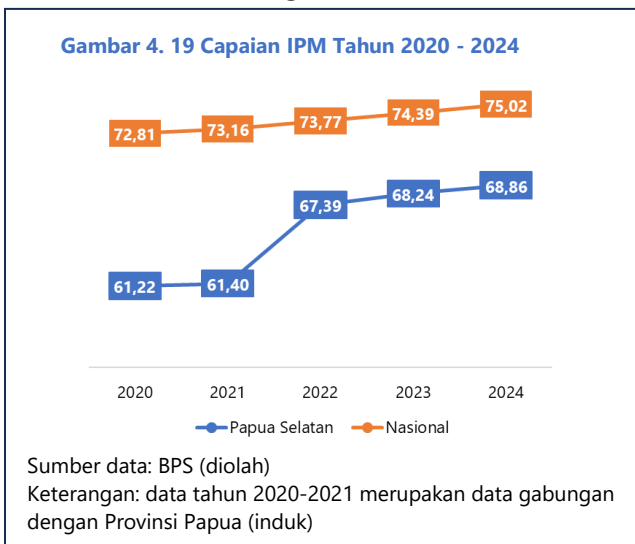
Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 3,53 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,84 persen. Baik TPT laki-laki maupun TPT perempuan memiliki pola yang sama dengan TPT Papua Selatan yaitu naik dibandingkan Agustus 2023. TPT laki-laki naik 0,36 persen poin dan TPT perempuan naik 1,09 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (6,22 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (2,70 persen). Dibandingkan Agustus 2023, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami peningkatan dengan masing-masing peningkatan sebesar 1,28 persen poin dan 0,30 persen poin. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan pekerjaan yang

menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu sebesar 50,44 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,86 persen; dan Administrasi Pemerintahan sebesar 9,17 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2023.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar). Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 151,45 ribu orang (66,84 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 75,14 ribu orang (33,16 persen). Dibandingkan Agustus 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 1,67 persen poin dan informal turun sebesar 1,67 persen poin.

Untuk itu, terdapat rekomendasi ke depan untuk terus menekan angka pengangguran di Provinsi Papua Selatan yaitu Mengembangkan program pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal Papua Selatan, termasuk kerjasama dengan lembaga pendidikan dan dunia usaha untuk memberikan pelatihan yang relevan dan efektif (Kemnaker, Disnakertrans dan ESDM).

f. Indeks Pembangunan Manusia



Capaian IPM Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada periode 2020 hingga 2021 terus meningkat namun lebih rendah dibandingkan nasional. Sejak pemekaran tahun 2022, capaian IPM Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022 hingga 2024 terus mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Selatan

pada tahun 2024 mencapai 68,86, meningkat sebesar 0,62 poin atau 0,91 persen. Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Seluruh indikator mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) sebesar 0,28 persen; Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,88 persen; Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 1,70 persen; dan Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun (yang disesuaikan) sebesar 2,55 persen.

Seiring dengan meningkatnya IPM Provinsi Papua Selatan, seluruh kabupaten/kota juga mengalami peningkatan IPM. Berdasarkan data BPS, Pada tingkat kabupaten, tidak ada kabupaten berstatus pembangunan manusia “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$) di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2024, sedangkan jumlah kabupaten dengan status “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$) sebanyak 1, yang berstatus “sedang” ($60 \leq IPM < 70$) sebanyak 2, dan berstatus “rendah” ($IPM < 60$) sebanyak 1. Sementara itu IPM tertinggi pada tahun 2024 terdapat di Kabupaten Merauke mencapai 74,53, sedangkan IPM terendah terdapat di Kabupaten Asmat sebesar 57,63.

Terdapat faktor yang menghambat belum optimalnya pencapaian IPM di Provinsi Papua Selatan yaitu (1) Kualitas dan daya saing SDM yang masih rendah; dan (2) Kesenjangan sosial mencakup ekonomi, pendidikan, kesehatan, wilayah. Untuk terus meningkatkan capaian IPM di Provinsi Papua Selatan direkomendasikan kebijakan di antaranya (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan untuk memastikan adanya tenaga kerja yang kompeten dan siap industri (Kemenperin, Kemendiktisaintek, Disnakertrans dan ESDM); (2) Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarwilayah (KemenPU, DPUPR); dan (3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari dan sekolah berpola asrama (Kemendikdasmen, Disdikbud); dan (4) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan seperti *telemedicine* dan pelayanan kesehatan bergerak (Kemenkes dan Dinkes).

4.3 Kinerja Prioritas Nasional di Daerah Tahun 2024

a. Potret capaian PN RKP

Potret capaian Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan membandingkan capaian daerah tertentu terhadap capaian daerah lainnya. Kemudian, dilakukan identifikasi indikator

ang terkait dengan Prioritas Nasional yang tersedia di level Provinsi. Berikut adalah potret capaian Prioritas Nasional di 34 Provinsi.

Tabel 4. 3 Potret Capaian PN RKP Tahun 2024 di 34 Provinsi

Provinsi	Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik
Aceh	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Green	Yellow
Sumatera Utara	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Sumatera Barat	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow
Riau	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Orange	Yellow	Yellow
Jambi	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Orange	Yellow
Sumatera Selatan	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Bengkulu	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Lampung	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow
Kep. Bangka Belitung	Yellow	Green	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Green
Kep. Riau	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green	Yellow	Yellow
DKI Jakarta	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Red	Green
Jawa Barat	Green	Orange	Yellow	Orange	Green	Yellow	Green
Jawa Tengah	Green	Orange	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Green
DI Yogyakarta	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Green
Jawa Timur	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Green
Banten	Yellow	Orange	Orange	Red	Green	Orange	Yellow
Bali	Orange	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Green
Nusa Tenggara Barat	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow
Nusa Tenggara Timur	Red	Orange	Orange	Green	Red	Green	Yellow
Kalimantan Barat	Orange	Yellow	Red	Yellow	Yellow	Orange	Green
Kalimantan Tengah	Yellow	Green	Orange	Yellow	Orange	Yellow	Yellow
Kalimantan Selatan	Orange	Green	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Kalimantan Timur	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Yellow
Kalimantan Utara	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Yellow
Sulawesi Utara	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Orange
Sulawesi Tengah	Yellow	Green	Orange	Yellow	Yellow	Green	Yellow
Sulawesi Selatan	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow

Provinsi	Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Sulawesi Tenggara							
Gorontalo							
Sulawesi Barat							
Maluku							
Maluku Utara							
Papua Barat							
Papua							

Sumber: EPD, 2024

Keterangan warna pada *heatmap* merupakan **perbandingan relatif antar daerah**

Potret capaian Prioritas Nasional di 34 provinsi cukup bervariasi. Capaian Prioritas Nasional di Wilayah Jawa - Bali secara umum lebih baik dibandingkan wilayah lainnya, kecuali PN 6 dan PN 2. Sementara, capaian Prioritas Nasional secara umum di Wilayah Nusa Tenggara dan Wilayah Papua masih kurang dan perlu dioptimalkan jika dibandingkan wilayah lainnya.

Secara khusus, Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) memiliki capaian paling optimal pada PN 3 dan PN 6. Sementara untuk PN 1, PN 2, PN 4, PN 5 dan PN 7, menjadi tiga indikator yang tergolong kurang optimal. Secara keseluruhan capaian PN di Provinsi Papua pada tahun 2023 tergolong masih kurang, dan memerlukan upaya yang lebih optimal dan signifikan dalam pencapaian di lima prioritas nasional yang masih rendah tersebut.

b. Potret capaian indikator PN 1

Prioritas Nasional (PN) 1 dalam RKP 2024 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Oleh karena itu, kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun PN 1 antara lain: (1) Skor Pola Pangan Harapan, (2) Produksi Perikanan, (3) Pertumbuhan PDB Perikanan, (4) Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun, (5) Rasio Kewirausahaan Provinsi, (6) Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif, (7) Kontribusi PDB Industri Pengolahan, serta (8) Pembentukan Modal Tetap Bruto.

Tabel 4. 4 Capaian Indikator pada Prioritas Nasional 1 di 34 Provinsi

Provinsi	Prioritas Nasional 1							
	Skor Pola Pangan Harapan	Produksi Perikanan	Pertumbuhan PDB perikanan	Penyediaan lapangan kerja per tahun	Rasio Kewirausahaan provinsi	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	Pembentukan Modal Tetap Bruto
	2023	2022	2023	2023	2024	2022	2024	2023
Aceh								
Sumatera Utara								
Sumatera Barat								
Riau								
Jambi								
Sumatera Selatan								
Bengkulu								
Lampung								
Kep. Bangka Belitung								
Kep. Riau								
DKI Jakarta								
Jawa Barat								
Jawa Tengah								
DI Yogyakarta								
Jawa Timur								
Banten								
Bali								
Nusa Tenggara Barat								
Nusa Tenggara Timur								
Kalimantan Barat								
Kalimantan Tengah								
Kalimantan Selatan								
Kalimantan Timur								
Kalimantan Utara								
Sulawesi Utara								
Sulawesi Tengah								
Sulawesi Selatan								
Sulawesi Tenggara								
Gorontalo								
Sulawesi Barat								

Provinsi	Prioritas Nasional 1							
	Skor Pola Pangan Harapan	Produksi Perikanan	Pertumbuhan PDB perikanan	Penyediaan lapangan kerja per tahun	Rasio Kewirausahaan provinsi	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	Pembentukan Modal Tetap Bruto
	2023	2022	2023	2023	2024	2022	2024	2023
Maluku								
Maluku Utara								
Papua Barat								
Papua								

Sumber: EPD, diolah

Keterangan Capaian Indikator :



Capaian indikator pada Prioritas Nasional 1 di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) mayoritas masih perlu dioptimalkan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan salah satu indikator capaian target kualitas konsumsi pangan masyarakat secara nasional. Capaian skor PPH tersebut akan terwujud apabila setiap wilayah provinsi di Indonesia memiliki capaian konsumsi pangan yang berkualitas mengarah pada pola komposisi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Skor PPH Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2023 sebesar 79 masih lebih rendah dibandingkan capaian nasional yaitu sebesar 94,1. SPPH memberikan gambaran mengenai keragaman konsumsi pangan di masyarakat. Semakin tinggi skor PPH, semakin beragam pola konsumsi pangan yang diterapkan oleh individu atau rumah tangga. Meskipun capaian SPPH tersebut belum ideal, karena skor PPH yang optimal seharusnya mencapai 100, nilai tersebut masih termasuk dalam kategori baik. Beberapa faktor penghambat masih rendahnya SPPH Provinsi Papua yaitu (1) Masih rendahnya konsumsi pangan lokal akibat perubahan pola hidup masyarakat yang lebih suka mengonsumsi beras; (2) Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Kandungan Gizi Pangan Lokal; (3) Ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras. Untuk itu, direkomendasikan kebijakan ke depan (1) Mendorong perbaikan kualitas konsumsi pangan untuk memenuhi gizi masyarakat dan konsumsi pangan lokal yang lebih beragam melalui penguatan pengembangan pangan lokal dan edukasi pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), serta penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademisi, lembaga nonpemerintah dan media) (DPPKP, Dinkes); (2) Mendorong peningkatan produksi pertanian melalui dukungan teknologi, akses ke pupuk dan benih berkualitas, serta pelatihan bagi petani. Hal ini juga termasuk diversifikasi tanaman untuk memastikan ketersediaan berbagai jenis pangan (Kementan, DPPKP).

Kemudian, produksi perikanan di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2022 sebesar 266.444 ton. Provinsi Papua memiliki komoditas perikanan yang bernilai tinggi di pasar internasional, seperti tuna, cakalang, udang, dan ikan kerapu. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ekspor hasil perikanan dari Papua pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan, terutama untuk komoditas udang dan tuna. Salah satu faktor pendorong peningkatan ekspor adalah adanya pelabuhan perikanan internasional di Papua, seperti pelabuhan di Biak Numfor yang melayani ekspor hasil perikanan dari wilayah timur Indonesia, termasuk Papua. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara tujuan ekspor, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, juga turut mendorong peningkatan volume ekspor. Di sisi lain, salah satu tantangan utama dalam meningkatkan produksi perikanan di Papua adalah keterbatasan infrastruktur. Di Provinsi Papua masih ditemukan banyaknya daerah pesisir dan pedalaman yang masih kesulitan dalam mengakses fasilitas seperti pelabuhan perikanan, *cold storage*, dan jalan yang memadai. Hal ini menyebabkan tingginya biaya logistik dan sulitnya distribusi hasil perikanan ke pasar baik pasar lokal, nasional, maupun internasional. Nelayan dan pembudidaya ikan di Papua juga masih dihadapi oleh kendala dalam mengakses modal dan pembiayaan untuk mengembangkan usaha perikanan. Keterbatasan ini menyebabkan rendahnya produktivitas dan sulitnya pengembangan skala usaha.

Realisasi Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan Provinsi Papua pada tahun 2023 mencapai 2,13 persen atau kurang kurang optimal jika dibandingkan secara relatif dengan daerah lainnya. Kendati sektor perikanan di Papua memiliki potensi yang besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Beberapa potensi besar tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor pendukung, diantaranya adalah keberadaan sumber daya perikanan yang sangat melimpah di Provinsi Papua khususnya pada perikanan tangkap. Wilayah perairan Papua, termasuk Laut Arafura dan Samudera Pasifik, dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Potensi ini diharapkan menjadi modal utama bagi pengembangan sektor perikanan di Papua.

Indikator rasio kewirausahaan Provinsi Papua pada tahun 2024 sebesar 1,24 menunjukkan bahwa tingkat kewirausahaan di Provinsi Papua masih kurang optimal jika dibandingkan secara relatif dengan daerah lainnya. Provinsi Papua masih dihadapi oleh sejumlah tantangan yang menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan rasio kewirausahaan. Tantangan utama dalam peningkatan kewirausahaan di Provinsi Papua diantaranya meliputi keterbatasan infrastruktur, seperti akses transportasi dan komunikasi yang belum merata, terutama di daerah

pedalaman. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam distribusi barang dan jasa, serta menghambat perluasan pasar bagi pelaku usaha.

Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif di Provinsi Papua pada tahun 2023 sebesar 67.985 orang. Sementara itu, Capaian indikator kontribusi PDB industri pengolahan Provinsi Papua pada tahun 2023 sebesar 1,57 persen atau menunjukkan hasil yang kurang optimal jika dibandingkan secara relatif dengan capaian daerah lain. Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian kontribusi PDB industri pengolahan yaitu (1) potensi SDA yang dimiliki Papua Selatan belum dikelola secara optimal untuk diolah menjadi input produksi, (2) konektivitas dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi kendala utama dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor industri, dan (3) masalah keamanan yang sering terjadi juga menjadi penghalang bagi perkembangan industri. Untuk itu, direkomendasikan (1) Mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan keuangan mikro untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program pelatihan keterampilan dan kredit mikro juga perlu diperkuat (DPPKP, Perbankan, Disnakertrans dan ESDM); (2) Meningkatkan iklim investasi melalui peningkatan kualitas regulasi dan transparansi dalam proses perizinan untuk mempercepat proses investasi dan mengurangi biaya administrasi (DPMPTSP); (3) Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarwilayah (KemenPU, DPUPR); dan (4) Mengimplementasikan pendekatan keamanan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah (Polri, TNI, Bakesbangpol).

Selain itu, pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2023 masih belum optimal. Pertumbuhan PMTB pada tahun 2023 sebesar 3,08 persen. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,36 persen. Percepatan pertumbuhan pada tahun 2023 berkaitan dengan tingginya perubahan inventori pada tahun 2023 sebagai dampak lanjutan dari bencana banjir dan longsor yang terjadi di lokasi operasional perusahaan tambang pada triwulan I 2023. Secara spasial, investasi tersebar di seluruh provinsi di wilayah Papua, dengan investasi di Provinsi Papua mencapai 67 persen dari total PMDN.

c. Potret capaian indikator PN 2

Prioritas Nasional (PN) 2 dalam RKP 2024 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Oleh karena itu, kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun PN 2 antara lain: (1)

Indeks Pembangunan Manusia, (2) Rasio Gini, (3) Pertumbuhan Ekonomi, (4) Persentase Penduduk Miskin, (5) Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tabel 4. 5 Capaian Indikator pada Prioritas Nasional 2 di 34 Provinsi

Provinsi	Prioritas Nasional 2				
	Indeks Pembangunan Manusia	Rasio Gini	Pertumbuhan ekonomi	Persentase penduduk miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka
	2024	2024	2024	2024	2024
Aceh					
Sumatera Utara					
Sumatera Barat					
Riau					
Jambi					
Sumatera Selatan					
Bengkulu					
Lampung					
Kep. Bangka Belitung					
Kep. Riau					
DKI Jakarta					
Jawa Barat					
Jawa Tengah					
DI Yogyakarta					
Jawa Timur					
Banten					
Bali					
Nusa Tenggara Barat					
Nusa Tenggara Timur					
Kalimantan Barat					
Kalimantan Tengah					
Kalimantan Selatan					
Kalimantan Timur					
Kalimantan Utara					
Sulawesi Utara					
Sulawesi Tengah					
Sulawesi Selatan					
Sulawesi Tenggara					
Gorontalo					
Sulawesi Barat					
Maluku					
Maluku Utara					
Papua Barat*					
Papua*					

Sumber: EPD, diolah

Keterangan: *) Capaian Tahun 2024 merupakan capaian sebagai DOB

Keterangan Capaian Indikator :



Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Selatan tahun 2024 sebesar 4,55 persen sementara capaian nasional sebesar 5,03 persen. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan aktivitas pada seluruh lapangan usaha terlihat dari pertumbuhan positif seluruh sektor. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,08 persen; Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,45 persen; serta Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 6,54 persen. Lapangan Usaha Konstruksi masih menjadi kontributor terbesar pada perekonomian Papua Selatan sebesar 23,21 persen; diikuti Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,51 persen; serta Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,81 persen.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Selatan pada tahun 2024 mencapai 68,86, meningkat sebesar 0,62 poin atau 0,91 persen. Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Seluruh indikator mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) sebesar 0,28 persen; Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,88 persen; Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 1,70 persen; dan Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun (yang disesuaikan) sebesar 2,55 persen.

Pada tahun 2024 capaian rasio gini di Provinsi Papua Selatan mencapai 0,404. Hal ini mengalami peningkatan rasio gini setelah capaiannya terpisah karena adanya pemekaran. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan angka rasio nasional pada Maret 2024 yang sebesar 0,379.

Pada tahun 2024, capaian tingkat kemiskinan Provinsi Papua Selatan sendiri lebih rendah dibandingkan capaian wilayah Papua secara keseluruhan yaitu mencapai 17,44 persen. Pada daerah perkotaan, jumlah penduduk miskin mencapai 5,97 ribu orang, yang merepresentasikan 3,10 persen dari total populasi perkotaan. Di sisi lain, daerah perdesaan memiliki jumlah penduduk miskin yang jauh lebih tinggi, yaitu 86,23 ribu orang, dengan persentase penduduk miskin mencapai 25,64 persen.

Kemudian, setelah adanya pemekaran, capaian TPT Provinsi Papua Selatan pada tahun 2024 mengalami peningkatan hingga mencapai 4,05 persen. Pada Agustus 2024, TPT mengalami peningkatan sebesar 0,67 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Peningkatan tersebut terjadi pada dua kabupaten yaitu Kab. Merauke dan Kab. Boven Digoel.

d. Potret capaian indikator PN 3

Prioritas Nasional (PN) 3 dalam RKP 2024 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun PN 3 antara lain: (1) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi, (2) Prevalensi *Stunting*, (3) Prevalensi *Wasting*, (4) Indeks Ketimpangan Gender (IKG), (5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, dan (6) Indeks Pembangunan Pemuda.

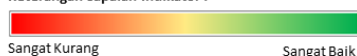
Tabel 4. 6 Capaian Indikator pada pada Prioritas Nasional 3 di 34 Provinsi

Provinsi	Prioritas Nasional 3					
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita	Indeks Ketimpangan Gender	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Indeks Pembangunan Pemuda
	2024	2023	2023	2023	2023	2023
Aceh						
Sumatera Utara						
Sumatera Barat						
Riau						
Jambi						
Sumatera Selatan						
Bengkulu						
Lampung						
Kep. Bangka Belitung						
Kep. Riau						
DKI Jakarta						
Jawa Barat						
Jawa Tengah						
DI Yogyakarta						
Jawa Timur						
Banten						
Bali						
Nusa Tenggara Barat						
Nusa Tenggara Timur						
Kalimantan Barat						
Kalimantan Tengah						
Kalimantan Selatan						
Kalimantan Timur						
Kalimantan Utara						
Sulawesi Utara						
Sulawesi Tengah						
Sulawesi Selatan						
Sulawesi Tenggara						

Provinsi	Prioritas Nasional 3					
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita	Indeks Ketimpangan Gender	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Indeks Pembangunan Pemuda
	2024	2023	2023	2023	2023	2023
Gorontalo	Yellow	Orange	Red	Yellow	Yellow	Yellow
Sulawesi Barat	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Orange
Maluku	Green	Orange	Red	Yellow	Yellow	Yellow
Maluku Utara	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Yellow	Green
Papua Barat	Orange	Orange	Orange	Orange	Yellow	Yellow
Papua	Yellow	Orange	Orange	Orange	Green	Red

Sumber: EPD, diolah

Keterangan Capaian Indikator :



Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa yang bersekolah di perguruan tinggi dengan jumlah penduduk usia kuliah, yaitu 19–23 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Tinggi di Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2024 adalah sebesar 35,63 persen. Angka tersebut merupakan terendah kedua jika dibandingkan provinsi lain di Wilayah Maluku-Papua. Kemudian, capaian APK Pendidikan Tinggi di Provinsi Papua Barat juga masih berada di bawah capaian nasional (32 persen).

Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2023 sebesar 28,60 persen. Provinsi Papua masih harus bekerja keras dalam penanganan *stunting*. Beberapa faktor penghambat masih tingginya capaian prevalensi *stunting* adalah (1) Kurangnya asupan gizi yang memadai; (2) Infrastruktur dan akses layanan kesehatan yang masih terbatas; (3) Ketimpangan sosial dan ekonomi; dan (4) Masih terbatasnya akses air bersih (*stunting* tertinggi di Asmat sebesar 55%). Untuk itu, direkomendasikan ke depannya adalah (1) Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* dan perbaikan gizi lainnya (Dinkes, DPPKP); (2) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan seperti telemedicine dan pelayanan kesehatan bergerak (Kemenkes, Dinkes); (3) Mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan keuangan mikro untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program pelatihan keterampilan dan kredit mikro juga perlu diperkuat (DPPKP, Perbankan, Disnakertrans dan ESDM); dan (4) Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan di terutama untuk daerah dengan prevalensi *stunting* tinggi (KemenPU, DPUPR).

Kemudian, *wasting* merupakan kondisi yang penting dan mendesak karena berisiko menyebabkan stunting dan mortalitas. Balita *wasting* berisiko lebih tinggi mengalami *stunting* dibandingkan balita dengan status gizi baik. Kondisi *wasting* juga diketahui meningkatkan risiko kematian pada balita terutama bayi berusia di bawah 1 tahun. Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita di Papua sebesar 13,10 persen. Angka tersebut merupakan yang terendah kedua di Wilayah Maluku – Papua. Di Indonesia, *wasting* menjadi tantangan serius bagi sektor kesehatan. Anak-anak yang mengalami *wasting* memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita infeksi, gangguan perkembangan fisik dan kognitif, dan bahkan kematian dalam kasus yang paling parah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Intervensi efektif mencakup peningkatan akses gizi, pengobatan infeksi, penyuluhan, dan pendekatan multisektoral diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang *wasting* pada anak.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran untuk mengukur sejauh mana ketimpangan gender berdampak pada pencapaian pembangunan dalam tiga aspek, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. IKG dihitung berdasarkan skala 0–1, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar. Angka IKG Provinsi Papua pada tahun 2023 adalah sebesar 0,518. Capaian tersebut masih berada di atas capaian nasional sebesar 0,447.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Provinsi Papua pada tahun 2023 tercatat sebesar 66,27 persen. Sektor pertanian merupakan pekerjaan utama bagi sebagian besar perempuan di Papua secara umum. Untuk itu, direkomendasikan ke depan (1) Mendorong optimalisasi kawasan sentra produksi pangan (Kementan, DPPKP); dan (2) Mendorong dan mendukung kewirausahaan perempuan dengan menyediakan pelatihan bisnis, akses pasar, dan pendampingan (Dinas KUKM dan Perindag).

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indeks yang terdiri dari 15 indikator komposit, yang memberikan gambaran kondisi pembangunan pemuda. IPP membantu dalam memahami dinamika dan progres pembangunan pemuda secara komprehensif, dengan menyoroti tiga lapisan utama yang menjadi fokus pembangunan pemuda, yaitu pembangunan individu, kesejahteraan dan

penghidupan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Capaian IPP di Papua pada tahun 2023 adalah sebesar 48,26. Capaian tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan capaian nasional yaitu sebesar 60,59.

e. Potret capaian indikator PN 4

Prioritas Nasional (PN) 4 dalam RKP 2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Oleh karena itu, kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun PN 4 antara lain: (1) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), dan (2) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Secara umum, capaian PN di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) sudah optimal terkait dengan kerukunan umat beragama, namun perlu dioptimalkan terkait pembangunan kebudayaan.

Tabel 4. 7 Capaian Indikator pada Prioritas Nasional 4 di 34 Provinsi

Provinsi	Prioritas Nasional 4	
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
	2023	2024
Aceh		
Sumatera Utara		
Sumatera Barat		
Riau		
Jambi		
Sumatera Selatan		
Bengkulu		
Lampung		
Kep. Bangka Belitung		
Kep. Riau		
DKI Jakarta		
Jawa Barat		
Jawa Tengah		
DI Yogyakarta		
Jawa Timur		
Banten		
Bali		
Nusa Tenggara Barat		
Nusa Tenggara Timur		
Kalimantan Barat		
Kalimantan Tengah		
Kalimantan Selatan		
Kalimantan Timur		
Kalimantan Utara		
Sulawesi Utara		
Sulawesi Tengah		
Sulawesi Selatan		
Sulawesi Tenggara		
Gorontalo		
Sulawesi Barat		
Maluku		
Maluku Utara		
Papua Barat		
Papua		

Sumber: EPD, diolah

Keterangan Capaian Indikator :



Salah satu tolok ukur dalam merepresentasikan pembangunan kebudayaan di Indonesia adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Indeks ini memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan secara lebih holistik, yang mencakup dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Capaian IPK Papua pada tahun 2023 adalah sebesar 48,52. Capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan nasional yang tercatat sebesar 57,13. Capaian IPK Papua merupakan yang terendah kedua dibandingkan daerah lainnya. Beberapa faktor penghambat Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Papua yaitu (1) Kurangnya wadah untuk menampilkan kreasi dalam seni tari membuat anak muda Papua untuk terlibat dalam tari berkurang, dan (2) Rendahnya budaya literasi di Papua karena minimnya tenaga guru, fasilitas pendidikan yang kurang memadai dan kurangnya buku pelajaran yang menjadi pegangan siswa. Untuk itu, direkomendasikan kebijakan (1) Pengembangan infrastruktur kebudayaan melalui pembangunan museum, galeri seni, dan taman budaya untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Papua kepada generasi muda dan wisatawan (Kemenbud, Disdikbud); dan (2) Penguatan pendidikan kebudayaan melalui peningkatan kurikulum pendidikan yang mencakup materi tentang kebudayaan lokal Papua, termasuk bahasa, seni, dan tradisi (Kemenbud, Disdikbud).

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan salah satu alat ukur yang digunakan dalam merepresentasikan pembangunan bidang agama. Indikator ini menggambarkan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan menghargai, kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin tinggi capaian IKUB, maka semakin baik kondisi kehidupan intra dan antar umat beragama yang saling berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, serta menghormati perbedaan dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Indikator ini diukur melalui survei menggunakan instrumen yang memuat aspek toleransi, kerjasama, dan kesetaraan. Capaian IKUB Provinsi Papua pada tahun 2024 adalah sebesar 80,88, lebih tinggi di atas capaian nasional sebesar 76,47.

f. Potret capaian indikator PN 5

Prioritas Nasional (PN) 5 dalam RKP 2024 yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Oleh karena itu, kinerja

daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun PN 5 antara lain: (1) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan, (2) Persentase Kondisi Mantap Jalan, (3) Rasio Elektrifikasi, dan (4) Jumlah Produksi Listrik (GWh).

Tabel 4. 8 Capaian Indikator pada Prioritas Nasional 5 di 34 Provinsi

Provinsi	Prioritas Nasional 5			
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	Rasio Elektrifikasi	Jumlah Produksi Listrik
	2023	2024	2024	2022
Aceh				
Sumatera Utara				
Sumatera Barat				
Riau				
Jambi				
Sumatera Selatan				
Bengkulu				
Lampung				
Kep. Bangka Belitung				
Kep. Riau				
DKI Jakarta				
Jawa Barat				
Jawa Tengah				
DI Yogyakarta				
Jawa Timur				
Banten				
Bali				
Nusa Tenggara Barat				
Nusa Tenggara Timur				
Kalimantan Barat				
Kalimantan Tengah				
Kalimantan Selatan				
Kalimantan Timur				
Kalimantan Utara				
Sulawesi Utara				
Sulawesi Tengah				
Sulawesi Selatan				
Sulawesi Tenggara				
Gorontalo				
Sulawesi Barat				
Maluku				
Maluku Utara				
Papua Barat				
Papua				

Sumber: EPD, diolah

Keterangan Capaian Indikator :



Secara keseluruhan, capaian Prioritas Nasional 5 di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) masih perlu dioptimalkan. Capaian persentase rumah tangga dengan akses air minum perpipaan Provinsi Papua adalah 7,47%. Berdasarkan kategori UNICEF, Papua merupakan provinsi dengan cakupan jaringan air minum perpipaan rendah (<20%). Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian tersebut di Papua karena masih terbatasnya akses terhadap air bersih. Berdasarkan Peta Jalan Induk Air Minum Aman Indonesia (2020 – 2030) yang dipublikasikan oleh UNICEF, terdapat beberapa isu dan tantangan besar yang dihadapi oleh sektor air minum di Indonesia. Pertama, penambahan penduduk dan tekanan urbanisasi. Terdapat kesenjangan layanan dari infrastruktur untuk menyediakan pasokan air baku yang aman bagi penduduk Indonesia. Selain itu, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi akan berhadapan dengan isu-isu pemerataan, seperti keterbatasan akses terhadap air dan sanitasi dan akan berkontribusi secara signifikan terhadap masalah perkotaan. Kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim akan menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan musim hujan akan lebih pendek tapi lebih tinggi intensitasnya, mempengaruhi kuantitas dan kualitas sumber air minum. Ketiga, penurunan kualitas sumber air di Indonesia, baik air sungai maupun air tanah, serta adanya rekontaminasi dan pemborosan air. Keempat, cakupan dan kinerja SPAM yang masih rendah terlihat dari kurang dari 50% populasi yang menggunakan air perpipaan. Terakhir, sumber pendanaan utama untuk pengembangan, peningkatan, dan perluasan kapasitas SPAM di Indonesia berasal dari APBN/D, DAK, pinjaman dan hibah luar negeri, pinjaman bank, KPBU, dana CSR, investasi BUMD. Namun, terdapat kesenjangan pembiayaan terkait kontribusi Pemda untuk infrastruktur penyediaan air minum, penurunan investasi Pemerintah Pusat di sektor air minum, dan terbatasnya kapasitas pengelola SPAM untuk mengakses dana alternatif.

Kemudian, capaian persentase jalan mantap Provinsi Papua pada tahun 2024 adalah sebesar 28,59 persen. Masih rendahnya capaian kondisi jalan mantap jalan dipengaruhi oleh biaya konstruksi yang tinggi dan faktor geografis Papua yang cukup menantang. Untuk meningkatkan capaian kondisi jalan mantap Provinsi Papua, direkomendasikan (1) Mengadopsi teknologi modern dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan, seperti penggunaan material yang lebih tahan lama dan metode konstruksi yang lebih efisien (KemenPU, DPUPR); (2) Menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja lokal, dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dan mendukung perekonomian lokal (Disnakertrans ESDM, DPUPR, KemenPU); dan (3) Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra

dan antarwilayah (KemenPU, DPUPR). Sementara itu, rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga total. Capaian rasio elektrifikasi Provinsi Papua Selatan pada tahun 2024 adalah sebesar 93,99 persen. Selanjutnya, jumlah produksi listrik di Provinsi Papua pada tahun 2022 sebesar 1441,53 GwH.

g. Potret capaian indikator PN 6

Prioritas Nasional (PN) 6 dalam RKP 2024 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Oleh karena itu, kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun PN 6 antara lain: (1) Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Penurunan Indeks Risiko Bencana. Secara umum, capaian PN 6 di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) sudah optimal kecuali terkait penurunan risiko bencana.

Tabel 4. 9 Capaian Indikator pada Prioritas Nasional 6 di 34 Provinsi

Provinsi	Prioritas Nasional 6				
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	Penurunan nilai indeks risiko bencana
	2022	2022	2022	2022	2023
Aceh					
Sumatera Utara					
Sumatera Barat					
Riau					
Jambi					
Sumatera Selatan					
Bengkulu					
Lampung					
Kep. Bangka Belitung					
Kep. Riau					
DKI Jakarta					
Jawa Barat					
Jawa Tengah					
DI Yogyakarta					
Jawa Timur					
Banten					
Bali					
Nusa Tenggara Barat					
Nusa Tenggara Timur					
Kalimantan Barat					
Kalimantan Tengah					
Kalimantan Selatan					
Kalimantan Timur					
Kalimantan Utara					
Sulawesi Utara					
Sulawesi Tengah					
Sulawesi Selatan					
Sulawesi Tenggara					

Provinsi	Prioritas Nasional 6				
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	Penurunan nilai indeks risiko bencana
	2022	2022	2022	2022	2023
Gorontalo	Yellow	Yellow	Green	Green	Yellow
Sulawesi Barat	Yellow	Green	Green	Green	Yellow
Maluku	Yellow	Green	Green	Green	Yellow
Maluku Utara	Yellow	Green	Green	Green	Orange
Papua Barat	Green	Green	Green	Green	Red
Papua	Yellow	Green	Green	Green	Orange

Sumber: EPD, diolah

Keterangan Capaian Indikator :



Capaian IKA, IKAL, IKU, dan IKL Provinsi Papua sudah optimal. Indikator IKA, IKAL, IKU, dan IKL merupakan indikator komposit dari IKLH. Untuk Provinsi Papua Selatan, capaian IKLH tahun 2023 adalah sebesar 81,18. Capaian tersebut merupakan salah satu yang tertinggi dibandingkan daerah lainnya. Beberapa faktor pendukung terkait capaian IKLH tersebut adalah (1) masih tingginya tutupan lahan, (2) keterlibatan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan dan kawasan konservasi, (3) penetapan kawasan konservasi di berbagai wilayah hutan Papua, (4) Pelaksanaan program REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) telah memberikan kontribusi besar dalam mengurangi laju deforestasi dan melestarikan hutan di Papua, (5) Relatif masih minimnya kegiatan industrialisasi berat di Papua, sehingga pencemaran lingkungan dari aktivitas industri relatif rendah, (6) Papua memiliki wilayah yang luas dengan populasi yang relatif rendah. Ini mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan dibandingkan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Untuk terus menjaga kualitas lingkungan hidup di Provinsi Papua secara umum, direkomendasikan beberapa kebijakan di antaranya (1) Peningkatan pengawasan kualitas lingkungan, wilayah hutan, wilayah perairan, dan wilayah konservasi melalui pemanfaatan teknologi khususnya teknologi satelit untuk pengawasan tutupan hutan (Dinas LH, Dishut, Kemen LH, Kemenhut, BIG); (2) Mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi melalui peningkatan keterlibatan masyarakat luas (Dinas LH, Dishut, Kemen LH, Kemen ATR, Kemenhut); (3) Memperluas cakupan program REDD+ di wilayah Papua secara umum untuk mengurangi deforestasi dan meningkatkan pengelolaan hutan primer (Dinas LH, Dishut, Bappenas, Kemen LH, Kemenhut); (4) Mendorong pembentukan zona lindung adat untuk melindungi hutan primer (Dinas LH, Dishut, Kemen LH, Kemenhut, KemenATR); (5) Mendorong penguatan regulasi

insentif/disinsentif untuk memastikan aktivitas industri tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan seperti penerapan ESG bagi sektor usaha (Dinas LH, Dishut, KemenLH, Kemenhut); (6) Mendorong transisi energi melalui penerapan EBT berbasis sumber daya EBT lokal (Dinas ESDM, Kemen ESDM); dan (7) Pengembangan ekowisata dalam rangka melestarikan kawasan hutan primer sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal (Bappeda, Dinas LH, Dinas Kehutanan, Dispar, Kemen LH, Kemenhut, Kemenpar, KemendesPDT).

Indeks Risiko Bencana adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Provinsi Papua Selatan merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua dengan ibukota Kab. Merauke. Wilayah Papua Selatan berada di dataran rendah dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini dengan lahan didominasi rawa-rawa dan sungai besar. Selain itu, Provinsi Papua Selatan juga berbatasan langsung dengan Laut Arafura dan Laut Aru. Berdasarkan data Geoportal Data Bencana, pada tahun 2023 tercatat dua kejadian bencana yang terjadi di Papua Selatan yaitu bencana banjir. Nilai indeks risiko bencana Provinsi Papua Selatan yaitu sebesar 138,20 dengan kategori kelas risiko sedang.

h. Potret capaian indikator PN 7

Prioritas Nasional (PN) 7 dalam RKP 2024 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Oleh karena itu, kinerja daerah diukur melalui capaian beberapa indikator penyusun PN 7 antara lain: (1) Indeks Demokrasi Provinsi, (2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik, (3) Indeks Kemerdekaan Pers, (4) *Crime Rate*, (5) Indeks Pelayanan Publik, (6) Indeks SPBE, dan (7) Indeks Integritas Nasional.

Tabel 4. 10 Capaian Indikator pada Prioritas Nasional 7 di 34 Provinsi

Provinsi	Prioritas Nasional 7						
	Indeks Demokrasi Provinsi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Kemerdekaan Pers	<i>Crime Rate</i>	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Integritas Nasional
	2023	2023	2023	2022	2022	2023	2023
Aceh							
Sumatera Utara							
Sumatera Barat							
Riau							
Jambi							
Sumatera Selatan							
Bengkulu							
Lampung							
Kep. Bangka Belitung							
Kep. Riau							

Provinsi	Prioritas Nasional 7						
	Indeks Demokrasi Provinsi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Kemerdekaan Pers	Crime Rate	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Integritas Nasional
	2023	2023	2023	2022	2022	2023	2023
DKI Jakarta							
Jawa Barat							
Jawa Tengah							
DI Yogyakarta							
Jawa Timur							
Banten							
Bali							
Nusa Tenggara Barat							
Nusa Tenggara Timur							
Kalimantan Barat							
Kalimantan Tengah							
Kalimantan Selatan							
Kalimantan Timur							
Kalimantan Utara							
Sulawesi Utara							
Sulawesi Tengah							
Sulawesi Selatan							
Sulawesi Tenggara							
Gorontalo							
Sulawesi Barat							
Maluku							
Maluku Utara							
Papua Barat							
Papua							

Sumber: EPD, diolah

Keterangan Capaian Indikator :



Secara keseluruhan, capaian Agenda Pembangunan 7 di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) masih perlu dioptimalkan. Capaian indeks demokrasi Provinsi Papua pada tahun 2023 sebesar 67,64. Capaian tersebut masih perlu dioptimalkan dibandingkan daerah lainnya. Adapun faktor penghambat capaian tersebut adalah (1) indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara masih sangat rendah; (2) indikator kinerja lembaga legislatif masih sangat rendah. Hal ini diindikasikan oleh menurunnya peran DPRD dalam menghasilkan Perda inisiatif; (3) kinerja birokrasi dalam pelayanan publik masih belum optimal; (4) rendahnya pendidikan politik pada kader partai politik; (5) rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu, pengambilan kebijakan dan pengawasan pembangunan; (6) masih terdapat ancaman kekerasan atau konflik sosial dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain; dan (7) masih terdapat tindakan atau pernyataan diskriminatif dalam hal gender,

etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Provinsi Papua Barat, direkomendasikan kebijakan (1) Peningkatan pendidikan politik yang intensif untuk meningkatkan kesadaran warga Papua Barat mengenai hak pilih dan pentingnya partisipasi dalam pemilu melalui media massa, pelatihan, dan program sosialisasi (Kemenkopolkam, KemenHAM, Kemendikdasmen, Badan Kesbangpol, Disdik); (2) Fasilitasi akses bagi masyarakat di wilayah terpencil untuk dapat ikut serta dalam pemilu, dengan menyediakan lokasi pemungutan suara yang lebih dekat dan memadai (Bawaslu, POLRI, Badan Kesbangpol); (3) Penguatan kapasitas dan peningkatan pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, akuntabel dan jauh dari korupsi guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi (Kemenkum, KemenHAM, POLRI, Badan Kesbangpol, Satpol PP); dan (4) Penambahan jumlah personel keamanan dan peningkatan kebijakan terhadap kewaspadaan, ketertiban, pengawasan keamanan dan penanganan konflik sosial (Kemenhan, POLRI, Satpol PP).

Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Papua pada tahun 2023 adalah sebesar 64,01. Hal ini perlu dioptimalkan karena merupakan salah satu yang terendah dibandingkan provinsi lainnya. Berdasarkan data Dewan Pers Indonesia, masih terjadi kekerasan pada wartawan di Papua dalam bentuk fisik, digital dan kekerasan verbal. Selain itu, masih ada wartawan yang belum memahami kode etik jurnalistik dan kaidah jurnalistik serta regulasi pers lainnya. Keterbatasan pengetahuan tersebut menjadikan wartawan cenderung diintervensi secara halus seperti permintaan mengubah judul berita. Untuk itu, direkomendasikan agar dewan pers melakukan pendampingan kepada media dan memfasilitasi capacity building serta pelatihan untuk mengangkat keunikan Papua.

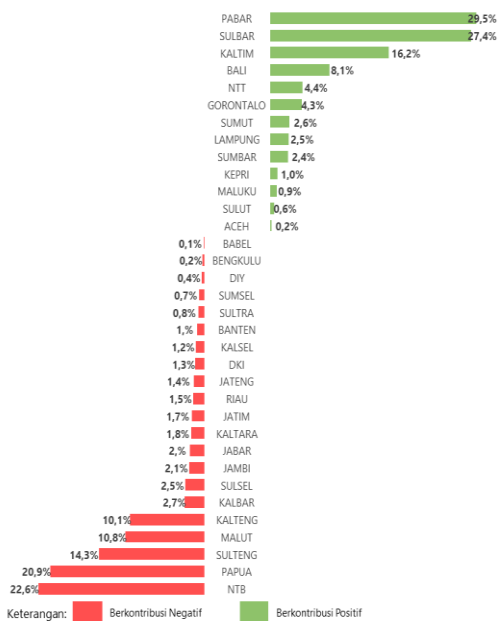
Pada tahun 2023, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Papua tercatat kurang optimal yang tercatat sebesar 1,91. Capaian tersebut merupakan yang terendah dibandingkan daerah lainnya. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan signifikan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Papua. Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan laporan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, rendahnya skor SPBE di provinsi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terkait dengan kesiapan infrastruktur digital, kualitas sumber daya manusia, serta keberlanjutan program-program transformasi digital yang telah diinisiasi. Adapun faktor penghambat utama dalam pencapaian Indeks SPBE di Provinsi Papua pada tahun 2023 adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menjadi tantangan besar dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Provinsi Papua, dengan kondisi geografis yang luas dan terpencil, menghadapi kesulitan dalam membangun jaringan internet yang stabil dan merata di seluruh wilayah. Koneksi internet yang lambat dan tidak meratanya akses ke jaringan *broadband* di daerah-daerah terpencil turut menghambat kelancaran penyediaan layanan publik secara elektronik.

4. 4 Evaluasi Kontribusi Tahun 2023

a. Laju pertumbuhan ekonomi

Gambar 4. 21 Kontribusi Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022-2023



Sumber Data: EPD, 2024

LPE nasional pada tahun 2022 sebesar 5,31 persen, menurun sebesar 0,26 persen menjadi 5,05 persen pada tahun 2023. Hal ini diakibatkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi di 60 persen provinsi/daerah dari total 34 provinsi.

Pada evaluasi kontribusi capaian pertumbuhan ekonomi teridentifikasi 13 provinsi berkontribusi positif dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Barat merupakan dua daerah yang berkontribusi tertinggi terhadap perubahan pertumbuhan

ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat didorong oleh pertumbuhan lapangan usaha jasa keuangan dan industri pengolahan serta pertumbuhan ekspor luar negeri yang terakselerasi terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor pada sektor migas khususnya komoditas *Liquefied Natural Gas*. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat didorong oleh peningkatan kinerja pada Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi serta akselerasi pertumbuhan sektor pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi yang menjadi penopang utama peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta adanya upaya dari daerah untuk mendorong hilirisasi kegiatan usaha

primer dan pengembangan industri, seperti kawasan industri/kawasan ekonomi khusus skala besar di Belang-Belang, Kecamatan Kalukku.

Tiga provinsi yang cukup signifikan menyumbang perlambatan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu Nusa Tenggara Barat (22,6 persen), Papua (20,9 persen), dan Sulawesi Tengah (14,3 persen). Perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Sulawesi Tengah disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan lapangan usaha utama, seperti pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan. Provinsi Papua berkontribusi negatif sebesar 20,9 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

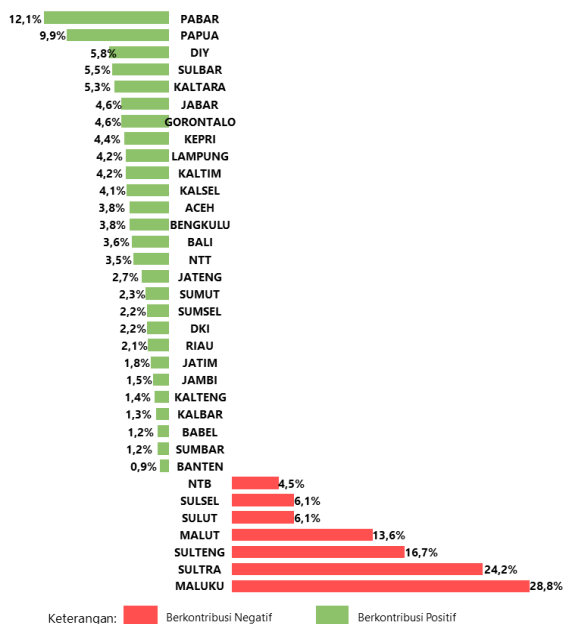
b. Tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2022 sebesar 9,57 persen, dan menurun sebesar 0,21 persen menjadi 9,36 persen pada tahun 2023. Penurunan didukung oleh kontribusi positif dari 80 persen provinsi/daerah dari total 34 provinsi terhadap penurunan TK nasional.

Pada evaluasi kontribusi capaian Tingkat Kemiskinan teridentifikasi 27 provinsi yang berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Tiga provinsi dengan kontribusi terbesar menurunkan TK yaitu Papua Barat, Papua, dan DIY.

Provinsi Papua Barat juga merupakan daerah dengan kontribusi tertinggi dalam mendorong penurunan tingkat kemiskinan nasional tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Penurunan tingkat kemiskinan di Papua Barat diindikasikan adanya dampak dari pertumbuhan sektor industri pengolahan dan pertambangan penggalian sehingga terjadi peningkatan kesempatan masyarakat untuk bekerja dan memperoleh penghasilan. Selain itu, Provinsi Papua berkontribusi terbesar kedua dalam menurunkan TK nasional yaitu sebesar 9,9 persen pada tahun 2022 – 2023.

Gambar 4. 23 Kontribusi Capaian Tingkat Kemiskinan Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022-2023

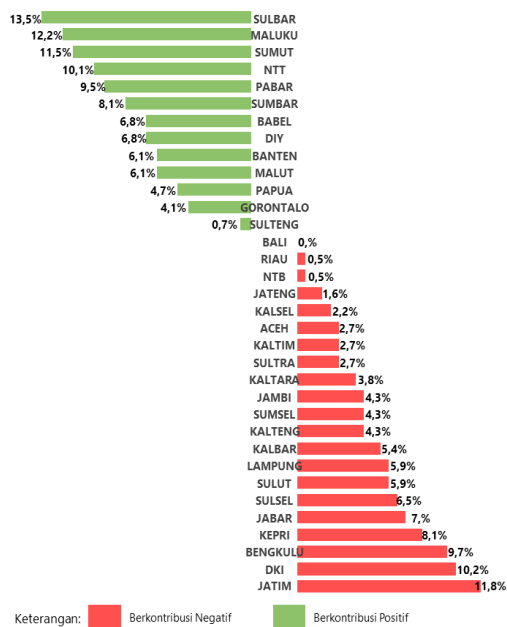


Sumber Data: EPD, 2024

Terdapat 7 provinsi cukup signifikan menghambat penurunan tingkat kemiskinan nasional tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Tiga provinsi yang berkontribusi terbesar yaitu Maluku (berkontribusi -24,79 persen), Sulawesi Tenggara (berkontribusi -24,24 persen), dan Sulawesi Tengah (berkontribusi -16,67 persen). Pada tiga provinsi tersebut terdapat kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

c. Rasio gini

Gambar 4. 25 Kontribusi Capaian Rasio Gini Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022-2023



Sumber Data: EPD, 2024

(berkontribusi +9,68 persen).

Empat belas provinsi cukup signifikan menyumbang penurunan terhadap rasio gini nasional tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Tiga dengan kontribusi terbesar untuk menurunkan RG yaitu Sulawesi Barat (berkontribusi -13,51 persen), Maluku (berkontribusi -12,16 persen), dan Sumatera Utara (berkontribusi -11,49 persen). Penurunan rasio gini di Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh beberapa upaya, seperti penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan lapangan usaha melalui peningkatan investasi,

Rasio Gini nasional pada September tahun 2022 sebesar 0,381 poin, naik sebesar 0,07 poin menjadi 0,388 poin pada Maret tahun 2023. Kenaikan diakibatkan oleh 60 persen provinsi/daerah dari total 34 provinsi yang berkontribusi negatif atau menghambat penurunan rasio gini nasional.

Pada evaluasi kontribusi capaian rasio gini teridentifikasi 20 provinsi yang berkontribusi menghambat penurunan rasio gini, tiga diantaranya, yaitu Jawa Timur (berkontribusi +11,83 persen), DKI (berkontribusi +10,22 persen) dan Bengkulu

peningkatan skala usaha petani dan nelayan, serta pemerataan akses dan kesempatan kerja.

Tiga provinsi yang cukup signifikan menyumbang peningkatan rasio gini nasional pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu Jawa Timur (11,8 persen), DKI Jakarta (10,2 persen), dan Bengkulu (9,7 persen). Untuk itu, diperlukan intervensi yang lebih akurat dan efektif untuk mengoptimalkan capaian indikator makro di provinsi-provinsi tersebut.

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang menghambat kenaikan rasio gini nasional tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 4,7 persen.

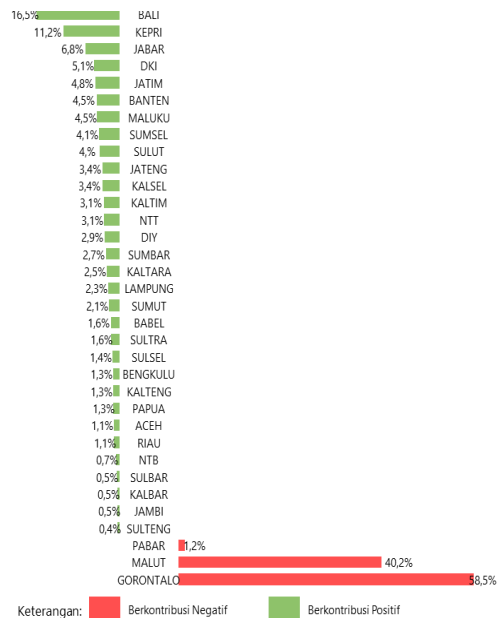
d. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka nasional pada tahun 2022 sebesar 5,86 persen, menurun sebesar 0,54 poin persentase menjadi 5,32 persen tahun 2023. Penurunan didukung oleh kontribusi positif dari 91 persen provinsi/daerah (31 provinsi) dari total 34 provinsi terhadap penurunan TPT nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi, teridentifikasi 31 provinsi yang berkontribusi menurunkan TPT nasional. Tiga provinsi dengan kontribusi terbesar pada penurunan TPT nasional, yaitu Bali (16,5 persen), Kep. Riau (11,2 persen) dan Jawa Barat (6,8 persen).

Terdapat tiga provinsi yang menghambat penurunan TPT nasional tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 yaitu Gorontalo (58,5 persen), Maluku Utara (40,2 persen), dan Papua Barat (1,2 persen). Sementara itu, Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang berkontribusi terhadap penurunan TPT nasional dengan share sebesar 1,3 persen.

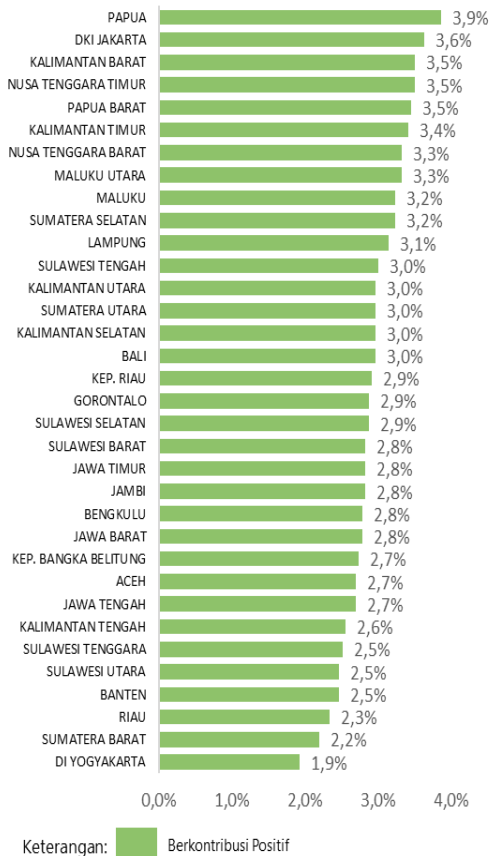
Gambar 4. 27 Kontribusi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022-2023



Sumber Data: EPD, 2024

e. Indeks pembangunan manusia

Gambar 4. 29 Kontribusi Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022-2023



Sumber Data: EPD, 2024

IPM nasional pada tahun 2022 sebesar 73,77 poin, meningkat sebesar 0,62 poin atau 0,84 persen menjadi 74,39 persen pada tahun 2023. Peningkatan didukung oleh kontribusi positif semua provinsi/daerah terhadap IPM nasional.

Pada evaluasi kontribusi capaian IPM, tiga provinsi yang menyumbang kontribusi terbesar terhadap perubahan capaian IPM nasional yaitu Papua (3,9 persen), diikuti DKI Jakarta (3,6%), dan Kalimantan Barat (3,5 persen).

Sementara itu, tiga provinsi yang memiliki kontribusi terendah terhadap perubahan IPM nasional tahun 2022-2023 yaitu DI Yogyakarta (1,9 persen), Sumatera Barat (2,2 persen), dan Riau (2,3 persen). Sementara itu, Provinsi Papua berkontribusi terbesar dalam mendukung peningkatan IPM dari tahun 2022-2023 sebesar 3,9 persen.

4. 5 Potret Capaian Indikator Utama Pembangunan

a. Sasaran Utama Visi

Sasaran Utama Visi Indonesia Emas pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang tersedia datanya di level Provinsi yaitu (1) PDRB perkapita (ADHB), (2) Kontribusi PDB Industri Pengolahan, (3) Tingkat kemiskinan, (4) Rasio Gini, (5) Kontribusi PDRB Provinsi, (6) Pertumbuhan ekonomi, (7) Indeks Inovasi Daerah, (8) Indeks Daya Saing Daerah, (9) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (10) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Berikut adalah gambaran capaian Indikator Utama Pembangunan pada Sasaran Utama Visi yang ada di 34 Provinsi.

Tabel 4. 11 Potret Capaian Sasaran Utama Visi di 34 Provinsi

Provinsi	Sasaran Utama Visi									
	PDRB per Kapita (ADHB)	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	Tingkat Kemiskinan	Rasio gini	Kontribusi PDRB Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	IPM	IKLH
	2023	2024	2024	2024	2023	2024	2023	2023	2024	2023
Aceh										
Sumatera Utara										
Sumatera Barat										
Riau										
Jambi										
Sumatera Selatan										
Bengkulu										
Lampung										
Kep. Bangka Belitung										
Kep. Riau										
DKI Jakarta										
Jawa Barat										
Jawa Tengah										
DI Yogyakarta										
Jawa Timur										
Banten										
Bali										
Nusa Tenggara Barat										
Nusa Tenggara Timur										
Kalimantan Barat										
Kalimantan Tengah										
Kalimantan Selatan										

Provinsi	Sasaran Utama Visi									
	PDRB per Kapita (ADHB)	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	Tingkat Kemiskinan	Rasio gini	Kontribusi PDRB Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	IPM	IKLH
	2023	2024	2024	2024	2023	2024	2023	2023	2024	2023
Kalimantan Timur	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Yellow
Kalimantan Utara	Green	Orange	Green	Green	Orange	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Green
Sulawesi Utara	Yellow	Orange	Yellow	Orange	Orange	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow
Sulawesi Tengah	Yellow	Green	Orange	Green	Yellow	Green	Orange	Orange	Orange	Green
Sulawesi Selatan	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Yellow
Sulawesi Tenggara	Yellow	Orange	Orange	Orange	Orange	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Green
Gorontalo	Orange	Orange	Orange	Orange	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Green
Sulawesi Barat	Orange	Orange	Orange	Yellow	Red	Yellow	Red	Yellow	Orange	Green
Maluku	Red	Orange	Orange	Green	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green
Maluku Utara	Yellow	Green	Green	Green	Red	Green	Yellow	Orange	Orange	Green
Papua Barat	Yellow	Green	Red	Orange	Red	Green	Red	Red	Red	Green
Papua	Yellow	Red	Orange	Yellow	Red	Yellow	Red	Red	Yellow	Green

Sumber: EPD, diolah

Keterangan Capaian Indikator :



Ketimpangan Pembangunan di Indonesia Masih Cukup Tinggi

Salah satu indikasi adanya ketimpangan pembangunan yaitu perbandingan PDRB perkapita terendah dan tertinggi yang cukup ekstrem. PDRB perkapita terendah berada di Provinsi NTT sementara yang tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, tingkat ketimpangan pendapatan juga masih tinggi di Wilayah Jawa dibandingkan daerah lainnya. Kemudian, kontribusi PDRB Provinsi di Kawasan Barat Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan Kawasan Timur. Pembangunan manusia juga masih menunjukkan ketimpangan, dimana IPM daerah timur masih belum optimal. Kemudian, Indeks inovasi daerah sudah cukup tinggi terutama di Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat sedangkan yang masih perlu dioptimalkan yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat.

Potret sasaran utama visi Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) secara umum perlu dioptimalkan kecuali indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Saat ini, PDRB perkapita Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2023 adalah sebesar Rp78,06 juta/orang/tahun. Capaian tersebut belum cukup optimal. Salah satu faktor penghambat utama adalah ketergantungan Provinsi Papua terhadap sektor ekstraktif, seperti pertambangan, yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB, ketergantungan yang berlebihan pada sektor ini membatasi diversifikasi ekonomi, sehingga jika terjadi penurunan harga komoditas, dampaknya langsung terasa pada kinerja ekonomi Provinsi Papua. Selain itu, keterbatasan infrastruktur fisik dan konektivitas antarwilayah di Provinsi Papua turut menjadi tantangan besar. Dengan kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau, distribusi barang dan jasa menjadi lebih mahal, yang berdampak pada tingginya biaya logistik dan rendahnya efisiensi produksi. Infrastruktur yang terbatas juga menghambat aksesibilitas terhadap pasar dan investor, sehingga mengurangi peluang bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi lain yang berpotensi, seperti pariwisata, industri pengolahan, dan sektor pertanian. Faktor lain, adalah realisasi investasi Provinsi Papua yang kurang optimal. Hal ini berimplikasi pada minimnya penciptaan nilai tambah ekonomi Provinsi Papua saat ini.

Kontribusi PDRB Industri pengolahan di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2024 sebesar 5,63%. Capaian tersebut masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya (1) Potensi SDA yang dimiliki Papua Selatan belum dikelola secara optimal untuk diolah menjadi input produksi; (2) Konektivitas dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi kendala utama dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor industri; (3) Masalah keamanan yang sering terjadi juga menjadi penghalang bagi perkembangan industri. Untuk itu, direkomendasikan kebijakan ke depan untuk (1) Mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan keuangan mikro untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program pelatihan keterampilan dan kredit mikro juga perlu diperkuat (DPPKP, Perbankan, Disnakertrans dan ESDM); (2) Meningkatkan iklim investasi melalui peningkatan kualitas regulasi dan transparansi dalam proses perizinan untuk mempercepat proses investasi dan mengurangi biaya administrasi (DPMPTSP); (3) Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarwilayah (KemenPU, DPUPR); dan (4) Mengimplementasikan pendekatan keamanan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah (Polri, TNI, Bakesbangpol).

Pada tahun 2024, capaian tingkat kemiskinan Provinsi Papua Selatan sendiri lebih rendah dibandingkan capaian wilayah Papua secara keseluruhan yaitu mencapai 17,44 persen. Hal tersebut masih perlu dioptimalkan. Pada daerah perkotaan, jumlah penduduk miskin mencapai 5,97 ribu orang, yang merepresentasikan 3,10 persen dari total populasi perkotaan. Di sisi lain, daerah perdesaan memiliki jumlah penduduk miskin yang jauh lebih tinggi, yaitu 86,23 ribu orang, dengan persentase penduduk miskin mencapai 25,64 persen.

Pada tahun 2024 capaian rasio gini di Provinsi Papua Selatan mencapai 0,404. Hal ini mengalami peningkatan rasio gini setelah capaiannya terpisah karena adanya pemekaran. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan angka rasio nasional pada Maret 2024 yang sebesar 0,379.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Selatan tahun 2024 sebesar 4,55 persen sementara capaian nasional sebesar 5,03 persen. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan aktivitas pada seluruh lapangan usaha terlihat dari pertumbuhan positif seluruh sektor. Lapangan Usaha Konstruksi masih menjadi kontributor terbesar pada perekonomian Papua Selatan sebesar 23,21 persen; diikuti Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,51 persen; serta Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,81 persen.

Capaian indeks inovasi daerah untuk Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2023 adalah sebesar 24,94. Capaian tersebut masih belum optimal dibandingkan daerah lainnya, salah satunya karena kualitas dan daya saing SDM yang masih rendah. Untuk itu, direkomendasikan kebijakan ke depan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan untuk memastikan adanya tenaga kerja yang kompeten dan siap industri (Kemenperin, Dinas KUKM dan Perindag, Disnakertrans ESDM). Kemudian, indeks daya saing daerah (IDSD) tahun 2023 diukur oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan mengadopsi kerangka konseptual dan metode pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum* (WEF). Empat komponen pembentuk daya saing dalam IDSD adalah: Lingkungan pendukung, Sumber daya manusia, Pasar, Ekosistem inovasi. Capaian IDSD Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) tahun 2023 adalah sebesar 2,91. Capaian tersebut juga masih kurang optimal jika dibandingkan lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Selatan pada tahun 2024 mencapai 68,86, meningkat sebesar 0,62 poin atau 0,91 persen. Peningkatan IPM

tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan.

Untuk Provinsi Papua Selatan, capaian IKLH tahun 2023 adalah sebesar 81,18. Capaian tersebut merupakan salah satu yang tertinggi dibandingkan daerah lainnya. Beberapa faktor pendukung terkait capaian IKLH tersebut adalah (1) masih tingginya tutupan lahan, (2) keterlibatan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan dan kawasan konservasi, (3) penetapan kawasan konservasi di berbagai wilayah hutan Papua, (4) Pelaksanaan program REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) telah memberikan kontribusi besar dalam mengurangi laju deforestasi dan melestarikan hutan di Papua, (5) Relatif masih minimnya kegiatan industrialisasi berat di Papua, sehingga pencemaran lingkungan dari aktivitas industri relatif rendah, (6) Papua memiliki wilayah yang luas dengan populasi yang relatif rendah. Ini mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan dibandingkan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.

b. Transformasi Sosial

Pada transformasi sosial, terdapat 7 indikator yang tersedia datanya hingga level provinsi yaitu (1) Umur Harapan Hidup, (2) Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita, (3) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*), (4) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*), (5) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, (6) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, dan (7) Harapan Lama Sekolah. Secara umum, potret capaian transformasi sosial di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) sudah cukup optimal. Berikut adalah potret capaian Transformasi Sosial di 34 Provinsi.

Tabel 4. 12 Potret Capaian Transformasi Sosial di 34 Provinsi

Provinsi	Transformasi Sosial						
	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
	2024	2023	2023	2023	2023	2024	2024
Aceh							
Sumatera Utara							
Sumatera Barat							
Riau							
Jambi							
Sumatera Selatan							
Bengkulu							
Lampung							

Provinsi	Transformasi Sosial						
	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
	2024	2023	2023	2023	2023	2024	2024
Kep. Bangka Belitung	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Yellow	Orange	Red
Kep. Riau	Green	Green	Red	Yellow	Yellow	Green	Yellow
DKI Jakarta	Green	Green	Green	Orange	Green	Green	Green
Jawa Barat	Green	Yellow	Green	Yellow	Orange	Yellow	Orange
Jawa Tengah	Green	Yellow	Green	Yellow	Orange	Red	Orange
DI Yogyakarta	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Green	Green
Jawa Timur	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Yellow
Banten	Green	Yellow	Green	Yellow	Orange	Yellow	Orange
Bali	Green	Green	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Nusa Tenggara Barat	Orange	Yellow	Orange	Green	Yellow	Red	Green
Nusa Tenggara Timur	Orange	Red	Red	Green	Yellow	Red	Yellow
Kalimantan Barat	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Red	Orange
Kalimantan Tengah	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Yellow	Yellow	Orange
Kalimantan Selatan	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Orange
Kalimantan Timur	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green
Kalimantan Utara	Yellow	Green	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow
Sulawesi Utara	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Green	Orange
Sulawesi Tengah	Orange	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Sulawesi Selatan	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Sulawesi Tenggara	Orange	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Gorontalo	Orange	Yellow	Green	Green	Yellow	Red	Orange
Sulawesi Barat	Orange	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Orange
Maluku	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green
Maluku Utara	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green
Papua Barat	Red	Yellow	Green	Red	Green	Yellow	Yellow
Papua	Orange	Orange	Green	Orange	Green	Green	Yellow

Sumber: EPD, diolah

Keterangan Capaian Indikator :



Usia Harapan Hidup adalah indikator yang menggambarkan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir dengan asumsi kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan tetap stabil sepanjang hidupnya. Selain itu, UHH juga mencerminkan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti akses layanan kesehatan, tingkat pendidikan, pola hidup sehat, dan kondisi ekonomi. Capaian UHH Papua (termasuk Papua Selatan) pada

tahun 2024 adalah sebesar 70,47 tahun. Capaian tersebut merupakan yang salah satu terendah dibandingkan daerah lainnya. Secara keseluruhan, rendahnya UHH di beberapa wilayah terutama di wilayah timur Indonesia disebabkan oleh kombinasi antara pendidikan rendah, minimnya tenaga kesehatan, serta tingkat kemiskinan yang tinggi, yang berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan dasar.

Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan; dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari penjumlahan angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka ini menggambarkan kualitas pengobatan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis minimal 90%. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) tahun 2023 adalah sebesar 77,50 persen. Angka tersebut merupakan salah satu capaian terendah dibandingkan daerah lainnya. Sementara itu, cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang ditemukan dapat terjangkau oleh program Pengendalian Tuberkulosis. Capaian di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) termasuk yang optimal jika dibandingkan lainnya. Capaian tahun 2023 mencapai 102,5 persen.

Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2023 sebesar 28,60 persen. Provinsi Papua masih harus bekerja keras dalam penanganan *stunting*. Beberapa faktor penghambat masih tingginya capaian prevalensi *stunting* adalah (1) Kurangnya asupan gizi yang memadai; (2) Infrastruktur dan akses layanan kesehatan yang masih terbatas; (3) Ketimpangan sosial dan ekonomi; dan (4) Masih terbatasnya akses air bersih (*stunting* tertinggi di Asmat sebesar 55%).

Kemudian, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun di Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2024 adalah sebesar 10,70 tahun. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi di Wilayah Maluku - Papua. Sementara, capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) tahun 2024 adalah sebesar 13,72 tahun.

c. Transformasi Ekonomi

Pada transformasi ekonomi, terdapat 5 indikator yang tersedia datanya hingga level provinsi yaitu (1) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, (2) Tingkat Pengangguran Terbuka, (3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Perempuan, (4) Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan (5) Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan. Berikut adalah potret capaian Transformasi Ekonomi di 34 Provinsi.

Tabel 4. 13 Potret Capaian Transformasi Ekonomi di 34 Provinsi

Provinsi	Transformasi Ekonomi				
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)
	2023	2024	2023	2023	2023
Aceh					
Sumatera Utara					
Sumatera Barat					
Riau					
Jambi					
Sumatera Selatan					
Bengkulu					
Lampung					
Kep. Bangka Belitung					
Kep. Riau					
DKI Jakarta					
Jawa Barat					
Jawa Tengah					
DI Yogyakarta					
Jawa Timur					
Banten					
Bali					
Nusa Tenggara Barat					
Nusa Tenggara Timur					
Kalimantan Barat					
Kalimantan Tengah					
Kalimantan Selatan					
Kalimantan Timur					
Kalimantan Utara					
Sulawesi Utara					
Sulawesi Tengah					
Sulawesi Selatan					
Sulawesi Tenggara					
Gorontalo					
Sulawesi Barat					
Maluku					
Maluku Utara					
Papua Barat					
Papua					

Sumber: EPD, diolah

Keterangan Capaian Indikator :



Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) dapat dikatakan belum optimal jika dilihat dari besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Papua jika dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya. Salah satu sektor pariwisata yang menjadi komponen perhitungan pendapatan regional sektor pariwisata adalah penyediaan akomodasi dan makan minum. Capaian Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Provinsi Papua pada tahun 2023 adalah sebesar 0,60 persen. Rasio ini mencerminkan rendahnya peran sektor sektor akomodasi dan makan minum dalam perekonomian Provinsi Papua. Salah satu faktor penghambat utama adalah kurangnya pengembangan infrastruktur pariwisata di Provinsi Papua. Meskipun Provinsi Papua memiliki potensi wisata khususnya wisata alam yang luar biasa termasuk keberagaman budaya, namun infrastruktur pendukung seperti aksesibilitas, akomodasi, serta fasilitas wisata lainnya masih terbatas dan kurang memadai. Di sisi lain, tantangan sosial-ekonomi juga turut memengaruhi perkembangan sektor akomodasi dan makan minum di Provinsi Papua. Salah satunya adalah rendahnya daya beli masyarakat di Provinsi Papua, yang berdampak pada rendahnya permintaan terhadap jasa akomodasi dan makanan. Biaya akomodasi dan biaya transportasi, khususnya biaya pesawat, merupakan faktor signifikan yang memengaruhi perkembangan sektor akomodasi dan makan minum di Provinsi Papua. Salah satu tantangan utama yang dihadapi sektor pariwisata di Papua adalah tingginya biaya transportasi udara, yang menjadi kendala besar bagi wisatawan, baik domestik dari luar daerah maupun wisatawan internasional.

Sementara itu, setelah adanya pemekaran, capaian TPT Provinsi Papua Selatan pada tahun 2024 mengalami peningkatan hingga mencapai 4,05 persen. Pada Agustus 2024, TPT mengalami peningkatan sebesar 0,67 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Peningkatan tersebut terjadi pada dua kabupaten yaitu Kab. Merauke dan Kab. Boven Digoel.

Salah satu indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan indikator yang menunjukkan rasio jumlah penduduk yang tercakup sebagai angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Kemudian capaian TPAK Perempuan Provinsi Papua Selatan tahun 2023 adalah sebesar 51,14 persen. Hal tersebut lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki yaitu sebesar 76,89 persen. Namun demikian, capaian TPAK Papua (termasuk Papua Selatan) adalah sebesar 66,27 persen.

Hal ini didukung oleh sektor pertanian yang merupakan pekerjaan utama bagi sebagian besar perempuan. Untuk itu, direkomendasikan kebijakan ke depan (1) Mendorong optimalisasi kawasan sentra produksi pangan (Kementan, DPPKP); dan (2) Mendorong dan mendukung kewirausahaan perempuan dengan menyediakan pelatihan bisnis, akses pasar, dan pendampingan (Dinas KUKM dan Perindag).

Selanjutnya, capaian rasio PMTB terhadap PDRB Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2023 adalah sebesar 31 persen. Investasi tersebar di seluruh provinsi di Papua, dengan porsi terbesar berada di Papua induk. Penanaman modal asing (PMA) di wilayah Papua paling banyak direalisasikan pada sektor primer yaitu pertambangan dan penggalian sebesar 90 persen dari total PMA yang masuk ke Papua. Investasi tersebut merupakan pengembangan tambang bawah tanah di Tembagapura yang terus berlangsung sepanjang tahun 2023.

Kemudian, capaian Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan di Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2023 adalah sebesar 29,10 persen. Hal ini perlu dioptimalkan dengan mendorong penyediaan rumah layak huni dan terjangkau.

d. Transformasi Tata Kelola

Pada transformasi tata kelola, terdapat 4 indikator yang tersedia datanya hingga level provinsi yaitu (1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (2) Indeks Pelayanan Publik (IPP), (3) Indeks Integritas Nasional, dan (4) Indeks Demokrasi Provinsi. Secara umum, potret capaian transformasi tata kelola di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) masih perlu dioptimalkan. Berikut adalah potret capaian Transformasi Tata Kelola di 34 Provinsi.

Tabel 4. 14 Potret Capaian Transformasi Tata Kelola di 34 Provinsi

Provinsi	Transformasi Tata Kelola			
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks Integritas Nasional	Indeks Demokrasi Provinsi
	2023	2022	2023	2023
Aceh				
Sumatera Utara				
Sumatera Barat				
Riau				
Jambi				
Sumatera Selatan				
Bengkulu				
Lampung				
Kep. Bangka Belitung				
Kep. Riau				

Provinsi	Transformasi Tata Kelola			
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks Integritas Nasional	Indeks Demokrasi Provinsi
	2023	2022	2023	2023
DKI Jakarta	Green	Green	Green	Green
Jawa Barat	Green	Green	Yellow	Green
Jawa Tengah	Green	Green	Green	Light Green
DI Yogyakarta	Green	Green	Green	Green
Jawa Timur	Light Green	Green	Green	Green
Banten	Light Green	Green	Yellow	Yellow
Bali	Green	Green	Green	Green
Nusa Tenggara Barat	Light Green	Orange	Yellow	Orange
Nusa Tenggara Timur	Light Green	Red	Orange	Yellow
Kalimantan Barat	Light Green	Green	Green	Light Green
Kalimantan Tengah	Orange	Green	Orange	Yellow
Kalimantan Selatan	Orange	Light Green	Light Green	Light Green
Kalimantan Timur	Orange	Orange	Light Green	Light Green
Kalimantan Utara	Orange	Yellow	Yellow	Light Green
Sulawesi Utara	Orange	Orange	Light Green	Yellow
Sulawesi Tengah	Yellow	Yellow	Orange	Light Green
Sulawesi Selatan	Yellow	Light Green	Light Green	Yellow
Sulawesi Tenggara	Orange	Light Green	Light Green	Yellow
Gorontalo	Yellow	Green	Yellow	Light Green
Sulawesi Barat	Yellow	Orange	Yellow	Orange
Maluku	Orange	Yellow	Orange	Orange
Maluku Utara	Orange	Light Green	Orange	Red
Papua Barat	Orange	Orange	Red	Red
Papua	Red	Orange	Orange	Red

Sumber: EPD, diolah

Keterangan Capaian Indikator :



Capaian Indeks SPBE Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2023 sebesar 1,91. Capaian tersebut merupakan yang terendah dan perlu dioptimalkan. Adapun faktor penghambat capaian tersebut yaitu (1) Keterbatasan infrastruktur pendukung (misal IT), dan (2) Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, direkomendasikan (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan untuk memastikan adanya tenaga kerja yang kompeten dan siap industri (Kemenperin, Dinas KUKM dan Perindag, Disnakertrans ESDM); (2) Mengadakan pelatihan dan edukasi bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat umum tentang manfaat dan penerapan SPBE, serta cara penggunaannya yang efektif (Diskominfotik); dan (3) Meningkatkan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi di Papua dengan memperbaiki infrastruktur jaringan internet dan memastikan akses yang merata ke teknologi canggih (Kemenkomdigi, Diskominfotik); dan (4) Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan SPBE, termasuk server, perangkat keras, dan sistem keamanan informasi (Kemenkomdigi, Diskominfotik).

Indeks pelayanan publik (IPP) mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang berdasarkan 6 aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan. Capaian IPP Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) tahun 2023 adalah sebesar 3,27. Salah satu faktor penghambat utama dalam pencapaian IPP di Papua adalah keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. Sebagian besar daerah di Papua, terutama yang terletak di wilayah pedalaman, masih kesulitan dalam hal akses menuju fasilitas publik, seperti rumah sakit, sekolah, dan kantor pelayanan pemerintah. Jaringan transportasi yang terbatas dan kondisi geografis yang sulit dijangkau memperburuk distribusi pelayanan publik, yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Keterbatasan SDM juga menjadi tantangan besar, kurangnya tenaga profesional yang terampil di sektor-sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan, di daerah-daerah tertentu di Papua.

Capaian indeks demokrasi Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2023 sebesar 67,64 atau meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama ditopang oleh lonjakan Aspek Kebebasan yang naik cukup signifikan, yaitu dari 67,23 pada 2022 menjadi 79,98 pada 2023. Kenaikan ini mengindikasikan adanya ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat yang lebih besar, serta kemungkinan adanya perbaikan iklim politik dan jaminan hak-hak sipil. Di sisi lain, Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi hanya mengalami sedikit penurunan, dari 64,63 ke 64,50, menandakan bahwa meskipun relatif stabil, kapasitas institusi demokrasi memerlukan perhatian agar dapat terus berkembang secara konsisten. Namun, Aspek Kesetaraan mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni dari 67,85 pada 2022 menjadi 60,10 pada 2023.

e. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Pada transformasi sosial budaya dan ekologi, terdapat 6 indikator yang tersedia datanya hingga level provinsi yaitu (1) Indeks Pembangunan Kebudayaan, (2) Indeks Kerukunan Umat Beragama, (3) Indeks Ketimpangan Gender, (4) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*), (5) Indeks Risiko Bencana, dan (6) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipa. Secara umum, Capaian Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi di Provinsi Papua masih perlu dioptimalkan kecuali Indeks Kerukunan Umat Beragama. Berikut adalah potret capaian Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi di 34 Provinsi.

Tabel 4. 15 Potret Capaian Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi di 34 Provinsi

Provinsi	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi					
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
	2023	2024	2022	2023	2023	2023
Aceh	Yellow	Red	Yellow	Yellow	Orange	Yellow
Sumatera Utara	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Sumatera Barat	Yellow	Red	Yellow	Yellow	Orange	Yellow
Riau	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Red
Jambi	Yellow	Red	Orange	Yellow	Yellow	Yellow
Sumatera Selatan	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Yellow
Bengkulu	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Orange	Yellow
Lampung	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Red
Kep. Bangka Belitung	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Red	Orange
Kep. Riau	Yellow	Green	Green	Yellow	Green	Green
DKI Jakarta	Yellow	Orange	Green	Green	Green	Green
Jawa Barat	Yellow	Orange	Yellow	Green	Yellow	Orange
Jawa Tengah	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Yellow
DI Yogyakarta	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Orange
Jawa Timur	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Banten	Orange	Red	Yellow	Green	Yellow	Orange
Bali	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green
Nusa Tenggara Barat	Yellow	Red	Red	Green	Green	Yellow
Nusa Tenggara Timur	Orange	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Kalimantan Barat	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow
Kalimantan Tengah	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow
Kalimantan Selatan	Yellow	Orange	Yellow	Green	Yellow	Green
Kalimantan Timur	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Green
Kalimantan Utara	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Green
Sulawesi Utara	Orange	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow
Sulawesi Tengah	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Sulawesi Selatan	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Orange	Yellow
Sulawesi Tenggara	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Yellow
Gorontalo	Orange	Orange	Green	Yellow	Green	Yellow
Sulawesi Barat	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Orange
Maluku	Yellow	Green	Orange	Red	Red	Yellow
Maluku Utara	Yellow	Orange	Orange	Red	Red	Green
Papua Barat	Red	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Orange
Papua	Red	Green	Yellow	Red	Yellow	Orange

Sumber: EPD, diolah

Keterangan Capaian Indikator :



Salah satu tolok ukur dalam merepresentasikan pembangunan kebudayaan di Indonesia adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Indeks ini memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan secara lebih holistik, yang mencakup

dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Capaian IPK Papua pada tahun 2023 adalah sebesar 48,52. Capaian tersebut masih berada di bawah nasional yang tercatat sebesar 57,13. Beberapa faktor penghambat Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Papua yaitu (1) Kurangnya wadah untuk menampilkan kreasi dalam seni tari membuat anak muda Papua untuk terlibat dalam tari berkurang, dan (2) Rendahnya budaya literasi di Papua karena minimnya tenaga guru, fasilitas pendidikan yang kurang memadai dan kurangnya buku pelajaran yang menjadi pegangan siswa.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan salah satu alat ukur yang digunakan dalam merepresentasikan pembangunan bidang agama. Indikator ini menggambarkan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan menghargai, kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin tinggi capaian IKUB, maka semakin baik kondisi kehidupan intra dan antar umat beragama yang saling berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, serta menghormati perbedaan dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Indikator ini diukur melalui survei menggunakan instrumen yang memuat aspek toleransi, kerjasama, dan kesetaraan. Capaian IKUB Provinsi Papua pada tahun 2024 adalah sebesar 80,88, lebih tinggi di atas capaian nasional sebesar 76,47.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran untuk mengukur sejauh mana ketimpangan gender berdampak pada pencapaian pembangunan dalam tiga aspek, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. IKG dihitung berdasarkan skala 0–1, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar. Angka IKG Provinsi Papua pada tahun 2022 adalah sebesar 0,515. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender di Papua Barat masih cukup tinggi.

Salah satu tujuan SDGs dalam hal hak atas pangan salah satunya adalah tujuan mengentaskan kelaparan, mencapai keamanan pangan, dan perbaikan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Salah satu indikator digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu adalah PoU (*Prevalence of Undernourishment*). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat

hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Capaian PoU Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2023 adalah sebesar 35,63. Artinya hingga tahun 2023, masih terdapat 35,63 persen penduduk yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Terdapat sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi perkembangan indikator ini di Provinsi Papua seperti keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur yang belum memadai, seperti jaringan jalan dan transportasi yang belum memadai, hal ini memperburuk masalah distribusi pangan di Provinsi Papua. Hal ini menjadi salah satu penyebab adanya ketidakstabilan pasokan pangan dan ketidaktersediaan pangan yang bergizi di Provinsi Papua. Kemudian, masih tingginya jumlah penduduk miskin juga menjadi salah satu tantangan. Untuk itu, direkomendasikan kebijakan ke depan yaitu (1) Memastikan keterjangkauan harga kebutuhan bahan makanan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin (Dinsos dan PPPA); (2) Memperbaiki dan memperbarui satu data kemiskinan dengan memanfaatkan Data Regsosek agar bantuan lebih tepat sasaran (BPS, Bappenas, Dinsos); dan (3) Pemberian Kartu Usaha Afirmatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Kemensos, Dinsos).

Indeks Risiko Bencana adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Provinsi Papua Selatan merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua dengan ibukota Kab. Merauke. Wilayah Papua Selatan berada di dataran rendah dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini dengan lahan didominasi rawa-rawa dan sungai besar. Selain itu, Provinsi Papua Selatan juga berbatasan langsung dengan Laut Arafura dan Laut Aru. Berdasarkan data Geoportal Data Bencana, pada tahun 2023 tercatat dua kejadian bencana yang terjadi di Papua Selatan yaitu bencana banjir. Nilai indeks risiko bencana Provinsi Papua Selatan yaitu sebesar 138,20 dengan kategori kelas risiko sedang.

Capaian persentase rumah tangga dengan akses air minum perpipaan Provinsi Papua adalah 7,47%. Berdasarkan kategori UNICEF, Papua merupakan provinsi dengan cakupan jaringan air minum perpipaan rendah (<20%). Berdasarkan Peta Jalan Induk Air Minum Aman Indonesia (2020 – 2030) yang dipublikasikan oleh UNICEF, terdapat beberapa isu dan tantangan besar yang dihadapi oleh sektor air minum di Indonesia. Pertama, penambahan penduduk dan tekanan urbanisasi. Terdapat kesenjangan layanan dari infrastruktur untuk menyediakan pasokan air baku yang aman bagi penduduk Indonesia. Selain itu, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi akan berhadapan dengan isu-isu pemerataan, seperti keterbatasan akses terhadap air dan sanitasi dan akan berkontribusi secara signifikan terhadap masalah perkotaan. Kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim akan menyebabkan musim

kemarau menjadi lebih panjang dan musim hujan akan lebih pendek tapi lebih tinggi intensitasnya, mempengaruhi kuantitas dan kualitas sumber air minum. Ketiga, penurunan kualitas sumber air di Indonesia, baik air sungai maupun air tanah, serta adanya rekontaminasi dan pemborosan air. Keempat, cakupan dan kinerja SPAM yang masih rendah terlihat dari kurang dari 50% populasi yang menggunakan air perpipaan. Terakhir, sumber pendanaan utama untuk pengembangan, peningkatan, dan perluasan kapasitas SPAM di Indonesia berasal dari APBN/D, DAK, pinjaman dan hibah luar negeri, pinjaman bank, KPBU, dana CSR, investasi BUMD. Namun, terdapat kesenjangan pembiayaan terkait kontribusi Pemda untuk infrastruktur penyediaan air minum, penurunan investasi Pemerintah Pusat di sektor air minum, dan terbatasnya kapasitas pengelola SPAM untuk mengakses dana alternatif. Di Papua sendiri, masih menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya akses terhadap air bersih. Untuk itu, direkomendasikan kebijakan ke depan (1) Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan di terutama untuk daerah dengan prevalensi *stunting* tinggi (KemenPU, DPUPR); (2) Meningkatkan infrastruktur dan layanan dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi di kawasan perumahan untuk memastikan kualitas hidup yang layak (KemenPU, DPUPR, KemenPKP).



BAB V

Kesimpulan & Rekomendasi

“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5. 1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, berikut terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

- Secara umum, capaian makro Provinsi Papua Barat yang sudah optimal yaitu tingkat pengangguran terbuka. Sementara capaian makro yang perlu dioptimalkan yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, rasio gini, dan indeks pembangunan manusia.
- Berdasarkan scoring hasil kinerja tahun 2024, indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Selatan pada tahun 2024 masih perlu dioptimalkan. LPE Provinsi Papua Selatan sudah mencapai lebih dari 90 persen target RKP kewilayahan dan lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Namun demikian, perlu dioptimalkan jika dibandingkan capaian wilayah setara dan nasional.
- Provinsi Papua Selatan merupakan daerah pemekaran dari Provinsi Papua. Capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Selatan selama dua tahun terakhir terus menguat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Selatan pada dua tahun terakhir masih berada di bawah nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Selatan tahun 2024 sebesar 4,55 persen sementara capaian nasional sebesar 5,03 persen. Beberapa faktor yang menghambat tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Selatan yaitu (1) Perlambatan kinerja sektor pertanian karena adanya pergeseran masa panen. Secara pangsa, produksi padi didominasi di Papua Selatan dengan pangsa sebesar 99% di antara Wilayah Papua lainnya; (2) Belum optimalnya konektivitas wilayah; (3) Kualitas dan daya saing SDM yang masih rendah; dan (4) Konektivitas dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi kendala utama dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor industri.
- Scoring kinerja indikator tingkat kemiskinan Provinsi Papua Selatan menunjukkan kinerja yang perlu dioptimalkan juga. Walaupun sudah mencapai target RKP Kewilayahan, namun masih perlu dioptimalkan jika dibandingkan capaian wilayah setara dan nasional.
- Capaian tingkat kemiskinan Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada periode tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami penurunan. Namun demikian masih berada jauh di atas nasional. Kemudian, pada tahun 2024, capaian tingkat kemiskinan Provinsi Papua Selatan sendiri lebih rendah dibandingkan capaian

wilayah Papua secara keseluruhan yaitu mencapai 17,44 persen. Terdapat beberapa faktor yang menghambat terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Selatan yaitu (1) Tingginya garis kemiskinan yang jauh di atas nasional, dengan garis kemiskinan menjadi faktor dominan; (2) Kurang optimalnya program bantuan langsung kepada masyarakat; dan (3) Kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin; serta (4) Pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan menyebabkan ketimpangan pendapatan

- Selanjutnya, untuk skoring kinerja indikator TPT Provinsi Papua Selatan menunjukkan kinerja yang belum optimal, dimana belum mencapai 90% target RKP kewilayahan, wilayah setara dan capaian nasional.
- Capaian tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) selama periode 2020 hingga 2023 terus menurun. Kemudian, setelah adanya pemekaran, capaian TPT Provinsi Papua Selatan pada tahun 2024 mengalami peningkatan hingga mencapai 4,05 persen. Pada Agustus 2024, TPT mengalami peningkatan sebesar 0,67 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Peningkatan tersebut terjadi pada dua kabupaten yaitu Kab. Merauke dan Kab. Boven Digoel. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu sebesar 50,44 persen.
- Lebih lanjut, untuk skoring kinerja rasio gini Provinsi Papua Selatan menunjukkan kinerja yang perlu dioptimalkan karena capaiannya masih lebih tinggi dibandingkan capaian wilayah setara, dan capaian nasional.
- Capaian rasio gini Provinsi Papua termasuk Papua Selatan pada periode 2020 hingga 2023 terus menurun walaupun sempat stagnan pada 2022 hingga 2023. Kemudian, pada tahun 2024 capaian rasio gini di Provinsi Papua Selatan mencapai 0,404. Hal ini mengalami peningkatan rasio gini setelah capaiannya terpisah karena adanya pemekaran. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka rasio nasional pada Maret 2024 yang sebesar 0,379. Adapun faktor yang ditengarai menghambat belum optimalnya rasio gini Provinsi Papua Selatan yaitu (1) Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya program pelatihan membatasi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih mampu; (2) Papua Selatan terletak di daerah pegunungan yang sulit dijangkau, sehingga infrastruktur yang memadai masih terbatas; dan (3) Pembangunan yang

tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan menyebabkan ketimpangan pendapatan.

- Skoring kinerja untuk indikator IPM Papua Selatan juga masih perlu dioptimalkan terutama jika dibandingkan capaian nasional, wilayah setara dan realisasi tahun sebelumnya.
- Capaian IPM Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada periode 2020 hingga 2021 terus meningkat namun lebih rendah dibandingkan nasional. Sejak pemekaran tahun 2022, capaian IPM Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022 hingga 2024 terus mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Selatan pada tahun 2024 mencapai 68,86, meningkat sebesar 0,62 poin atau 0,91 persen. Terdapat faktor yang menghambat belum optimalnya pencapaian IPM di Provinsi Papua Selatan yaitu (1) Kualitas dan daya saing SDM yang masih rendah; dan (2) Kesenjangan sosial mencakup ekonomi, pendidikan, kesehatan, wilayah.
- capaian IKLH tahun 2023 adalah sebesar 81,18. Capaian tersebut merupakan salah satu yang tertinggi dibandingkan daerah lainnya. Beberapa faktor pendukung terkait capaian IKLH tersebut adalah (1) masih tingginya tutupan lahan, (2) keterlibatan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan dan kawasan konservasi, (3) penetapan kawasan konservasi di berbagai wilayah hutan Papua, (4) Pelaksanaan program REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) telah memberikan kontribusi besar dalam mengurangi laju deforestasi dan melestarikan hutan di Papua, (5) Relatif masih minimnya kegiatan industrialisasi berat di Papua, sehingga pencemaran lingkungan dari aktivitas industri relatif rendah, (6) Papua memiliki wilayah yang luas dengan populasi yang relatif rendah. Ini mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan dibandingkan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.
- Capaian TPAK Perempuan Provinsi Papua Selatan tahun 2023 adalah sebesar 51,14 persen. Hal tersebut lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki yaitu sebesar 76,89 persen. Namun demikian, capaian TPAK Papua (termasuk Papua Selatan) adalah sebesar 66,27 persen. Hal ini didukung oleh sektor pertanian yang merupakan pekerjaan utama bagi sebagian besar perempuan.
- Capaian persentase jalan mantap Provinsi Papua pada tahun 2024 adalah sebesar 28,59 persen. Masih rendahnya capaian kondisi mantap jalan dipengaruhi oleh biaya konstruksi yang tinggi dan faktor geografis Papua yang cukup menantang.

- Skor PPH Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2023 sebesar 79 masih lebih rendah dibandingkan capaian nasional yaitu sebesar 94,1. SPPH memberikan gambaran mengenai keragaman konsumsi pangan di masyarakat. Semakin tinggi skor PPH, semakin beragam pola konsumsi pangan yang diterapkan oleh individu atau rumah tangga. Meskipun capaian SPPH tersebut belum ideal, karena skor PPH yang optimal seharusnya mencapai 100, nilai tersebut masih termasuk dalam kategori baik. Beberapa faktor penghambat masih rendahnya SPPH Provinsi Papua yaitu (1) Masih rendahnya konsumsi pangan lokal akibat perubahan pola hidup masyarakat yang lebih suka mengonsumsi beras; (2) Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Kandungan Gizi Pangan Lokal; (3) Ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras.
- Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita di Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2023 sebesar 28,60 persen. Provinsi Papua masih harus bekerja keras dalam penanganan *stunting*. Beberapa faktor penghambat masih tingginya capaian prevalensi *stunting* adalah (1) Kurangnya asupan gizi yang memadai; (2) Infrastruktur dan akses layanan kesehatan yang masih terbatas; (3) Ketimpangan sosial dan ekonomi; dan (4) Masih terbatasnya akses air bersih (*stunting* tertinggi di Asmat sebesar 55%).
- Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Capaian PoU Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2023 adalah sebesar 35,63. Artinya hingga tahun 2023, masih terdapat 35,63 persen penduduk yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Terdapat sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi perkembangan indikator ini di Provinsi Papua seperti keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur yang belum memadai, seperti jaringan jalan dan transportasi yang belum memadai, hal ini memperburuk masalah distribusi pangan di Provinsi Papua. Hal ini menjadi salah satu penyebab adanya ketidakstabilan pasokan pangan dan ketidaktersediaan pangan yang bergizi di Provinsi Papua. Kemudian, masih tingginya jumlah penduduk miskin juga menjadi salah satu tantangan.
- Capaian persentase rumah tangga dengan akses air minum perpipaan Provinsi Papua adalah 7,47%. Berdasarkan kategori UNICEF, Papua merupakan provinsi

dengan cakupan jaringan air minum perpipaan rendah (<20%). Salah satu kendalanya adalah masih terbatasnya akses terhadap air bersih.

- Kontribusi PDRB Industri pengolahan di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2024 sebesar 5,63%. Capaian tersebut masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya (1) Potensi SDA yang dimiliki Papua Selatan belum dikelola secara optimal untuk diolah menjadi input produksi; (2) Konektivitas dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi kendala utama dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor industri; (3) Masalah keamanan yang sering terjadi juga menjadi penghalang bagi perkembangan industri.
- Pada tahun 2023, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Papua tercatat kurang optimal yang tercatat sebesar 1,91. Capaian tersebut merupakan yang terendah dibandingkan daerah lainnya. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan signifikan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Papua. Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan laporan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, rendahnya skor SPBE di provinsi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terkait dengan kesiapan infrastruktur digital, kualitas sumber daya manusia, serta keberlanjutan program-program transformasi digital yang telah diinisiasi.
- Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Papua (termasuk Papua Selatan) pada tahun 2023 adalah sebesar 48,52. Capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan nasional yang tercatat sebesar 57,13. Capaian IPK Papua merupakan yang terendah kedua dibandingkan daerah lainnya. Beberapa faktor penghambat Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Papua yaitu (1) Kurangnya wadah untuk menampilkan kreasi dalam seni tarian membuat anak muda Papua untuk terlibat dalam tarian berkurang, dan (2) Rendahnya budaya literasi di Papua karena minimnya tenaga guru, fasilitas pendidikan yang kurang memadai dan kurangnya buku pelajaran yang menjadi pegangan siswa.

5. 2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, berikut terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

- Untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Papua Barat, terdapat beberapa rekomendasi ke depan yaitu (1) Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis SDA (pertanian, perkebunan, dan perikanan) (Kementan, KemenKP, Dinas KUMKM dan Perindag,

DPPKP); (2) Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarwilayah (KemenPU, DPUPR); (3) Melakukan reboisasi dan rehabilitasi hutan serta lahan kritis untuk meningkatkan kemampuan lahan dalam menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir dan tanah longsor (KLHK, Dinas LHKP); (4) Pemanfaatan program pemerintah melalui APBN untuk asuransi pertanian JASINDO dalam rangka memitigasi dampak perubahan iklim (Kementan, DPPKP).

- Dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan di Provinsi Papua Selatan, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yaitu (1) Memastikan keterjangkauan harga kebutuhan bahan makanan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin (Dinsos dan PPPA); (2) Memperbaiki dan memperbarui satu data kemiskinan dengan memanfaatkan Data Regsosek agar bantuan lebih tepat sasaran (BPS, Bappenas, Dinsos); (3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan seperti *telemedicine* dan pelayanan kesehatan bergerak (Kemenkes dan Dinkes); dan (4) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari dan sekolah berpola asrama (Kemendikdasmen, Disdikbud).
- Rekomendasi ke depan untuk terus menekan angka pengangguran di Provinsi Papua Selatan yaitu Mengembangkan program pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal Papua Selatan, termasuk kerjasama dengan lembaga pendidikan dan dunia usaha untuk memberikan pelatihan yang relevan dan efektif (Kemnaker, Disnakertrans dan ESDM).
- Guna terus menurunkan capaian rasio gini di Provinsi Papua Selatan, terdapat beberapa rekomendasi ke depan antara lain (1) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari dan sekolah berpola asrama (Kemendikdasmen, Disdikbud); (2) Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarwilayah (KemenPU, DPUPR); dan (3) Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis SDA (pertanian, perkebunan, dan perikanan) (Kementan, KemenKP, Dinas KUMKM dan Perindag, DPPKP).
- Untuk terus meningkatkan capaian IPM di Provinsi Papua Selatan direkomendasikan kebijakan di antaranya (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan untuk memastikan adanya tenaga kerja yang kompeten dan siap industri (Kemenperin, Kemendiksisaintek,

Disnakertrans dan ESDM); (2) Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarwilayah (KemenPU, DPUPR); dan (3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari dan sekolah berpola asrama (Kemendikdasmen, Disdikbud); dan (4) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan seperti *telemedicine* dan pelayanan kesehatan bergerak (Kemenkes dan Dinkes).

- Untuk terus menjaga kualitas lingkungan hidup di Provinsi Papua secara umum, direkomendasikan beberapa kebijakan di antaranya (1) Peningkatan pengawasan kualitas lingkungan, wilayah hutan, wilayah perairan, dan wilayah konservasi melalui pemanfaatan teknologi khususnya teknologi satelit untuk pengawasan tutupan hutan (Dinas LH, Dishut, Kemen LH, Kemenhut, BIG); (2) Mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi melalui peningkatan keterlibatan masyarakat luas (Dinas LH, Dishut, Kemen LH, Kemen ATR, Kemenhut); (3) Memperluas cakupan program REDD+ di wilayah Papua secara umum untuk mengurangi deforestasi dan meningkatkan pengelolaan hutan primer (Dinas LH, Dishut, Bappenas, Kemen LH, Kemenhut); (4) Mendorong pembentukan zona lindung adat untuk melindungi hutan primer (Dinas LH, Dishut, Kemen LH, Kemenhut, KemenATR); (5) Mendorong penguatan regulasi insentif/disinsentif untuk memastikan aktivitas industri tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan seperti penerapan ESG bagi sektor usaha (Dinas LH, Dishut, KemenLH, Kemenhut); (6) Mendorong transisi energi melalui penerapan EBT berbasis sumber daya EBT lokal (Dinas ESDM, Kemen ESDM); dan (7) Pengembangan ekowisata dalam rangka melestarikan kawasan hutan primer sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal (Bappeda, Dinas LH, Dinas Kehutanan, Dispar, Kemen LH, Kemenhut, Kemenpar, KemendesPDT).
- Untuk terus mengoptimalkan capaian TPAK perempuan di Papua Selatan, direkomendasikan kebijakan ke depan (1) Mendorong optimalisasi kawasan sentra produksi pangan (Kementan, DPPKP); dan (2) Mendorong dan mendukung kewirausahaan perempuan dengan menyediakan pelatihan bisnis, akses pasar, dan pendampingan (Dinas KUKM dan Perindag).
- Untuk meningkatkan capaian kondisi jalan mantap Provinsi Papua, direkomendasikan (1) Mengadopsi teknologi modern dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan, seperti penggunaan material yang lebih tahan lama dan metode konstruksi yang lebih efisien (KemenPU, DPUPR); (2) Menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja lokal, dalam pembangunan dan

pemeliharaan jalan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dan mendukung perekonomian lokal (Disnakertrans ESDM, DPUPR, KemenPU); dan (3) Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarwilayah (KemenPU, DPUPR).

- Untuk meningkatkan skor PPH di Papua Selatan direkomendasikan kebijakan ke depan (1) Mendorong perbaikan kualitas konsumsi pangan untuk memenuhi gizi masyarakat dan konsumsi pangan lokal yang lebih beragam melalui penguatan pengembangan pangan lokal dan edukasi pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), serta penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademisi, lembaga nonpemerintah dan media) (DPPKP, Dinkes); (2) Mendorong peningkatan produksi pertanian melalui dukungan teknologi, akses ke pupuk dan benih berkualitas, serta pelatihan bagi petani. Hal ini juga termasuk diversifikasi tanaman untuk memastikan ketersediaan berbagai jenis pangan (Kementan, DPPKP).
- Untuk terus menurunkan prevalensi *stunting* di Papua Selatan, direkomendasikan ke depannya adalah (1) Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* dan perbaikan gizi lainnya (Dinkes, DPPKP); (2) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan seperti *telemedicine* dan pelayanan kesehatan bergerak (Kemenkes, Dinkes); (3) Mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan keuangan mikro untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program pelatihan keterampilan dan kredit mikro juga perlu diperkuat (DPPKP, Perbankan, Disnakertrans dan ESDM); dan (4) Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan di terutama untuk daerah dengan prevalensi *stunting* tinggi (KemenPU, DPUPR).
- Untuk terus mengoptimalkan capaian PoU di Papua Selatan, direkomendasikan kebijakan ke depan yaitu (1) Memastikan keterjangkauan harga kebutuhan bahan makanan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin (Dinsos dan PPPA); (2) Memperbaiki dan memperbarui satu data kemiskinan dengan memanfaatkan Data Regsosek agar bantuan lebih tepat sasaran (BPS, Bappenas, Dinsos); dan (3) Pemberian Kartu Usaha Afirmatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Kemensos, Dinsos).
- Untuk meningkatkan akses terhadap air minum perpipaan, direkomendasikan kebijakan ke depan (1) Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan di terutama untuk daerah dengan prevalensi *stunting* tinggi

(KemenPU, DPUPR); (2) Meningkatkan infrastruktur dan layanan dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi di kawasan perumahan untuk memastikan kualitas hidup yang layak (KemenPU, DPUPR, KemenPKP).

- Untuk terus mengoptimalkan capaian PDRB industri pengolahan di Papua Selatan, direkomendasikan kebijakan ke depan untuk (1) Mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan keuangan mikro untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program pelatihan keterampilan dan kredit mikro juga perlu diperkuat (DPPKP, Perbankan, Disnakertrans dan ESDM); (2) Meningkatkan iklim investasi melalui peningkatan kualitas regulasi dan transparansi dalam proses perizinan untuk mempercepat proses investasi dan mengurangi biaya administrasi (DPMPTSP); (3) Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarmasyarakat (KemenPU, DPUPR); dan (4) Mengimplementasikan pendekatan keamanan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah (Polri, TNI, Bakesbangpol).
- Guna meningkatkan indeks SPBE di Provinsi Papua Selatan, direkomendasikan (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan untuk memastikan adanya tenaga kerja yang kompeten dan siap industri (Kemenperin, Dinas KUKM dan Perindag, Disnakertrans ESDM); (2) Mengadakan pelatihan dan edukasi bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat umum tentang manfaat dan penerapan SPBE, serta cara penggunaannya yang efektif (Diskominfo); dan (3) Meningkatkan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi di Papua dengan memperbaiki infrastruktur jaringan internet dan memastikan akses yang merata ke teknologi canggih (Kemenkomdigi, Diskominfo); dan (4) Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan SPBE, termasuk server, perangkat keras, dan sistem keamanan informasi (Kemenkomdigi, Diskominfo).
- Untuk meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan di Papua Selatan, direkomendasikan kebijakan (1) Pengembangan infrastruktur kebudayaan melalui pembangunan museum, galeri seni, dan taman budaya untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Papua kepada generasi muda dan wisatawan (Kemenbud, Disdikbud); dan (2) Penguatan pendidikan kebudayaan melalui peningkatan kurikulum pendidikan yang mencakup materi tentang kebudayaan lokal Papua, termasuk bahasa, seni, dan tradisi (Kemenbud, Disdikbud).



 [dit.peppdbappenas](https://www.instagram.com/dit.peppdbappenas)

 [Direktorat PEPPD](https://www.youtube.com/DirektoratPEPPD)

 peppd.bappenas.go.id

 dit.peppd@bappenas.go.id